



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN PURBALINGGA





METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA

BAGIAN 1

Pengarah:

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M

Penanggung jawab:

Sapto Suhardiyo, S.STP, S.T

Penyusun:

Dra. Jeni Preandini, M.Si

Fian Setyaningsih, S.Si

Tris Dianasari, S.Si

Wely Andika, S.Kom

Annas Dian Wibowo, S.Kom

Sugiono, S.T

Penata Layout:

Hanifah Khairunisa Shofiaty, S.T

Copy Right: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga
Diterbitkan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga
Jln. Letkol Isdiman No 17 A, Purbalingga

Metadata Indikator Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga

Bagian #1 : 776 halaman

Ukuran Buku : 210 mm x 148,5 mm

ISBN : *** - *** - *** - * - *



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi, sehingga buku meta data sektoral Kabupaten Purbalingga bisa terselesaikan dengan baik, tanpa adanya halangan yang berarti. Kami juga ucapan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku meta data sektoral, semoga buku ini mendapatkan kebermanfaatan dimasa depan.

Metadata indikator menurut Pembina Data Statistik (BPS) adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Data statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Meta data statistik sektoral Kabupaten Purbalingga nantinya bisa menjadi rujukan bagi organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam pengisian data sektoral agar data benar-benar valid dan kontinu, walaupun terjadi pergeseran staf, mutasi dan promosi. Dengan menjaga validitas dan kontinuitas data, pemerintah dan masyarakat bisa



menggunakan data tersebut sesuai dengan kepentingannya. Meta data menjadi langkah penting dalam penyusunan data yang berkualitas.

Ibarat kata pepatah tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan buku metadata ini, tentunya jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran, kritik dan masukan senantiasa kami harapkan bagi semua pihak yang membaca buku ini. Agar kedepan bisa kami review guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirul Kalam, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purbalingga, Agustus 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | 3 |
| DAFTAR ISI..... | 5 |
| PENDAHULUAN..... | 6 |
| SEKRETARIAT DPRD | 10 |
| INSPEKTORAT..... | 25 |
| BAPPELITBANGDA | 45 |
| BAKEUDA | 82 |
| BKPSDM..... | 202 |
| KESBANGPOL..... | 286 |
| BPBD | 335 |
| DINDIKBUD | 404 |
| DINKES..... | 519 |
| DPUPR..... | 684 |



PENDAHULUAN

Latar Belakang:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga mengamanatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai validata tingkat daerah dalam kerangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Metadata Indikator Statistik menurut PERBAN BPS Nomor 5 Tahun 2020:

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.



| No | Nama Atribut | Penjelasan |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Nama Indikator | Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel |
| 2 | Konsep | Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu |
| 3 | Definisi | Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain |
| 4 | Interpretasi | Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik |
| 6 | Ukuran | Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan |
| 7 | Satuan | Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan |
| 8 | Klasifikasi | Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas |
| 9 | Publikasi Ketersediaan Indikator | Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikas |



| | Pembangun | |
|----|--|--|
| 10 | Nama Indikator Pembangun | Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit |
| 11 | Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan |
| 12 | Nama Variabel Pembangun | Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator |
| 13 | Level Estimasi | Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait |
| 14 | Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak |

Ruang Lingkup dan Batasan:

Ruang Lingkup publikasi ringkasan metadata indikator statistik sektoral ini dibatasi pada konten dan tahun. Pembatasan tersebut dilakukan mengingat banyaknya indikator statistik sektoral dari tahun ke tahun maupun isian dari metadata indikator statistik sektoral. Pembatasan tahun dilakukan pada pengumpulan tahun 2022, sedangkan pembatasan pada konten metadata indikator statistik sektoral ditujukan pada tiga kelompok informasi yaitu identitas Indikator, data, dan metodologi. Walaupun demikian, dari tiga kelompok informasi tersebut ada 14 informasi yang disajikan yaitu:

1. Identitas Indikator
 - a. Konsep dan Definisi
 - b. Unit Penyelenggara
 - c. Kelompok Indikator
 - d. Tujuan dan Kegunaan
 - e. Interpretasi



2. Data

- a. Data yang dikumpulkan
- b. Periodesasi

3. Metodologi

- a. Unit Observasi
- b. Tingkat Penyajian
- c. Rumus



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

SEKRETARIAT DPRD



Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui pengukuran kinerja pelayanan kesekretariatan kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Sekretariat DPRD
Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan
Semakin tinggi nilai indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan tingkat kepuasan anggota DPRD atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD termasuk dalam kategori baik, yang berarti standar kinerja layanan Sekretariat DPRD sesuai harapan dan dapat diterima oleh anggota DPRD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Hasil Survei Atas Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Kuisisioner

Ukuran

Indeks

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD adalah persentase capaian kinerja pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD yang merupakan rata-rata dari cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan dan cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Sekretariat DPRD
Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan peningkatan capaian standar kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Hasil Survei Atas Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Cakupan}1 + \text{Cakupan}2}{2}$$

Keterangan:

Cakupan1 = Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Tidak
Diakses Umum

perundang-undangan

Cakupan2 = Cakupan fasilitasi
pelayanan penganggaran dan
pengawasan

Persentase

%



Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan adalah persentase capaian kinerja sub kegiatan yang terkait dengan non penganggaran dan pengawasan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Sekretariat DPRD
Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD di sub kegiatan non penganggaran dan pengawasan, antara lain fasilitasi Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Panitia Khusus.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Hasil Survei Atas Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

Keterangan:



Capaian kinerja = Capaian kinerja
sub kegiatan non penganggaran
dan pengawasan

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan adalah persentase capaian kinerja sub kegiatan yang terkait dengan penganggaran dan pengawasan Sekretariat DPRD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Unsur Pendukung
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD di bidang sub kegiatan penganggaran dan pengawasan antara lain Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Hasil Survei Atas Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

Keterangan:

Capaian kinerja = Capaian kinerja sub kegiatan penganggaran dan pengawasan

Ukuran

Persentase

Satuan

%



Apakah Indikator Dapat Diakses Umum



Jumlah Anggota DPRD Laki-laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anggota DPRD Laki-laki adalah anggota DPRD Purbalingga yang berjenis kelamin Laki-laki

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Sekretariat DPRD
Aspek Unsur Pendukung
Pemerintahan

Interpretasi

Menunjukkan jumlah anggota DPRD Purbalingga yang berjenis kelamin Laki-laki

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pengumpulan Data

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Anggota DPRD Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anggota DPRD Perempuan adalah anggota DPRD Purbalingga yang berjenis kelamin Perempuan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Sekretariat DPRD
Aspek Unsur Pendukung
Pemerintahan

Interpretasi

Menunjukkan jumlah anggota DPRD Purbalingga yang berjenis kelamin Perempuan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pengumpulan Data

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Fraksi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Sekretariat DPRD
Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah fraksi menunjukkan jumlah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum dengan minimal jumlah anggota tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Tata Tertib DPRD

Ukuran

Jumlah

Satuan

fraksi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Peraturan Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Sekretariat DPRD
Aspek Unsur Pendukung
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah peraturan daerah menunjukkan jumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Semakin banyak jumlah peraturan daerah, semakin kompleks pula aturan dan regulasi yang berlaku di tingkat daerah. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum .

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Produk yang Dihasilkan
DPRD Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pengumpulan Data

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Keputusan DPRD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Keputusan DPRD adalah pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Sekretariat DPRD

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah Keputusan DPRD menunjukkan jumlah Keputusan DPRD yang ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Purbalingga. Semakin banyak jumlah Keputusan DPRD dapat mencerminkan tingkat kompleksitas kebijakan dan regulasi yang dihadapi oleh daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Produk yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pengumpulan Data

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Keputusan Pimpinan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Keputusan Pimpinan adalah pengambilan keputusan dalam rapat Pimpinan DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Sekretariat DPRD
Aspek Unsur Pendukung
Pemerintahan

Interpretasi

Menunjukkan jumlah Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan DPRD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Produk yang Dihasilkan
DPRD Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pengumpulan Data

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Jumlah Persetujuan Bersama (Nota Kesepakatan)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persetujuan Bersama (Nota Kesepakatan) adalah kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan

Sekretariat DPRD

Aspek Unsur Pendukung
Pemerintahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Jumlah Persetujuan Bersama (Nota Kesepakatan) menunjukkan jumlah persetujuan bersama hasil pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan antara DPD Purbalingga dengan pihak terkait lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Produk yang Dihasilkan
DPD Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pengumpulan Data

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Tidak



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

INSPEKTORAT



Jumlah Obyek Pemeriksaan yang diperiksa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Obyek Pemeriksaan adalah Obyek Pemeriksaan Objek pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah dan dituangkan dalam SK Bupati Purbalingga tentang PKPT (program kerja pengawasan tahunan) (lingkup: opd, kecamatan, desa)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Inspektorat

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan
Banyaknya objek pengawasan diusahakan berdasar dari PKPT (program kerja pengawasan tahunan) (lingkup: opd, kecamatan, desa yang paling beresiko). Dengan jumlah kegiatan penugasan yang akan dilaksanakan dituangkan dalam PKPT satu tahun.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data Tahunan sesuai jumlah opd yang tercantum pada SK terbit setiap awal tahun

Ukuran

Jumlah

Satuan

nilai

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Tidak



Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan adalah Jumlah temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)

Inspektorat

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan Temuan Pemeriksaan APIP diharapkan menjadi peningkatan sistem pengawasan dalam lingkup Pemerintah Daerah.Semakin sedikit jumlah temuan tersebut bisa disebabkan fungsi pengawasan Inspektorat semakin baik dan optimal.Sebaliknya semakin banyak jumlah temuan menggambarkan fungsi pengawasan Inspektorat semakin kurang baik atau buruk dan kurang optimal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Jumlah Temuan dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Jumlah

Laporan



Jumlah Aduan yang masuk ke Inspektorat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Aduan adalah Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk yang ditujukan ke inspektorat terkait tata kelola pemerintahan di Pemkab Purbalingga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyaknya jumlah aduan yang masuk menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan good governance, clean government, dan pelayanan publik yang baik

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data jumlah aduan yang masuk ke Inspektorat

Ukuran

Jumlah

Satuan

laporan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Tidak



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP ditambah Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Hasil rekomendasi dari pemeriksaan APIP dan BPK menunjukkan berjalannya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP + Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Ukuran



Satuan rekomendasi
Apakah Indikator Dapat Tidak
Diakses Umum



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP adalah Jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Hasil rekomendasi dari pemeriksaan APIP menunjukkan berjalannya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan APIP

Ukuran

Jumlah

Satuan

rekomendasi

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Tidak



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah Jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diharapkan mampu membuat OPD/obrik yang diperiksa lebih disiplin dalam pengelolaan sistem pemerintahan, baik administrasi maupun keuangan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK

Ukuran

Jumlah

Satuan

rekomendasi

Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Tidak



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti ditambah Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Inspektorat Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti, maka akan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti + Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | rekomendasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | | |
|---------------------------------------|---|-------|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti adalah Jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti | Hasil |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Inspektorat Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan | |
| Interpretasi | Rekomendasi APIP diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas yang bersangkutan | |

■ DATA

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga | |
| Periodikasi | Tahunan | |

■ METODOLOGI

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti | |
| Ukuran | Jumlah | |
| Satuan | rekomendasi | |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak | |



Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti adalah Jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Inspektorat Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas yang bersangkutan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | rekomendasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti adalah Presentasi rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti baik yang bersifat administrasi maupun keuangan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi Persentase menunjukkan semakin banyak hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Semakin banyak Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab administrasi maupun keuangan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JRHPT}{JRHP} \times 100\%$$

Keterangan:



JRHPT = Jumlah Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan yang Selesai
Ditindaklanjuti

JRHP = Jumlah Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Tidak
Diakses Umum



Nilai Maturitas SPIP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Nilai Maturitas SPIP adalah Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik dengan interval nilai : 0(belum ada), 1,0 s/d 2,0(rintisan), 2,0 s/d 3,0(berkembang), 3,0 s/d 4,0(terdefinisi), 4,0 s/d 4,5((terkelola dan terukur), 4,5 s/d 5,0(optimum)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rilis BPKP (Skor interval 0-5)

Ukuran

Nilai

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Tingkat Maturitas SPIP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tingkat Maturitas SPIP adalah Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Tingkat Maturitas SPIP bertujuan untuk pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. ada 5 Kategori yaitu: Belum Ada, Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola, Terukur, dan Optimum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Rilis BPKP
Tingkat
Tanpa satuan
Ya



Level Kapabilitas APIP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Level Kapabilitas APIP adalah Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan efektivitas penyelenggaraan SPI semakin bagus dan mampu memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Level kapabilitas APIP dikelompokkan menjadi 5 tingkatan yaitu Level 1 (initial), Level 2 (infrastructure), Level 3 (integrated), Level 4 (managed), dan Level 5 (optimizing).

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Rilis BPKP |
| Ukuran | Level |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Ya | |
| Diakses Umum | |



Nilai MRI (Manajemen Risiko Indeks)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Nilai MRI (Manajemen Risiko Indeks) adalah Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi nilai manajemen risiko menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi, menganalisa,mengendalikan ,dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan level MRI: initial (level 1), repeatable (level 2), defined (level 3), managed (level 4), optimized (level 5)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Rilis BPKP |
| Ukuran | Nilai |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Nilai Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP Korsupgah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Nilai Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP Korsupgah) adalah Monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Inspektorat
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Nilai MCP menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi melalui langkah dan perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan 8 area intervensi. Dengan interval nilai: 0-67,9(sangat rentan), 68-73,6 (rentan), 73,7-77,4 (waspada), 77,5-100 (terjaga).

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Bidang Pengawasan Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Rilis KPK



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator

Diakses Umum

Nilai

Tanpa satuan

Dapat

Ya



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Skor Perencanaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perencanaan adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai komponen perencanaan pada penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 evaluasi SAKIP meliputi:

- AA (Nilai >90-100) Sangat Memuaskan
- A (Nilai>80-90) Memuaskan
- BB (Nilai>70-80) Sangat Baik
- B (Nilai >60-70) Baik
- CC (Nilai>50-60) Cukup (Memadai)
- C (Nilai>30-50) Kurang
- D (Nilai >0-30) Sangat Kurang

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Penilaian sesuai Permenpan Nomor 88 Tahun 2021, bobot nilainya 30% |
| Ukuran Satuan | Skor angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Program dalam RPJMD adalah program yang tercantum dan digunakan dalam RPJMD |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Bappelitbangda Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam dokumen RPJMD beserta indikator kinerja program (<i>outcome</i>), target kinerja dan pagu indikatifnya. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Program dalam RPJMD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Program |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Program dalam RKPD adalah program yang tercantum dan digunakan dalam RKPD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam dokumen RKPD beserta indikator kinerja program (*outcome*), target kinerja dan pagu indikatifnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Program dalam RKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Program

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD adalah perbandingan jumlah program dalam RKPD dengan jumlah program dalam RPJMD

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila program yang terdapat di dokumen RPJMD digunakan semua di dalam dokumen RKPD maka tingkat keselarasannya 100% (selaras)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rumus untuk RPJMD 2016-2021

$$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$$

Rumus untuk RPJMD 2021-2026

$$\left(\frac{P1+P2+P3}{3} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

$$P1 = \frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}}$$



$$P2 = \frac{\text{Jumlah Indikator dalam RKPD}}{\text{Jumlah Indikator dalam RPJMD}}$$
$$P3 = \frac{\text{Jumlah Target dalam RKPD}}{\text{Jumlah Target dalam RPJMD}}$$

| | |
|---|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Ya Diakses Umum | |



Jumlah Program Rencana strategis (Renstra) dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah banyaknya program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila jumlah program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen Renstra mengambil semua jumlah program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen RPJMD maka dokumen tersebut selaras

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Ukuran

Jumlah

Satuan

Program

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Program Rencana kerja (renja) dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah banyaknya program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Apabila jumlah program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen Renja mengambil semua jumlah program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen RKPD maka dokumen tersebut selaras

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Ukuran

Jumlah

Satuan

Program

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah persentase rata-rata program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila program pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen Renstra mengambil semuaprogram pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen RPJMD maka tingkat keselarasannya 100% (selaras)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1+J_2}{2} \times 100\%$$



Keterangan:

J1 = Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

J2 = Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Ya

Diakses Umum



Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi adalah banyaknya program Renstra dengan RPJM bidang Ekonomi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila jumlah program pada bidang ekonomi dalam dokumen Renstra mengambil semua jumlah program pada bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD maka dokumen tersebut selaras

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi

Ukuran

Jumlah

Satuan

Program

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi adalah banyaknya program Renja dengan RKPD Bidang Ekonomi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila jumlah program pada bidang ekonomi dalam dokumen Renja mengambil semua jumlah program pada bidang ekonomi dalam dokumen RKPD maka dokumen tersebut selaras

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi

Ukuran

Jumlah

Satuan

Program

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi adalah persentase rata-rata dengan RPJMD bidang Ekonomi, Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila program pada bidang ekonomi dalam dokumen Renstra mengambil semua program pada bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD maka tingkat keselarasannya 100% (selaras)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1+J_2}{2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Ekonomi

J2 = Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi

Persentase

Ukuran



Satuan %
Apakah Indikator Dapat Diakses Ya
Umum



Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah banyaknya program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila jumlah program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen Renstra mengambil semua jumlah program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen RPJMD maka dokumen tersebut selaras

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

Program

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah banyaknya program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila jumlah program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen Renja mengambil semua jumlah program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen RKPD maka dokumen tersebut selaras

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

Program

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase keselarasan program Rencana strategis (Renstra) dengan RPJMD dan program Rencana Kerja (Renja) dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah persentase rata-rata program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen Renstra mengambil semua program pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam dokumen RPJMD maka tingkat keselarasannya 100% (selaras)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Skor Perencanaan di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan $\frac{J_1+J_2}{2} \times 100\%$

Keterangan:

J1 = Jumlah Program Renstra dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

J2 = Jumlah Program Renja dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya
Umum



Jumlah Dokumen Penelitian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah dokumen penelitian adalah jumlah dokumen tentang kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis dilakukan secara swakelola maupun kerjasama/mitra dengan pihak ke-3

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Dokumen penelitian ini didapatkan dari semua pihak yang pernah mengajukan izin penelitian di Bappelitbangda, karena dalam hal ini setiap orang/kelompok yang melakukan penelitian di kabupaten purbalingga harus memberikan hasil penelitian ke bappelitbangda.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Dokumen Penelitian

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rekomendasi Penelitian yang diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah rekomendasi penelitian yang diterbitkan adalah rekomendasi penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan penelitian.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Surat yang dikeluarkan untuk memberikan izin kepada peneliti, baik itu perorangan atau kelompok untuk melakukan penelitian atau pengambilan data dalam suatu wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Setiap orang yang akan melakukan penelitian di Kabupaten Purbalingga harus memiliki rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bappelitbangda sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP).

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rekomendasi Penelitian yang diterbitkan

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah/Frekuensi Diseminasi Hasil penelitian dan pengembangan (Litbang)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah/frekuensi diseminasi hasil litbang adalah banyaknya diseminasi hasil litbang

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Banyaknya hasil dari penelitian dan pengembangan (litbang) yang sudah dinyatakan layak maka akan di diseminaskan/ disosialisasikan sehingga bisa ditiru ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat/ perangkat daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbang di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah/Frekuensi Diseminasi Hasil Litbang

Ukuran

Frekuensi

Satuan

kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Inovasi dan Invensi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produksi.

Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Seluruh hasil penelitian, pengembangan atau penciptaan hal baru yang dibuat oleh perangkat daerah/masyarakat untuk meningkatkan kinerja secara individu maupun kelompok.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangga di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Inovasi dan Invensi |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | inovasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Inovasi dan Invensi yang diterapkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Inovasi dan invensi yang diterapkan adalah inovasi dan invensi yang telah dinyatakan sebagai bentuk perubahan/pembaruan dan digunakan dengan efektif untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kinerja.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

seluruh inovasi dan invensi yang telah dibuat baik dari Perangkat Daerah/masyarakat dan diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah maupun memecahkan masalah/ meningkatkan usaha bagi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangga di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Inovasi dan Invensi yang diterapkan

Ukuran

Jumlah

Satuan

inovasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Inovasi dan Invensi yang didiseminasikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Inovasi dan invensi yang didiseminasi adalah diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan kegiatan menginformasikan seluruh hasil inovasi maupun invensi baik yang dihasilkan dari penilaian krenova tingkat kabupaten/provinsi/nasional, inovasi dari kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga tertentu yang disosialisasikan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat/perangkat daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangga di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Inovasi dan Invensi yang didiseminasi

Ukuran

Jumlah

Satuan

inovasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemanfaatan hasil kelitbang adalah manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, setelah didesiminasi dan dimanfaatkan untuk budaya atau masyarakat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila inovasi dan invensi yang sudah dibuat oleh OPD ataupun perorangan dan kelompok semuanya dimanfaatkan maka persentasenya 100% (dimanfaatkan semua)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbang di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah inovasi dan invensi yang diterapkan

J2 = Jumlah inovasi dan invensi yang didesiminasi)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Penerapan Inovasi Teknologi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penerapan inovasi teknologi adalah penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Apabila inovasi teknologi yang sudah dibuat dan semuanya digunakan dan dimanfaatkan maka persentasenya 100% (diterapkan semua)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangga di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Inovasi dan Invensi yang diterapkan

J2 = Jumlah Inovasi dan Invensi Persentase %

Ukuran

Ya

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum



Skor IID (Indeks Inovasi Daerah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Menteri.
- (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;



- b. pengukuran indeks;
- c. presentasi; dan
- d. validasi lapangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangga di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Release Kemendagri

Ukuran

Indeks

Satuan

angka

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Skor IDSD (Indeks Daya Saing Daerah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Pengukuran IDSD menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi dalam 12 pilar dan memiliki 62 indikator di tingkat Provinsi serta 48 indikator di tingkat Kabupaten/Kota. Keseluruhan indikator diukur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh kementerian, dan lembaga terkait.

Tujuan dari pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Penelitian dan Kelitbang di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Release BRIN

Indeks

angka

Ya



Skor IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah, Pasal 6 IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :

- a. Kesesuaian dokument perencanaan dan penganggaran
- b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
- d. penyerapan anggaran
- e. kondisi keuangan daerah
- f. opini badan pemeriksa keuangan atas LKPD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangda di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Release Kemendagri |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga/swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga/swasta adalah jumlah MoU yang masuk di Bagian Tata Pemerintahan, jumlah kerjasama dengan mahasiswa KKN Perguruan Tinggi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten, baik dengan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, perguruan tinggi, dan swasta yang ditandai dengan adanya MoU secara resmi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penelitian dan Kelitbangga di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga/swasta

Ukuran

Jumlah

Satuan

lembaga

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Persentase anggaran litbang (penelitian dan pengembangan) terhadap total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bappelitbangda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Diperoleh dengan cara membagi jumlah anggaran untuk penelitian dan pengembangan riset pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha (industri manufaktur, pertambangan, dan energi) dan swasta non profit dengan APBD dikalikan dengan 100 persen.



Untuk mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kapabilitas ilmu pengetahuan daerah dan penciptaan inovasi yang berdampak pada rencana keuangan daerah.

■ DATA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan Periodesasi | Penelitian dan Kelitbangga di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
|--------------------------------------|--|

■ METODOLOGI

| | |
|--|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Jumlah anggaran litbang}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

BADAN KEUANGAN DAERAH



Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bidang Tanah Milik Pemda adalah jumlah bidang tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

(Kartu Inventaris Barang 'A' Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga)
Bakeuda

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Aspek Pertanahan
Peningkatan jumlah bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat menunjukkan semakin tertibnya administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain adanya inventarisasi, penambahan bidang hasil serah terima dari developer (untuk tanah prasarana, sarana dan utilitas perumahan), penambahan jumlah bidang tanah sebagian disebabkan penerbitan sertifikat, sehingga pencatatan asetnya menyesuaikan. Penambahan bidang tanah dapat mendukung Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan Ekonomi, Pariwisata dan Pertanian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | bidang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Bidang Tanah Milik Pemda

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bidang Tanah Milik Pemda adalah luas tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

(Kartu Inventaris Barang 'A' Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga)

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Pertanahan

Interpretasi

Semakin Luas Bidang Tanah Milik Pemda menunjukan semakin tertibnya administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain adanya inventarisasi (pencatatan tanah yang belum tercatat), penambahan luas tanah milik Pemda dapat berupa hasil serah terima dari developer (untuk tanah prasarana, sarana dan utilitas perumahan). Penambahan luas tanah milik Pemda dapat mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, pariwisata dan pertanian dan pengembangan ruang terbuka hijau.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Luas

Satuan

m^2

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bidang Tanah Milik Pemda adalah tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

(Laporan Tribulanan MCP Koorsupgah KPK area Pengelolaan BMD)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Bakeuda
Aspek Pertanahan
Semakin banyak jumlah bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat menunjukkan semakin tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah (tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum), penyertifikatan tanah juga mendukung penilaian MCP Koorsupgah KPK.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
bidang
Ya



Luas Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bidang Tanah Milik Pemda adalah tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

(Laporan Tribulanan MCP Koorsupgah KPK area Pengelolaan BMD)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Bakeuda

Aspek Pertanahan

Semakin luas jumlah bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat menunjukkan semakin tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah (tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum), penyertifikatan tanah juga mendukung penilaian MCP Koorsupgah KPK.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Luas

Satuan

m^2

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Persentase Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase bidang tanah milik Pemda bersertifikat adalah perbandingan jumlah bidang tanah Pemda bersertifikat dengan luas bidang tanah milik Pemda.

(Laporan Tribulanan MCP Koorsupgah KPK area Pengelolaan BMD)

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Pertanahan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JB}{LP} \times 100\%$$

Keterangan:

JB = Jumlah Bidang Tanah Pemda Bersertifikat

LP = Luas Bidang Tanah Milik Pemda

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pendapatan Asli Daerah (PAD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Semakin banyak PAD menunjukkan kemandirian keuangan, potensi pembangunan, pengembangan potensi lokal, kualitas pelayanan publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain Lain PAD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pajak Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Semakin banyak pendapatan pajak daerah menunjukkan kemandirian keuangan, potensi pembangunan, responsibilitas warga dan efisiensi administrasi pajak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMPATDA

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Retribusi Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009)

Semakin tinggi pendapatan retribusi daerah menunjukkan kemandirian keuangan, efisiensi dan kualitas pelayanan, penggunaan sumber daya secara optimal dan potensi ekonomi daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMPATDA

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(STS Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan)

Semakin banyak hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan hal yang mungkin dapat diinterpretasikan efisiensi pengelolaan, kemandirian keuangan, pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik serta pengembangan ekonomi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMPATDA

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Lain-lain PAD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lain-lain PAD adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

(UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
Semakin besar lain-lain PAD (Bagian dari Pendapatan Asli Daerah) maka semakin baik kemandirian fiskal suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMPATDA

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Dana Perimbangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Bakeuda

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Semakin banyak Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dapat menunjukkan:

- ketergantungan yang lebih besar pada pendanaan dari pemerintah pusat.
- Semakin besar peluang pemda untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- Mengurangi Kesenjangan Pembangunan
- rendahnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah

■ DATA



Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Semakin banyak Dana bagi hasil pajak atau dana bagi hasil bukan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemda mungkin telah melakukan upaya untuk memperkuat administrasi perpajakan, meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak, atau memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodikasi

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Dana Alokasi Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah menunjukkan peningkatan kesejahteraan daerah, pemerataan pembangunan, keterbatasan pendapatan lokal, dan tingginya dukungan pemerintah pusat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Dana Alokasi Khusus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Semakin banyak alokasi khusus yang diberikan Pemerintah Daerah dapat menunjukkan beberapa hal yang mungkin dapat diinterpretasikan Perhatian khusus dari pemerintah pusat, masalah dan kebutuhan mendesak, alokasi khusus sering kali ditujukan untuk memperkuat sektor ekonomi lokal, meningkatkan infrastruktur, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, atau mempromosikan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Semakin besar lain-lain pendapatan daerah yang sah maka semakin besar pendapatan suatu daerah dan menunjukkan kondisi kemampuan keuangan daerah semakin baik

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Output SIMPATDA
Jumlah
Rp
Ya



Hibah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah)

Semakin banyak pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan beberapa hal yang mungkin dapat diinterpretasikan ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah dapat berkurang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Dana Darurat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/Pmkk.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat)

Ketersediaan dana darurat yang cukup menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk merespons krisis dengan cepat dan efektif. Dana darurat ini dapat digunakan untuk mengatasi situasi darurat, seperti bencana alam, keadaan darurat kesehatan, atau kejadian tak terduga lainnya. Dengan adanya dana darurat yang memadai, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan kepada masyarakat yang terkena dampak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Dana Bagi Hasil Pajak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar dana bagi hasil pajak maka semakin baik kemampuan keuangan suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana penyesuaian dan otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah dan membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak dana penyesuaian dan otonomi khusus menunjukkan bahwa ada pengakuan akan kebutuhan keragaman dan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ini dapat meningkatkan responsivitas dan efisiensi penggunaan dana publik, serta memperkuat partisipasi dan pemberdayaan daerah atau pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Bantuan Keuangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bantuan keuangan adalah bantuan dana dari pemerintah pusat yang diperuntukan penggunaanya ditetapkan oleh pemerintah pusat pemberi dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peningkatan jumlah bantuan keuangan juga dapat mencerminkan upaya untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui bantuan keuangan, pemerintah pusat dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional, memperkuat infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Sumbangan Pihak ke-3

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sumbangan pihak ke-3 adalah pemberian kepada pemerintah daerah secara sukarela, tidak mengikat dan yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Sumbangan pihak ketiga sering kali ditujukan untuk mendukung program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan sumbangan ini dapat mencerminkan kepercayaan terhadap rencana dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta kesadaran akan pentingnya peran sektor swasta dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Tidak Langsung

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa publik kepada masyarakat. Jenis belanja ini lebih berkaitan dengan kegiatan administratif dan operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Peningkatan belanja tidak langsung dapat menunjukkan kompleksitas pemerintah daerah, upaya peningkatan efisiensi dan profesionalisme, pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Subsidi + Belanja Hibah + Belanja Bansos + Belanja Bagi Hasil + Belajna Bantuan Keuangan + Belanja Tidak Terduga

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Pegawai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peningkatan belanja pegawai dapat menunjukkan pertumbuhan administrasi pemerintahan, peningkatan layanan publik, peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penyediaan keahlian khusus.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Bunga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peningkatan belanja bunga dapat menunjukkan ketergantungan terhadap utang, kebutuhan pembiayaan tambahan, pengelolaan utang yang buruk serta kondisi suku bunga yang tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Belanja Subsidi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja subsidi adalah belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu seperti pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah, atau sektor lain yang dianggap strategis. Hal ini dapat membantu sektor-sektor tersebut berkembang, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Hibah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Desa, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peningkatan belanja hibah menunjukkan komitmen dan dukungan yang lebih besar terhadap kegiatan amal atau sosial atau mencerminkan kebutuhan yang lebih besar untuk dukungan eksternal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Belanja Bansos

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja bansos adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012)

Semakin banyak belanja bantuan sosial dapat menunjukkan hal tergantung pada konteksnya:

- Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam situasi tertentu
- Respons pemerintah terhadap ketimpangan sosial dan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berkekurangan dengan kelompok yang lebih mampu.
- Meningkatnya belanja bansos juga dapat mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodikasi

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Belanja Bagi Hasil

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja bagi hasil adalah sumber yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Bakeuda

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan
Semakin banyak belanja bagi hasil dapat menunjukkan beberapa hasil tergantung pada konteksnya:

- Jika belanja bagi hasil meningkat, ini bisa menunjukkan bahwa penerima pendapatan (misalnya, individu atau organisasi) mengalami peningkatan dalam jumlah pendapatan yang mereka terima
- Meningkatnya belanja bagi hasil juga dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja positif dalam suatu sektor.
- Peningkatan belanja bagi hasil dapat menunjukkan peningkatan dalam kerjasama, kemitraan, atau kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat



■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodikasi

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Belanja Bantuan Keuangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja bantuan keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Belanja bantuan keuangan dapat mencerminkan kepedulian pemerintah kepada lembaga-lembaga yang mendukung jalannya pemerintah daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Tidak Terduga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Belanja tidak terduga dapat mencerminkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan mendesak atau perubahan dalam lingkungan yang memerlukan aksi cepat. Terkadang, pemerintah daerah dapat dihadapkan pada kebutuhan mendesak dalam sektor-sektor tertentu yang tidak terduga. Misalnya, pemeliharaan mendadak pada infrastruktur yang mengalami kerusakan serius, perluasan layanan kesehatan dalam menghadapi wabah penyakit, atau pemulihan ekonomi dalam situasi krisis.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | APBD Tahun Anggaran Berjalan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Belanja Langsung

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar belanja langsung menunjukkan semakin besar upaya pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pelayanan publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Belanja Jasa + Belanja Modal

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Pegawai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Sesuai UU HKPD Proporsi Belanja Pegawai dijaga proporsinya maksimum 30% dari APBD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Barang dan Jasa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Belanja barang jasa dimaksudkan sebagai pemenuhan barang persediaan untuk operasional kantor sehari-sehari.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Belanja Modal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Belanja modal dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan infrastruktur untuk pelayanan masyarakat, semakin besar proporsinya diharapkan kualitas infrastruktur semakin baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penerimaan Pembiayaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Penerimaan pembiayaan dimaksudkan sebagai pemenuhan rencana belanja yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari pendapatan daerah lainnya

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah adalah sumber pembiayaan yang didapat dari diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintah pusat atau pemda lainnya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan pengembalian dari pemberian pinjaman daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Penerimaan Kembali Tuntutan Ganti Rugi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penerimaan kembali tuntutan ganti rugi adalah penerimaan kembali tuntutan ganti rugi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Penerimaan kembali tuntutan ganti rugi mencerminkan kepatuhan para pihak yang mendapat tuntutan untuk memenuhi kewajibannya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penerimaan kembali pinjaman dana bergulir adalah penerimaan kembali pinjaman dana bergulir.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Penerimaan kembali pinjaman dana bergulir mencerminkan kepatuhan para pihak yang mendapat pinjaman dana bergulir untuk memenuhi kewajibannya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Penggunaan Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penggunaan Silpa tahun anggaran sebelumnya adalah sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai pada akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampaunan atas penerimaan daerah seperti penerimaan asli daerah, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak SiLPA maka semakin efisien pengelolaan APBD sebelumnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pencairan Dana Cadangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Pencairan dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan dengan pembentukan dana cadangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah

Ukuran

Rp

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah pengeluaran pembiayaan adalah jumlah pengeluaran pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah serta tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaharan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak pengeluaran pembiayaan diharapkan semakin besar imbal hasil yang diterima pemerintah daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan + Penyertaan Modal Pemerintah Daerah + Pembayaran Pokok Utang + Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah + Tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaharan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pembentukan Dana Cadangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Pembentukan dana cadangan dimaksudkan sebagai upaya menyisihkan dana untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus

Jumlah dana cadangan

Penghitungan

Jumlah tahun penyisihan anggaran

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyertaan modal pemerintah daerah adalah usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar penyertaan modal diharapkan bagi hasil yang diterima pemerintah daerah semakin besar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Pembayaran Pokok Utang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pembayaran pokok utang adalah pembiayaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Pembayaran pokok utang dimaksudkan untuk mengurangi beban utang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah adalah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar pemberian pinjaman diharapkan semakin besar imbal hasil yang diterima pemerintah daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Tuntutan Ganti Rugi Dan Tuntutan Pembendaraan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaraan adalah tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaraan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Tuntutan ganti rugi dimaksudkan sebagai tuntutan kerugian daerah yang dibebankan kepada pegawai non benda hara, sedangkan tuntutan perpendaharaan dimaksudkan sebagai tuntutan kerugian daerah yang dibebankan kepada benda hara.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pembiayaan Netto

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin dekat besaran pembiayaan netto dengan jumlah pendapatan maka APBD semakin baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kondisi Keuangan Daerah di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Sisa Lebih Pembayaran Anggaran

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sisa Lebih Pembayaran Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembayaran dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar SILPA mengindikasikan belanja makin efisien.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Aset Lancar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aset lancar adalah aset yang berusia kurang dari satu tahun. Sehingga, dapat dikatakan kepemilikan aset berjangka waktu singkat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Peningkatan aset lancar mencerminkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pemerintah kabupaten Purbalingga. Jika Pendapatan Daerah meningkat, hal ini berdampak positif pada posisi keuangan pemerintah daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Neraca Keuangan
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Lampiran APBD Perubahan
Jumlah
Rp
Ya



Kas dan Setara Kas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Purbalingga atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kas dan setara kas menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Neraca Keuangan
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Output SIPD
Jumlah
Rp
Ya



Investasi Jangka Pendek

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

semakin banyak jumlah investasi jangka pendek menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Piutang Pendapatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Piutang pendapatan adalah pendapatan yang belum diterima oleh pemerintah daerah meskipun dari sisi waktu sudah menjadi hak milik pemerintah daerah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah piutang pendapatan Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Piutang Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Piutang lainnya adalah piutang yang timbul selain dari kegiatan utama pemerintah daerah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah piutang lainnya Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Penyisihan Piutang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penyisihan uang Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

APBD Tahun Anggaran Berjalan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Beban Dibayar Dimuka

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Beban dibayar dimuka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayar pada periode saat ini, namun pemerintah daerah sudah membayar terlebih dahulu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak beban dibayar dimuka Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Persediaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persediaan adalah bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang

Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak persediaan Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMASET (Persediaan)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Aset Untuk Dikonsolidasikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah aset yang dikonsolidasikan Pemerintah Daerah menunjukkan semakin banyak Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMASET (Aset Tetap)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Investasi Jangka Panjang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi dimana daya yang digunakan akan dijalankan terus menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo (minimal satu tahun).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah)
Semakin besar investasi jangka panjang mengindikasikan terdapat surplus anggaran yang dapat digunakan untuk investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan balikan berupa pendapatan jangka panjang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Neraca Keuangan
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Investasi Jangka Panjang Non Permanen

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Investasi jangka panjang non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Investasi jangka panjang non permanen dimaksudkan sebagai upaya penempatan surplus anggaran untuk investasi pada BUMN, BUMD, dan lain-lain.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Investasi Jangka Panjang Permanen

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Investasi jangka panjang permanen adalah jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Investasi jangka panjang non permanen dimaksudkan sebagai upaya penempatan surplus anggaran untuk penyertaan modal pada BUMN, BUMD, dan lain-lain.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perda Penyertaan Modal
Jumlah
Rp
Ya



Aset Tetap

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak aset tetap semakin banyak kekayaan daerah dimaksud.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Output SIMASET (Aset Tetap)
Jumlah
Rp
Ya



Tanah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak aset tanah semakin leluasa pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Output SIMASET KIB A

Jumlah

Rp

Ya



Peralatan dan Mesin

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Peralatan dan mesin adalah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak aset peralatan dan mesin, semakin leluasa pemerintah daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan
Kabupaten Purbalingga
Daerah
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMASET KIB B

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Gedung dan Bangunan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Gedung dan bangunan adalah mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak aset peralatan dan mesin, semakin leluasa pemerintah daerah melakukan penyediaan infrastruktur layanan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Neraca Keuangan
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Output SIMASET KIB C
Jumlah
Rp
Ya



Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jalan, irigasi, dan jaringan adalah mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak aset jalan, semakin baik infrastruktur transportasi, semakin banyak irigasi semakin baik infrastruktur pertanian, semakin banyak jaringan semakin baik infrastruktur kelistrikan, telpon, dan internet suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Output SIMASET KIB D
Jumlah
Rp
Ya



Aset Tetap Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak aset tetap lainnya (buku dan barang bercorak kebudayaan) semakin baik infrastruktur pendidikan suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMASET KIB E

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Konstruksi Dalam Pengerjaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin sedikit konstruksi dalam pengerjaan semakin efisien kegiatan pembangunan. Semakin banyak kegiatan yang terselesaikan pada tahun berjalan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMASET KIB F

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Akumulasi Penyusutan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akumulasi penyusutan adalah akumulasi alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

semakin besar akumulasi penyusutan, semakin banyak aset yang fungsinya menurun

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Output SIMASET Penyusutan
Jumlah
Rp
Ya



Dana Cadangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar dana cadangan semakin banyak yang harus disisihkan olehkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kegiatan yang direncanakan dengan dana cadangan tersebut

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Aset Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aset lainnya adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik namun nilainya berbentuk kepercayaan dengan pihak lain Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VIII

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Aset lainnya biasanya berupa *software*, program, atau aplikasi. Semakin banyak aset lainnya menunjukkan semakin baik digitalisasi suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMASET Aset Lainnya

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Tagihan Jangka Panjang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tagihan jangka panjang adalah tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak tagihan jangka panjang semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan tagihan jangka panjang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
Rp
Ya



Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak kemitraan dengan pihak ketiga diharapkan dapat memberi manfaat berupa peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil kemitraan dengan pihak ketiga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Keuangan Daerah

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Kerjasama Pemanfaat BMD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Aset Tidak Berwujud

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Aset tidak berwujud biasanya berupa *software*, program, atau aplikasi. Semakin banyak aset lainnya menunjukkan semakin baik digitalisasi suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Output SIMASET
Berwujud
Jumlah
Rp
Ya



Aset Lain-Lain

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aset lain-lain adalah aset yang tidak termasuk kategori tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tidak berwujud.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Aset lain-lain umumnya berupa aset rusak berat. Semakin kecil aset lain-lain menunjukkan semakin sedikit aset yang sudah tidak bisa dioperasionalkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Neraca Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Output SIMASET Aset Lain- Lain
Jumlah
Rp
Ya



Kewajiban Jangka Pendek

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin sedikit kewajiban jangka pendek semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Lampiran APBD/ APBD Perubahan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin kecil utang pihak ketiga semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rincian SP2D

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Bunga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin kecil utang bunga semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Metode/Rumus Penghitungan | LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin kecil bagian lancar utang jangka panjang semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pendapatan Diterima Dimuka

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar pendapatan diterima dimuka semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Belanja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Utang belanja adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar utang belanja semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Jangka Pendek Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Utang jangka pendek lainnya adalah pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut seperti utang transfer, utang kepada pegawai, dll.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin kecil utang jangka pendek lainnya semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kewajiban Jangka Panjang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 12 bulan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin kecil kewajiban jangka panjang semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Utang Dalam Negeri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Utang dalam negeri adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Bentuk utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh oleh pemerintah daerah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin kecil utang dalam negeri semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Metode/Rumus Penghitungan | LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rp |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Utang Jangka Panjang Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Utang jangka panjang lainnya adalah utang hipotek

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin kecil utang jangka panjang lainnya semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ekuitas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ekuitas adalah kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi liabilitas (kewajiban)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar ekuitas semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar ekuitas Saldo Anggaran Lebih semakin leluasa pemerintah daerah membiayai pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah nilai ekuitas yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar ekuitas untuk dikonsolidasikan semakin leluasa pemerintah daerah menutup pengeluaran pemerintah daerah dalam tahun anggaran dimaksud

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Lancar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio lancar adalah rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar rasio lancar semakin baik kemampuan daerah menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum



Rasio Quick

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio *quick* adalah rasio yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset pemerintah daerah yang paling likuid.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin besar rasio *quick* semakin baik kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban lancar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus

$$\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Penghitungan

Persentase

Ukuran

%

Satuan

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio total hutang terhadap total aset adalah rasio nilai hutang terhadap total aset. Semakin tinggi persentase maka kegiatan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap pengelolaan aset.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio utang terhadap total aset, semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan, namun juga semakin perlu kehati-hatian dalam pengelolaan utang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Hutang Terhadap Modal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio hutang terhadap modal adalah rasio nilai hutang terhadap modal dimana akan menghitung posisi keuangan suatu pemerintah daerah semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah utang atau kewajiban pemerintah daerah untuk melunasi hutang yang harus dibayar baik dalam jangka pendek.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio utang terhadap modal, semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan, namun juga semakin perlu kehati-hatian dalam pengelolaan utang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kewajiban dan Ekuitas Keuangan
Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pendapatan Asli Daerah (PAD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Proporsi Pendapatan Daerah

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMPATDA

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Dana Perimbangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Proporsi Pendapatan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

APBD Tahun Anggaran Berjalan
Jumlah
%



Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan Proporsi Pendapatan Daerah
Periodikasi Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Output SIMPATDA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pendapatan Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah pendapatan daerah adalah penjumlahan PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Proporsi Pendapatan Daerah
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil Penjumlahan PAD + Dana Perimbangan + Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah

Ukuran

Jumlah

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Target

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Target adalah target yang menjadi potensi pendapatan daerah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi target pendapatan daerah semakin besar potensi penerimaan pendapatan daerah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas
Aset yang Menjadi Pendapatan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Lampiran APBD Perubahan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Realisasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Realisasi adalah ketercapaian pemerintah daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Seberapa banyak pendapatan yang telah berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas
Aset yang Menjadi Pendapatan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMPATDA

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Realisasi PAD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Realisasi PAD adalah ketercapaian pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan di lingkup daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jika realisasi PAD meningkat, hal ini dapat mengindikasikan potensi ekonomi yang baik di daerah tersebut. Peningkatan PAD menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di daerah tersebut meningkat. Ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan sektor usaha, investasi yang kuat, peningkatan pendapatan masyarakat, atau peningkatan aktivitas perdagangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Aset yang Menjadi Pendapatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Output SIMPATDA

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Target PAD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Target PAD adalah target pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Target PAD mencerminkan pendapatan yang diharapkan dari sumber-sumber pendapatan tertentu, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan aset daerah, dan sumber-sumber lainnya. Interpretasi target PAD dapat melibatkan analisis rinci mengenai potensi pendapatan dari masing-masing sumber dan upaya untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan dari sumber-sumber tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas
Aset yang Menjadi Pendapatan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Akumulasi Target Pendapatan dari
OPD terkait

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Kenaikan PAD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase kenaikan PAD adalah perbandingan antara nilai PAD tahun sekarang dengan PAD tahun lalu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase kenaikan PAD, semakin baik tata kelola PAD, semakin baik indeks kemandirian fiskal daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Atas Aset yang Menjadi Pendapatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{R_N - R_{N-1}}{R_{N-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

R_N = Realisasi PAD Tahun n

R_{N-1} = Realisasi PAD Tahun n-1

Persentase

%

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Status opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dengan tujuan untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Bakeuda Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Semakin banyak Capaian Opini WTP dari BPK RI, semakin tertib pengelolaan keuangan Daerah. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Status Opini BPK dan Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Opini BPK |
| Ukuran | WTP (Paling Baik), WDP, Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat (Paling Jelek) |
| Satuan | level |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Jumlah total dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran adalah dokumen penganggaran yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">● Perda APBD dan Penjabarannya,● Perda APBD Perubahan dan Penjabarannya Dokumen pertanggungjawaban anggaran yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">● Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Bakeuda Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan Jumlah Perda APBD, Perda APBD-P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Perbup Penjawaban APBD, serta Perbup Penjabaran APBD-P yang ditetapkan |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Status Opini BPK dan Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Dokumen APBD dan LKPD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu adalah indikatornya di PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 106: Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun,

Pasal 179: Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

LKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekda paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Bakeuda

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Semakin banyak jumlah dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu, semakin tertib pengelolaan keuangan daerah



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Status Opini BPK dan Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Dokumen APBD dan LKPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu adalah persentase jumlah dokumen yang diberikan secara tepat waktu dibanding dengan dokumen penganggaran yang diminta semakin tinggi persentase maka tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu, semakin tertib pengelolaan keuangan Daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Status Opini BPK dan Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JTW}{JT} \times 100\%$$

Keterangan:

JTW = Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen



Pertanggungjawaban Anggaran yang
Ditetapkan Tepat Waktu

JT = Jumlah Total Dokumen
Penganggaran dan Dokumen
Pertanggungjawaban Anggaran

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Ya

Persentase
%
Diakses Umum



Jumlah Wajib Pajak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah wajib pajak adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah wajib pajak yang lebih banyak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan jumlah pekerjaan, dan pertumbuhan sektor usaha. Ini bisa menjadi indikator positif karena lebih banyak orang pribadi atau badan usaha yang memiliki kegiatan yang menimbulkan kewajiban perpajakan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

WP PBB - P2

Ukuran

Jumlah

Satuan

WP

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pajak Bumi Bangunan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PBB adalah potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jika jumlah PBB meningkat, hal ini dapat menunjukkan pertumbuhan sektor properti di Kabupaten Purbalingga. Jumlah PBB yang lebih tinggi dapat mengindikasikan peningkatan nilai dan jumlah bangunan yang ada. Hal ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, investasi dalam sektor properti, atau peningkatan pembangunan perumahan dan komersial.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai Pokok Ketetapan PBB yang ditetapkan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah PBB yang terbayar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PBB yang terbayar adalah realisasi nilai PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak

Unit Penyelenggara

Bakeuda

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang

Pemerintahan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah PBB yang dibayar, ini dapat menunjukkan pertumbuhan sektor properti di suatu wilayah. Semakin banyak jumlah PBB yang dibayar dapat mengindikasikan peningkatan nilai jual objek pajak serta jumlah bangunan yang ada. Hal ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, investasi dalam sektor properti, atau peningkatan pembangunan perumahan dan komersial. Juga menunjukkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Percentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai rupiah PBB yang telah disetor

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak adalah perbandingan jumlah PBB terbayar dengan jumlah PBB.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Bakeuda
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Semakin tinggi Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak mengindikasikan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan efektifitas sistem perpajakan dan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus

$$\frac{\text{Jumlah PBB yang terbayar}}{\text{Jumlah ketetapan PBB}} \times 100\%$$

Penghitungan

Persentase

Ukuran

%

Satuan

Ya

Apakah Indikator Dapat

Diakses Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kualifikasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kualifikasi adalah data pendidikan formal terakhir PNS Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi

Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS dengan nilai

1. mendapat nilai 1% jika pendidikan Dibawah SLTA
2. mendapat nilai 5 % jika pendidikan D-I, D-II, SLTA, atau sederajat
3. mendapat nilai 10 % jika pendidikan D-III
4. mendapat nilai 15 % jika pendidikan S1
5. mendapat nilai 20 % jika pendidikan S2
6. mendapat nilai 25 % jika pendidikan S3



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN)

Ukuran

nilai

Satuan

angka

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

tidak



Kompetensi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Kompetensi adalah data pengembangan kompetensi PNS Kabupaten Purbalingga |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | BKPSDM Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan dengan kategori <ol style="list-style-type: none">1. Diklat kepemimpinan2. Diklat Fungsional3. Diklat teknis4. Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ sejenisnya |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN) |
| Ukuran | nilai |
| Satuan | angka |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | tidak |



Kinerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator

Interpretasi

Kinerja adalah data hasil penilaian kinerja PNS Kabupaten Purbalingga BKPSDM

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. mencakup hal:

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
2. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN)

Ukuran

nilai

Satuan

angka

Apakah Indikator Dapat

tidak

Diakses Umum



Disiplin

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator

Interpretasi

Disiplin adalah data hukuman disiplin PNS Kabupaten Purbalingga BKPSDM

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS dengan nilai diantaranya

1. nilai 5 jika tidak terkena hukuman disiplin
2. nilai 3 jika terkena hukuman disiplin ringan
3. nilai 2 jika terkena hukuman sedang
4. nilai 1 jika terkena hukuman berat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN)

Ukuran

nilai

Satuan

angka

Apakah Indikator Dapat

tidak

Diakses Umum



Indeks Profesionalitas ASN

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Kategori masuk dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN dengan

1. 91 - 100 masuk kategori Sangat Tinggi
2. 81 - 90 masuk kategori Tinggi
3. 71 - 80 masuk kategori Sedang
4. 61 - 70 masuk kategori Rendah
5. dibawah 60 masuk kategori Sangat Rendah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN



(SAPK BKN)

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat tidak
Diakses Umum

Indeks
angka



Predikat Indeks Profesionalitas ASN

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Interpretasi

Predikat Indeks Profesionalitas ASN adalah predikat/ sebutan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Kategori masuk dalam penilaian
Indeks Profesionalitas ASN dengan

1. 91 - 100 masuk kategori Sangat Tinggi
2. 81 - 90 masuk kategori Tinggi
3. 71 - 80 masuk kategori Sedang
4. 61 - 70 masuk kategori Rendah
5. dibawah 60 masuk kategori Sangat Rendah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN (SAPK BKN)

Predikat



Satuan
Apakah Indikator Dapat Tanpa satuan
Diakses Umum tidak



Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Merit ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Sistem merit dalam manajemen ASN dengan tanpa diskriminasi artinya bahwa tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Release dari KASN melalui Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit)

Ukuran

Indeks

Satuan

angka

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

tidak



Predikat Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Predikat indeks penerapan sistem merit ASN adalah predikat/sebutan dalam penilaian Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

1. kategori I nilai 100-174 indeks 0,20-0,4 sebutan buruk
2. kategori II nilai 175-249 indeks 0,41-0,6 sebutan kurang
3. kategori III nilai 250-324 indeks 0,61-0,8 sebutan baik
4. kategori IV nilai 325-400 indeks 0,81-1,0 kategori sangat baik

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi dan Indeks Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Release dari KASN melalui Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit)

Ukuran

Predikat

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

tidak

Umum



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional di Wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunjukkan jumlah seluruh ASN di wilayah pemerintah Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Pegawai Kontrak (PTT)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pegawai Kontrak (PTT) adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian. Pegawai PTT diangk

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PTT menunjukkan jumlah pegawai kontrak yang diangkat berdasarkan SK Bupati pada setiap OPD di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Berdasarkan SK Bupati
Jumlah

Ukuran

orang

Satuan

ya

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum



Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga Harian Lepas (THL) adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah/Bagian di wilayah pemerintah Kabupaten Purbalingga yang honornya dibayar dengan APBD Tingkat Kabupaten/Kota pada masing-masing OPD/Bagian

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah THL menunjukkan jumlah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah/Bagian yang honornya dibayar dengan APBD Tingkat Kabupaten/Kota pada masing-masing OPD/Bagian

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) SK Bupati

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru Tidak Tetap (GTT) SK Bupati adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah negeri di Wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga BKPSDM

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

GTT SK Bupati merupakan seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah negeri yang ditetapkan dengan SK bupati

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) Belum SK Bupati

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru Tidak Tetap (GTT) belum SK Bupati adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah Negeri di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

GTT belum SK Bupati merupakan seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan sebagai guru oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas sebagai guru pengganti pada sekolah negeri yang ditetapkan dengan SK selain SK Bupati

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PTO (Petugas Teknis Operasional)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PTO (Petugas Teknis Operasional) adalah aparat pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat terdiri atas THL dan PTT

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Pengadaan PTO merupakan respon keterbatasan tenaga Satpol PP yang berstatus PNS, penugasan utamanya pelaksanaan kegiatan penegakkan perda, PAM obyek vital (rumah dinas) maupun penugasan lainnya

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah P3K

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

P3K merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin adalah jumlah PNS Kabupaten Purbalingga yang terdaftar di kabupaten dibagi dengan jenis kelamin

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Laki-Laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah pns laki-laki adalah jumlah PNS laki-laki yang terdaftar di Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Seluruh PNS di Pemerintah
Kabupaten Purbalingga yang
berjenis kelamin laki-laki

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PNS perempuan adalah jumlah PNS perempuan yang terdaftar di Kabupaten Purbalingga BKPSDM

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Seluruh PNS di Pemerintah
Kabupaten Purbalingga yang
berjenis kelamin perempuan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PNS berdasarkan pendidikan adalah jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga yang dibagi berdasarkan pendidikan terakhir

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS yang diklasifikasikan sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah ini menunjukkan distribusi atau perbandingan jumlah PNS yang memiliki berbagai tingkat pendidikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Tamat SD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat SD adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SD.

Perlu diingat bahwa memiliki PNS dengan tingkat pendidikan rendah bukanlah hal yang negatif jika mereka mengisi peran dan tanggung jawab mereka dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang memadai. Namun, untuk beberapa posisi tertentu, kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi mungkin penting untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks, kebijakan, dan alasan di balik distribusi PNS berdasarkan tingkat pendidikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum berdasarkan e-kepegawaian
Jumlah
orang
ya



Jumlah PNS Tamat SMP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat SMP adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SMP BKPSDM

Unit Penyelenggara

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Kelompok Indikator

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SMP.

Interpretasi

Peningkatan PNS dengan latar belakang pendidikan SMP dapat mengindikasikan adanya penyesuaian kualifikasi pekerjaan atau perubahan tugas tertentu yang tidak memerlukan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa peran administratif atau dukungan teknis mungkin dapat diisi oleh PNS dengan pendidikan SMP, sementara pekerjaan yang lebih teknis atau kualifikasi khusus membutuhkan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Tamat SMA/SMK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat SMA/SMK adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SMA/SMK BKPSDM

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir SMA/SMK.

Kenaikan jumlah PNS dengan pendidikan terakhir SMA/SMK juga bisa mencerminkan tingkat persaingan yang lebih rendah untuk posisi tertentu dalam pelayanan publik dibandingkan dengan posisi yang memerlukan latar belakang pendidikan lebih tinggi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Tamat D1

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat D1 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D1

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D1

Peningkatan jumlah PNS dengan pendidikan D1 juga bisa mencerminkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan teknis tertentu yang dapat diperoleh melalui program diploma. Kabupaten mungkin memiliki permintaan khusus untuk lulusan D1 dalam bidang-bidang tertentu yang relevan dengan pekerjaan di sektor publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Tamat D2

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat D2 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D2

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D2

PNS dengan pendidikan terakhir D2 biasanya memiliki keterampilan teknis dan pengetahuan yang lebih khusus dibandingkan dengan lulusan SMA/SMK. Jika jumlah PNS dengan pendidikan D2 meningkat, ini dapat menunjukkan upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pelayanan publik dengan merekrut individu yang memiliki kompetensi lebih tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Periodesasi

di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Tamat D3

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat D3 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D3

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D3

Beberapa posisi di pemerintah daerah mungkin memerlukan latar belakang pendidikan D3 sebagai syarat kualifikasi pekerjaan. Jika ada peningkatan jumlah PNS dengan D3, hal ini bisa mencerminkan kebutuhan akan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

berdasarkan e-kepegawaian
Jumlah
orang
ya



Jumlah PNS Tamat D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat D4 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D4

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir D4

Jumlah PNS dengan D4 juga dapat meningkat jika ada permintaan khusus untuk jabatan-jabatan tertentu yang memerlukan latar belakang pendidikan D4 sebagai persyaratannya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Periodesasi

di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Tamat S1

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat S1 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S1

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S1

Jika banyak posisi PNS di kabupaten tersebut membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang hanya dapat diperoleh dari lulusan sarjana, maka peningkatan jumlah PNS berpendidikan S1 dapat dianggap sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Periodesasi

di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

berdasarkan e-kepegawaian
Jumlah
orang
ya



Jumlah PNS Tamat S2

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat S2 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S2

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S2

Tingkat pendidikan S2 sering kali berhubungan dengan bidang spesialisasi dan keahlian tertentu. Jika banyak PNS dengan S2, ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus pada perekrutan tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu, seperti manajemen publik, kebijakan, atau bidang teknis lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Tamat S3

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS tamat S3 adalah PNS Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S3

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan pendidikan terakhir S3.

Semakin banyak PNS dengan latar belakang pendidikan S3 bisa menunjukkan fokus yang lebih besar pada penelitian, inovasi, dan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan di kabupaten tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Periodesasi

di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan adalah Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga yang dibagi berdasarkan tingkat atau kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaiannya sebagai dasar untuk penggajian. Kenaikan pangkat seorang PNS merupakan sebuah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdiannya kepada negara. Kenaikan pangkat ada dua jenis, yaitu reguler dan kenaikan pangkat pilihan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah ASN yang dibagi berdasarkan tingkat atau kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaiannya sebagai dasar untuk penggajian. Kenaikan pangkat seorang PNS merupakan sebuah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdiannya kepada negara. Kenaikan pangkat ada dua jenis, yaitu reguler dan kenaikan pangkat pilihan



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Periodikasi

di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Pegawai Golongan I

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS gol I adalah Golongan I atau disebut sebagai pangkat 'Juru' merupakan golongan terendah, yang terdiri dari PNS golongan Ia, Ib, Ic, dan Id.

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Banyaknya ASN golongan I di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Penting untuk diingat bahwa interpretasi yang lebih akurat memerlukan data yang lebih lengkap dan pemahaman konteks yang lebih baik tentang kebijakan, kondisi ekonomi, dan strategi perekruitmen tenaga kerja di pemerintah daerah tersebut. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kualitas dan efisiensi dalam penerimaan PNS serta dampaknya terhadap kualitas layanan publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Pegawai Golongan II

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS gol II adalah Golongan II atau pangkat 'Pengatur' terdiri dari golongan IIa, IIb, IIc, dan IID

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Banyaknya ASN golongan II di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penting untuk dicatat bahwa peningkatan jumlah PNS di golongan II bukanlah sesuatu yang negatif, namun interpretasi yang akurat memerlukan pemahaman tentang kebijakan pemerintah daerah, kebutuhan layanan publik, perubahan struktur organisasi, dan keadaan tenaga kerja di wilayah tersebut. Pemerintah daerah harus terus memastikan bahwa rekrutmen dan pengelolaan pegawai berlangsung secara transparan, efisien, dan berfokus pada meningkatkan kualitas layanan publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum berdasarkan e-kepegawaian
Jumlah
orang
ya



Jumlah Pegawai Golongan III

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS gol III adalah Golongan III atau pangkat 'Penata' terdiri dari golongan IIIa, IIIb, IIIc, dan IIId BKPSDM

Unit Penyelenggara

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Kelompok Indikator

Interpretasi

Banyaknya ASN golongan III di Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Penting untuk diingat bahwa interpretasi data tentang jumlah PNS golongan III perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan melibatkan informasi tambahan seperti kebijakan pemerintah daerah, situasi ekonomi, dan strategi pengelolaan sumber daya manusia. Jumlah PNS golongan III yang meningkat dapat memberikan petunjuk tentang dinamika pemerintah daerah, tetapi analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Pegawai Golongan IV

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS gol IV adalah Golongan IV atau disebut juga dengan pangkat 'Pembina' terdiri dari IVa, IVb, IVc, IVd, dan IVe.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Banyaknya ASN golongan IV di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Interpretasi yang akurat memerlukan analisis lebih lanjut tentang konteks dan kebijakan yang ada di kabupaten tersebut. Dalam menginterpretasikan data, perlu diingat bahwa distribusi golongan PNS harus dilihat bersama-sama dengan kebutuhan, tujuan, dan strategi pengelolaan sumber daya manusia di kabupaten tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PNS berdasarkan jabatan adalah jumlah PNS berdasarkan jabatan sesuai dengan SK Bupati Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS berdasarkan jabatan sesuai dengan SK Bupati

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Fungsional Tertentu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya dida

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan fungsional tertentu.

Jumlah PNS yang meningkat dalam fungsional tertentu dapat mencerminkan fokus pemerintah atau instansi terkait pada pengembangan keahlian khusus dalam bidang tersebut. Ini bisa disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan atau permintaan untuk layanan atau keterampilan tertentu dalam sektor atau wilayah tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum berdasarkan e-kepegawaian
Jumlah
orang
ya



Jumlah Fungsional Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan fungsional umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Periodesasi

di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah Eselon V

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Eselon V adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kelima atau terendah. Golongan pangkat eselon V terbagi menjadi golongan tertinggi III/b dan golongan terendah III/a.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

PNS dengan jabatan Eselon V tidak ada di Pemkab Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Eselon IV

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Eselon IV adalah jabatan struktural atau eselon tingkat keempat. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IVA dan eselon IVB, dengan golongan tertinggi III/d dan golongan terendah III/b.

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan eselon IV

Peningkatan jumlah pejabat Eselon IV juga bisa terkait dengan penyesuaian struktur organisasi untuk menghadapi perubahan tuntutan atau prioritas pemerintah. Peningkatan jumlah pejabat di tingkat manajerial ini dapat mencerminkan adanya peningkatan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi pemerintahan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Eselon III

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Eselon III adalah jabatan struktural atau eselon tingkat ketiga. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IIIA dan eselon IIIB, dengan golongan tertinggi IV/b dan golongan terendah III/d.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan eselon III

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi yang akurat memerlukan analisis lebih lanjut tentang konteks, kebijakan pemerintah, dan tujuan di balik peningkatan jumlah pejabat Eselon III. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan jumlah pejabat Eselon III mendukung efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Eselon II

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua. Jenjang pangkat eselon II ada 2 yaitu eselon IIA dan eselon IIB, dengan golongan tertinggi IV/d dan golongan terendah IV/b.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan eselon II.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi yang akurat memerlukan analisis lebih lanjut tentang konteks, kebijakan pemerintah, dan tujuan di balik peningkatan jumlah pejabat Eselon II. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan jumlah pejabat Eselon II mendukung efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Eselon I

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Eselon I adalah jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat Eselon 1 ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB, dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dengan jabatan eselon I

Jumlah pejabat Eselon I yang meningkat juga bisa disebabkan oleh kebutuhan khusus di berbagai sektor atau bidang pemerintahan. Beberapa posisi di tingkat Eselon I mungkin membutuhkan keahlian khusus atau pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS Pensiun

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PNS pensiun adalah jumlah PNS Kabupaten Purbalingga yang telah mengajukan pengunduran diri dari ASN yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Dengan mengetahui jumlah PNS yang akan pensiun dalam periode tertentu, pemerintah atau organisasi dapat merencanakan penggantian pegawai yang pensiun dengan merekrut atau melatih pegawai baru. Interpretasi jumlah PNS pensiun dapat memberikan informasi tentang kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan tenaga kerja dan suksesi kepemimpinan di sektor publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

berdasarkan e-kepegawaian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Usulan Kebutuhan CPNS

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah usulan kebutuhan adalah jumlah dan jenis jabatan ASN yang dibutuhkan pada masing-masing instansi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah dan jenis jabatan ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas instansi secara efektif dan efisien untuk jangka waktu tertentu

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

penghitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah CPNS yang Mendaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah CPNS yang mendaftar adalah angka atau data yang menunjukkan total jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mendaftar untuk mengikuti seleksi atau penerimaan sebagai PNS

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah orang yang memenuhi persyaratan dalam pendaftaran CPNS.

Perlu diingat bahwa interpretasi yang akurat memerlukan analisis lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan dinamika tenaga kerja di wilayah atau negara tertentu. Jumlah pendaftar CPNS juga perlu dibandingkan dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, serta kualitas dan kualifikasi para pendaftar untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | dari SSC ASN |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah CPNS Lulus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah CPNS lulus adalah jumlah calon CPNS yang telah memenuhi kriteria berdasarkan ujian yang diadakan oleh BKN

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah CPNS yang telah memenuhi kriteria baik persyaratan administrasi maupun berdasarkan ujian yang diadakan oleh BKN

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

dari SSC ASN

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Persentase Formasi Jabatan yang Terisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase formasi jabatan yang terisi adalah perbandingan jumlah CPNS yang lulus dengan jumlah usulan kebutuhan CPNS

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Persentase tinggi menandakan bahwa terpenuhinya kebutuhan CPNS di tingkat Kabupaten

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengadaan CPNS di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus

$$\frac{\text{Jumlah CPNS Lulus}}{\text{Jumlah usulan kebutuhan CPNS}} \times 100\%$$

Penghitungan

Persentase

Ukuran

%

Satuan

Apakah Indikator Dapat ya

Diakses Umum



Jumlah PNS yang Melaksanakan Pendidikan Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan pendidikan dokter spesialis adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar profesi dokter spesialis

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Tugas belajar diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi atau setara pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dipersyarikatan bagi usia paling tinggi 43 tahun bagi tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 48 tahun bagi tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/PT, pendidikan paling rendah profesi masa kerja paling singkat 1 tahun sejak diangkat sebagai pegawai



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Jumlah PNS yang Melaksanakan
Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar
(IB) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Pendataan dilakukan saat
pengajuan permohonan TB/IB
Jumlah
orang

ya



Jumlah PNS yang Melaksanakan Pendidikan Profesi TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | PNS yang melaksanakan pendidikan profesi TB adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar profesi dokter/profesi dokter gigi/profesi apoteker/profesi lainya |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | BKPSDM Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Tugas belajar pendidikan profesi usia paling tinggi 49 tahun bagi TB yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 52 tahun bagi TB yang tidak diberhentikan dari jabatan, atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan, pendidikan paling rendah DIV /S1 dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah III b |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Melaksanakan S3 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang Melaksanakan S3 TB adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar doktor (s-3/strata 3)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Tugas belajar program gelar S-3 usia paling tinggi 43 tahun bagi TB yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 48 tahun bagi TB yang tidak diberhentikan dari jabatan, atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan, pendidikan paling rendah magister/S2 dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah penata/III c

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS yang Melaksanakan S2 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan S2 TB adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar magister (s-2/strata 2)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Tugas belajar program gelar S2 usia paling tinggi 49 tahun bagi TB yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 52 tahun bagi TB yang tidak diberhentikan dari jabatan, atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan, pendidikan paling rendah D-IV/S1 dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah penata Muda Tk. I/III b

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS yang Melaksanakan S1 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan S1 TB adalah PNS yang melaksanakan tugas belajar untuk program gelar S-1

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPDSM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Tugas belajar program gelar S1 usia paling tinggi 43 tahun bagi TB yang diberhentikan dari jabatan dan usia paling tinggi 48 tahun bagi TB yang tidak diberhentikan dari jabatan, atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan, pendidikan paling rendah D-IV/S1 dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah pengatur Tk. I/II d

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS yang Melaksanakan Pendidikan Profesi IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan pendidikan profesi IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan profesi dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah PNS yang Melaksanakan S3 IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan S3 IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan S3 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah PNS yang Melaksanakan S2 IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan S2 IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan S2 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah PNS yang Melaksanakan S1 IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan S1 IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan S1 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah PNS yang Melaksanakan D3 IB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan D3 IB adalah PNS yang akan mengikuti pendidikan D3 dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan pekerjaan kantor dan harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan TB/IB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan Pendidikan Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan perpanjangan Pendidikan Dokter Spesialis adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dokter spesialis sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan dokter spesialis

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan Pendidikan Profesi TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan perpanjangan Pendidikan Profesi TB adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan profesi sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan profesi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan S3 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan perpanjangan S3 TB adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan S3 sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan S3

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM

Interpretasi

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan S2 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan perpanjangan S2 TB adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan S2 sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan S2

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS yang Melaksanakan Perpanjangan S1 TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PNS yang melaksanakan perpanjangan S1 TB adalah PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan S1 sesuai dengan jangka waktu tertentu karena alasan tertentu yang sah melakukan perpanjangan jangka waktu pendidikan S1

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM

Interpretasi

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Perpanjangan diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Peralihan TB ke IB Pendidikan Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan

Interpretasi

Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah Peralihan TB ke IB Pendidikan Profesi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah Peralihan TB ke IB S3

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah Peralihan TB ke IB S2

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah Peralihan TB ke IB S1

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Apabila setelah diberikan perpanjangan 1 tahun tetapi belum bisa menyelesaikan, maka diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan status menjadi Izin Belajar |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | BKPSDM Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan dilakukan saat pengajuan permohonan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|--|
| Konsep dan Definisi | Diklat teknis adalah penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS, dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | BKPSDM Aspek Unsur Penunjang Pemerintahan |
| Interpretasi | Penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS, dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. |

■ DATA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan Periodesasi | Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
|--------------------------------------|--|

■ METODOLOGI

| | |
|--|---------------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Data tahunan Jumlah orang ya |
|--|---------------------------------------|



Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Diklat fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing, ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Bentuk diklat yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan atau keterampilan bagi para PNS yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Diklat kepemimpinan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Unit Penyelenggara

BKPSDM

Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

terdiri dari Diklatpim untuk jabatan struktural eselon I-IV

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pelatihan Dasar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Diklat Pelatihan Dasar adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Jumlah CPNS yang telah mengikuti diklat pelatihan dasar yang dibuktikan dengan Surat kelulusan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah Mutasi Masuk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Mutasi masuk adalah perpindahan PNS yang masuk ke instansi Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BKPSDM
Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Perpindahan PNS yang masuk ke instansi Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga.

Penambahan jumlah mutasi masuk ke suatu pemerintah daerah dapat memiliki beberapa kemungkinan interpretasi, tetapi perlu diperhatikan bahwa interpretasi ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan spesifik untuk masing-masing pemerintah daerah antara lain: Rotasi Personil, Penguatan Kompetensi, Penyesuaian Struktur Organisasi, Respon terhadap Kekurangan Tenaga, Kebijakan Pemerintah Pusat, Peningkatan Mobilitas Pegawai

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Mutasi PNS di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data tahunan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah Mutasi Keluar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Mutasi keluar adalah perpindahan PNS yang keluar dari instansi Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga BKPSDM

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Unsur Penunjang
Pemerintahan

Interpretasi

Perpindahan PNS yang keluar dari instansi Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga.

Semakin banyak jumlah mutasi keluar dari suatu pemerintah daerah (mutasi keluar) bisa menunjukkan beberapa kemungkinan interpretasi, namun perlu diingat bahwa interpretasi ini perlu dipertimbangkan dengan konteks dan informasi lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang tepat antara lain: Mobilitas Karir, Rotasi Kepemimpinan atau Kebijakan Pemerintah, Ketersediaan Kesempatan Kerja di Daerah Lain, Kebutuhan Khusus di Pemerintah Daerah Lain serta Faktor Pribadi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Mutasi PNS di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Unjuk Rasa Kelompok Masa Guru

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa kelompok masa guru adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut sistem pendidikan maupun pengelolaan tenaga kependidikan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jika jumlah unjuk rasa kelompok masa guru meningkat, maka dapat mengindikasikan tingkat ketidakpuasan atau keprihatinan yang lebih besar di kalangan guru-guru terhadap isu-isu yang mereka hadapi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Kali
ya



Unjuk Rasa Kelompok Masa Mahasiswa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa kelompok masa mahasiswa adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, permasalahan sosial, politik, dan ekonomi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah unjuk rasa yang tinggi dapat mengindikasikan tingkat ketidakpuasan atau keprihatinan yang tinggi di kalangan mahasiswa terhadap situasi atau kebijakan tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Kali
ya



Unjuk Rasa Kelompok Masa Buruh

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk Rasa Kelompok Masa Buruh adalah Penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh buruh/serikat buruh terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut sistem ketenagakerjaan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jika jumlah unjuk rasa kelompok masa buruh meningkat, maka dapat mengindikasikan tingkat ketidakpuasan atau ketidakpuasan yang tinggi di kalangan buruh terhadap kondisi kerja, gaji, hak pekerja, kebijakan ketenagakerjaan, atau isu-isu lain yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Unjuk Rasa Kelompok Masa Masyarakat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa kelompok masa masyarakat adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan terkait permasalahan ekonomi, sosial, budaya, penyimpangan perilaku warga masyarakat, perangkat pemerintahan, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jika jumlah unjuk rasa kelompok masa masyarakat meningkat, maka dapat mencerminkan tingkat ketidakpuasan atau keprihatinan yang tinggi di kalangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Unjuk Rasa Kelompok Masa Warga Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa kelompok masa warga desa adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat desa terkait permasalahan ekonomi, sosial, budaya, penyimpangan perilaku warga masyarakat, perangkat pemerintahan, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah desa.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jika jumlah unjuk rasa kelompok masa warga desa meningkat, maka dapat mencerminkan tingkat ketidakpuasan atau keprihatinan yang tinggi di kalangan warga desa terhadap isu-isu yang mereka hadapi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Unjuk Rasa Kelompok Masa Ormas (Organisasi Masyarakat)/ Parpol (Partai Politik)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa kelompok masa Ormas (Organisasi Masyarakat)/ Parpol (Partai Politik) adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh ormas/ parpol terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, permasalahan sosial, politik, dan ekonomi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah unjuk rasa yang tinggi dari masa ormas atau parpol dapat menunjukkan eskalasi konflik atau ketegangan dalam konteks politik atau sosial tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Unjuk Rasa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang, kelompok, atau organisasi untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Jumlah unjuk rasa merujuk pada unjuk rasa yang dilakukan oleh Guru, Mahasiswa, Buruh, Masyarakat, Warga Desa, Ormas/Parpol.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jika jumlah unjuk rasa meningkat, maka dapat menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan atau tuntutan yang dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, tindakan sosial, atau isu tertentu yang mempengaruhi kehidupan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlahan unjuk rasa yang dilakukan oleh Guru, Mahasiswa, Buruh, Masyarakat, Warga Desa, Ormas/Parpol

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Ideologi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa berdasarkan tuntutan ideologi adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, parpol, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan berkaitan dengan ideologi Pancasila.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan ideologi dapat mencerminkan ketegangan politik di masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga

Perodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Kali
ya



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Politik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa berdasarkan tuntutan politik adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, parpol, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang politik dalam negeri.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan politik dapat mencerminkan ketegangan politik di masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga

Perodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Kali
ya



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Ekonomi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa berdasarkan tuntutan ekonomi adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, parpol, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang perekonomian, seperti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, kelangkaan minyak goreng, dsb.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jika terdapat banyak unjuk rasa dengan tuntutan ekonomi, maka dapat menunjukkan adanya masalah atau ketidakadilan dalam sistem ekonomi yang dialami oleh masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Kali
ya



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Sosial Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa berdasarkan tuntutan sosial budaya adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, penggiat seni, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang sosial budaya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan sosial budaya dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan sosial dan budaya yang ada.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Hukum dan Hak Asasi Manusia

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa berdasarkan tuntutan hukum dan Hak Asasi Manusia adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, buruh/ serikat buruh, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang hukum dan HAM.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan hukum dan hak asasi manusia dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan hak-hak asasi manusia yang terjadi dalam masyarakat atau oleh pihak berwenang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Pendidikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa berdasarkan tuntutan pendidikan adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang pendidikan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan pendidikan dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi pendidikan yang ada, termasuk masalah akses, mutu, dan kesenjangan dalam pendidikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Kali
ya



Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan Kesehatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unjuk rasa berdasarkan tuntutan kesehatan adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok warga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, dan elemen masyarakat lainnya dengan materi tuntutan dalam bidang kesehatan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Tingginya jumlah unjuk rasa berdasarkan tuntutan kesehatan dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang ada.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Kali
ya



Potensi Konflik yang Dilaporkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Potensi konflik yang dilaporkan adalah potensi konflik yang dilaporkan dari masyarakat ke Kesbangpol atau APH (Aparat Penegak Hukum).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Tingginya jumlah potensi konflik yang dilaporkan dapat mengindikasikan adanya ketegangan atau ketidakstabilan dalam wilayah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Data tahunan
Jumlah
potensi
ya



Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik adalah potensi konflik yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat, mediasi oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun APH, dan audensi dengan pihak-pihak terkait, sehingga tidak berkembang menjadi konflik.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Tingginya jumlah potensi konflik yang diredam mencerminkan efektivitas dari upaya pencegahan dan penanganan dini untuk mengatasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih kompleks.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

laporan

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Persentase Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik adalah perbandingan antara jumlah potensi konflik yang dilaporkan dengan Jumlah potensi konflik.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

Interpretasi

Tingginya persentase potensi konflik yang diredam mencerminkan efektivitas dari upaya pencegahan dan tindakan penanganan dini dalam mencegah eskalasi konflik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Potensi Konflik di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPKD}{JPK} \times 100\%$$

Keterangan:

JPKD = Jumlah Potensi Konflik
yang diredam tidak menjadi
konflik

JPK = Jumlah Potensi Konflik



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Percentase
%
ya



Jumlah Konflik Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah konflik sosial dapat memberikan gambaran tentang kondisi sosial dalam suatu wilayah. Jika jumlah konflik sosial meningkat, maka dapat mengindikasikan adanya tingkat ketegangan sosial yang lebih tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

konflik

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Angka Konflik Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka konflik sosial adalah angka konflik ipoleksosbud (Jumlah kejadian konflik sosial yang terlaporkan) per 10.000 penduduk Kabupaten Purbalingga.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

Interpretasi

Angka konflik sosial mencerminkan tingkat ketegangan dan konflik yang ada dalam masyarakat. Semakin tinggi angka konflik sosial, semakin tinggi tingkat ketegangan dan potensi terjadinya konflik lebih lanjut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Potensi Konflik di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKS}{JP} \times 10.000$$

Keterangan:

JKS = Jumlah konflik sosial

JP = Jumlah Penduduk

Ukuran

Angka

Satuan

per 10.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih dalam Pemilu (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota) adalah Warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih mencerminkan potensi partisipasi politik dalam proses demokrasi. Semakin besar jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, semakin besar pula potensi partisipasi dalam pemilihan umum.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Pemilu di Kabupaten Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Data DPT (Daftar Pemilih Tetap)
yang dikeluarkan oleh
penyelenggara pemilu
(KPU/Komisi Pemilihan Umum)

Jumlah

Orang

ya



Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu adalah Warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan berlaku, dan secara aktif menggunakan hak suara mereka untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

Interpretasi

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Semakin tinggi jumlah pemilih yang aktif, semakin tinggi tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodikasi

Pemilu di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara pada pemilu

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota) adalah perbandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dapat mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin tinggi tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pemilihan umum. |

■ DATA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan Periodikasi | Pemilu di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
|-----------------------------------|---|

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{DKPT}{DPT} \times 100\%$$

Keterangan:

DKPT = Data kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara pada pemilu



DPT = Data Pemilih Tetap (DPT)

Pemilu

Persentase

%

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki SK Kemenkumham dan Surat Tanda Keberadaan Ormas dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta terverifikasi aktif di Kabupaten Purbalingga. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Interpretasi | Tingginya jumlah LSM mencerminkan tingkat aktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai isu sosial dan lingkungan. Semakin banyak LSM, semakin banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu dan memperjuangkan hak-hak mereka. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah LSM Lokal Terdaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

LSM Lokal Terdaftar adalah LSM yang memiliki kepengurusan lingkup kabupaten/kota dan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan dan telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kesbangpol, sehingga memiliki Surat Tanda Bukti Keberadaan Ormas

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah LSM lokal terdaftar dapat mencerminkan kualitas pengelolaan dan pengorganisasian LSM. Semakin banyak jumlah LSM terdaftar menunjukkan adanya upaya dari LSM dalam memenuhi persyaratan pendaftaran dan beroperasi secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah LSM Lokal Tidak Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

LSM Lokal Tidak Aktif adalah LSM yang memiliki kepengurusan lingkup kabupaten/kota dan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan, telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kesbangpol, namun kemudian tidak melaporkan adanya kepengurusan dan aktivitas di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jika banyak LSM lokal yang tidak aktif, maka dapat menjadi indikator bahwa banyak LSM menghadapi tantangan dalam beroperasi dan berkelanjutan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

LSM

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah LSM Nasional Terdaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

LSM Nasional Terdaftar adalah LSM yang memiliki memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia, berbadan hukum, dan telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kesbangpol, sehingga memiliki Surat Tanda Bukti Keberadaan Ormas.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah LSM nasional terdaftar dapat mencerminkan kualitas pengelolaan dan pengorganisasian LSM. Semakin banyak jumlah LSM terdaftar menunjukkan adanya upaya dari LSM dalam memenuhi persyaratan pendaftaran dan beroperasi secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | ya |



Jumlah LSM Nasional Tidak Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

LSM Nasional Tidak Aktif adalah LSM nasional yang tidak melaporkan kegiatan ke Kesbangpol

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

Interpretasi

Jika banyak LSM nasional yang tidak aktif, maka dapat menjadi indikator bahwa banyak LSM menghadapi tantangan dalam beroperasi dan berkelanjutan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
LSM
ya



Jumlah LSM Asing / Internasional Terdaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

LSM Asing / Internasional Terdaftar adalah LSM asing/internasional yang terdaftar oleh Kesbangpol. LSM asing/internasional adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang cakupannya internasional atau mendunia, yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

Interpretasi

Jumlah LSM asing/internasional terdaftar dapat mencerminkan kualitas pengelolaan dan pengorganisasian LSM. Semakin banyak jumlah LSM terdaftar menunjukkan adanya upaya dari LSM dalam memenuhi persyaratan pendaftaran dan beroperasi secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | LSM |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | ya |
| Umum | |



Jumlah LSM Asing / Internasional Tidak Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

LSM Asing / Internasional Tidak Aktif adalah LSM asing/internasional yang tidak melaporkan kegiatan ke Kesbangpol

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

Interpretasi

Jika banyak LSM asing/internasional yang tidak aktif, maka dapat menjadi indikator bahwa banyak LSM menghadapi tantangan dalam beroperasi dan berkelanjutan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

LSM

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah Organisasi Masyarakat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat atau kelompok masyarakat baik yang telah berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, melaporkan keberadaannya kepada Kesbangpol maupun tidak/belum melaporkan keberadaannya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah Organisasi Masyarakat yang banyak dapat mencerminkan tingkat aktivitas dan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi untuk mencapai berbagai tujuan dan kepentingan sosial.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ormas

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Ormas Berlandaskan Agama

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ormas Berlandaskan Agama adalah Organisasi masyarakat (ormas) yang terbentuk berdasarkan afiliasi agama tertentu dalam suatu daerah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah Ormas berlandaskan agama mencerminkan representasi dan keberagaman agama yang ada dalam masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Purbalingga Tahunan

Perodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ormas

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Ormas Berlandaskan Budaya / Adat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ormas Berlandaskan Budaya / Adat adalah Organisasi masyarakat yang didirikan dengan fokus pada pelestarian, promosi, dan perlindungan warisan budaya dan adat istiadat suatu komunitas atau kelompok tertentu

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Banyaknya Ormas berlandaskan budaya/adat menunjukkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Semakin banyak ormas berbasis budaya/adat menandakan adanya beragam tradisi, bahasa, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang dipelihara dan dilestarikan oleh kelompok masyarakat tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ormas

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Ormas Berlandaskan Nasionalitas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ormas Berlandaskan Nasionalitas adalah Organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan nasionalitas atau kewarganegaraan dari anggotanya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Banyaknya Ormas berlandaskan nasionalitas menunjukkan adanya keanekaragaman etnis atau kelompok masyarakat dengan latar belakang nasionalitas yang berbeda-beda dalam suatu wilayah. Semakin banyak ormas ini mencerminkan keberagaman budaya dan identitas etnis di dalam masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Ormas
ya



Jumlah Yayasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Dengan banyaknya yayasan, aktivitas sosial dan program-program bantuan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Yayasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Yayasan Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Yayasan Sosial adalah Panti sosial yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah yayasan sosial, semakin besar potensi untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan memberikan solusi bagi masalah sosial yang ada.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Peridesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Yayasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Yayasan Pendidikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Yayasan Pendidikan adalah Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun nonformal.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak yayasan pendidikan, maka semakin besar potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Yayasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Yayasan Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Yayasan Lainnya adalah Yayasan selain dari yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan Kesatuan Bangsa dan Politik Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Jumlah yayasan lainnya menunjukkan tingginya aktivitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan nirlaba yang beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga/organisasi
Kemasyarakatan di kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Yayasan
ya



Indeks Toleransi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks toleransi adalah salah satu tolak ukur kehidupan bermasyarakat yang tenram, tertib dan aman. Untuk mengukur indeks toleransi, dihitung dari rata – rata potensi konflik baik agama, gangguan dari kelompok radikal maupun sosial yang tertangani.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Indeks toleransi menggambarkan keadaan sosial dalam masyarakat terkait dengan pengelolaan konflik dan penerimaan terhadap perbedaan. Indeks ini dapat membantu memahami sejauh mana masyarakat mampu menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam menghadapi perbedaan yang ada.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Toleransi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{KA + GK + KS}{3}$$

Keterangan:

KA = Konflik agama

GA = gangguan keamanan dari
kelompok radikal

KS = konflik sosial lainnya)

Ukuran

Indeks

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Anggota Belanegara

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anggota Belanegara adalah Anggota masyarakat yang telah disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Kesatuan Bangsa dan Politik
Aspek Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah kader belanegara yang telah dibentuk dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan bela negara. Dengan meningkatnya jumlah individu atau kader belanegara yang terlatih, kapasitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman keamanan dapat ditingkatkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Aparat Keamanan dan
Ketertiban di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual berdasarkan data peserta diklat bela negara

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Indeks Risiko Bencana (IRB)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

IRB dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai yang tertera dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerah guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Release BNPB |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas suatu daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana serta kerentanan di suatu daerah tersebut kondisinya tetap

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Metode untuk mengukur kemampuan daerah atau wilayah untuk bertahan dan menghadapi tantangan yang akan timbul akibat bencana alam. Faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan suatu daerah antara lain adalah kebijakan penanggulangan bencana, infrastruktur, sistem peringatan dini, kapasitas masyarakat, ketersediaan sumber daya alam, akses terhadap layanan dasar. Nilai indikator IKD dibagi dalam tiga kelas yaitu

- Rendah ($\text{IKD} < 55$)
- Sedang ($55 \leq \text{IKD} \leq 85$) dan
- Tinggi ($\text{IKD} > 85$).

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | 7 prioritas, 71 indikator dan 284 pertanyaan |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Persentase Peningkatan IKD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Peningkatan IKD adalah besaran angka dalam persen yang menunjukkan nilai indeks ketahanan suatu daerah atau wilayah yang dihitung dari satu periode ke periode berikutnya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Persentase peningkatan yang menunjukkan perbaikan dalam kapasitas dan kemampuan suatu daerah untuk menghadapi, merespon dan memulihkan diri dari berbagai resiko yang dihadapi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus
Penghitungan

$$\frac{IKD \text{ tahun } t - IKD \text{ tahun } (t-1)}{IKD \text{ tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Ya



Jumlah Kejadian Angin topan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kejadian angin topan menggambarkan frekuensi atau jumlah angin topan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian angin topan menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Bencana Alam di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kejadian Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kejadian banjir menggambarkan frekuensi atau jumlah banjir yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian banjir menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

perhitungan manual
Jumlah
kejadian
Ya



Jumlah Kejadian Gas Beracun

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Gas beracun adalah suatu gas yang bereaksi dengan darah dan dapat menyebabkan kematian jika terhirup atau terpapar dalam konsentrasi yang cukup tinggi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kejadian gas beracun menggambarkan frekuensi atau jumlah kejadian gas beracun yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian gas beracun menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kebakaran hutan adalah situasi dimana hutan / lahan dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kejadian kebakaran menggambarkan frekuensi atau jumlah kebakaran yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian kebakaran hutan menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering terjadi kebakaran hutan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kejadian Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar (patahan) gunung api, dan runtuhannya batuan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kejadian gempa bumi menggambarkan frekuensi atau jumlah gempa bumi yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian gempa bumi menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut rawan gempabumi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kejadian Kekeringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kejadian kekeringan menggambarkan frekuensi atau jumlah kekeringan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian kekeringan menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan kekeringan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kejadian Letusan Gunung Api

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Letusan gunung api adalah proses pelepasan material dari gunung berapi berupa lava, gas, abu dan lain-lain ke atmosfer bumi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kejadian letusan gunung api menggambarkan frekuensi atau jumlah kejadian letusan gunung api yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian letusan gunung api menunjukan bahwa suatu daerah tersebut rawan terhadap dampak letusan gunung api

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kejadian Gerakan Tanah/Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Gerakan tanah/longsor adalah gerakan tanah adalah suatu gerakan menuruni lereng oleh massa tanah dan atau batuan, akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng/longsor merupakan gerakan massa batuan, tanah, atau bahan rombakan material penyusun lereng (campura BPBD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kejadian gerakan tanah/longsor menggambarkan frekuensi atau jumlah gerakan tanah/longsor yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, semakin banyak jumlah kejadian gerakan tanah/longsor menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut frekuensinya semakin sering (rawan gerakan tanah/longsor)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Bencana Alam di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah korban bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Data jumlah korban bencana dapat digunakan untuk merencanakan dan menyediakan bantuan darurat, pemulihan, dan rekonstruksi pasca-bencana. Semakin banyak Jumlah Korban Bencana maka semakin tinggi kebutuhan untuk menyediakan bantuan, mitigasi bencana, dan pemulihan pasca-bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah pelayanan korban bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pelayanan korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah korban yang tertangani dalam kejadian bencana, jika jumlah pelayanan korban bencana semakin banyak/ tinggi menunjukkan semakin tinggi respon dalam penanganan bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan pelayanan korban bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan pelayanan korban bencana adalah perbandingan jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dievakuasi dengan perkiraan jumlah seluruh korban bencana

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Persentase dari jumlah korban yang tertangani akibat bencana. Semakin tinggi persentase penanganan menunjukkan tingginya layanan kepada korban bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong, dievakuasi

J2 = jumlah perkiraan seluruh korban bencana

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Desa Tangguh Bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah desa yang sudah dibentuk DESTANA, semakin tinggi/banyak jumlah desa tangguh bencana semakin tinggi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Masyarakat Tangguh Bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat/individu yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapiancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan melaksanakan penanggulangan bencana, semakin tinggi jumlah masyarakat tangguh bencana semakin cepat dalam penanganan dampak bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sosialisasi Mitigasi Bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sosialisasi mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah kegiatan mitigasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat semakin tinggi jumlah kegiatan mitigasi bencana maka menunjukkan semakin rendah/kecil risiko yang timbul akibat bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Target lokasi sosialisasi kesiapsiagaan bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Target lokasi sosialisasi kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan sosialisasi, semakin tinggi target lokasi sosialisasi kesiapsiagaan bencana menunjukkan semakin banyak masyarakat yang nantinya mendapatkan pelatihan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

lokasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana adalah perbandingan jumlah sosialisasi kesiapsiagaan bencana dengan target pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Persentase jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana. semakin tinggi persentase menunjukan semakin tinggi kemampuan/kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah sosialisasi kesiapsiagaan bencana



J2 = Target lokasi sosialisasi
kesiapsiagaan bencana

Ukuran Percentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Jumlah Dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) adalah Dokumen yang berisi tentang mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah dokumen yang tersedia tentang gambaran resiko bencana di suatu wilayah, semakin banyak kajian risiko yang ada dalam dokumen KRB yang tersedia menunjukkan semakin mudah pemahaman masyarakat terhadap peta risiko bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Peringatan Dini Banjir adalah sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya banjir pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah sistem/alat peringatan dini banjir yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko banjir

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sistem Peringatan Dini Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Peringatan Dini Gunung Meletus adalah sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya gunung meletus/erupsi pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang BPBD

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah sistem/alat peringatan dini gunung meletus yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko gunung meletus

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sistem Peringatan Dini Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem peringatan Dini Longsor adalah sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya gerakan tanah/longsor pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang BPBD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah sistem/alat peringatan dini gerakan tanah/longsor yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko gerakan tanah/longsor

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sistem Peringatan Dini Gempa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Peringatan Dini Gempa adalah sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian informasi setelah terjadi gempa pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah sistem/alat peringatan dini gempa yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko gempa

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sistem Peringatan Dini Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah sebuah sistem yang berisi serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya tsunami pada suatu wilayah oleh lembaga yang berwenang

BPBD

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah sistem/alat peringatan dini tsunami yang tersedia/terpasang, semakin banyak sistem/alat peringatan dini yang tersedia/dipasang menunjukkan semakin tinggi/banyak masyarakat dapat menyelamatkan diri dari ancaman/risiko tsunami

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sistem Peringatan Dini Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Peringatan Dini Lainnya adalah sistem peringatan dini selain banjir, gunung meletus, longsor, gempa bumi, dan tsunami.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah sistem peringatan dini lainnya yang ada menunjukkan tingkat kesiapan dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi berbagai ancaman atau bahaya potensial yang berbeda. semakin banyak jumlah sistem/alat peringatan dini menunjukkan semakin banyak kesiapan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari ancaman/risiko bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kawasan Bencana Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan Bencana Banjir adalah suatu wilayah yang terjadi perendaman air yang berlebihan pada daratan yang biasanya tidak terendam air dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat BPBD

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Jumlah desa yang terdampak banjir, semakin banyak jumlah kawasan bencana banjir menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak banjir

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kawasan Bencana Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan bencana gunung meletus adalah wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) erupsi gunung api, oleh pejabat yang berwenang BPBD

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana gunung meletus menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak gunung meletus

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kawasan Bencana Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan bencana longsor adalah wilayah yang mempunyai kerentanan gerakan tanah dengan kriteria sedang-tinggi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana tanah longsor menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak tanah longsor

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kawasan Bencana Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan bencana gempa bumi adalah daerah yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya gempa bumi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana gempa bumi menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak gempa bumi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kawasan Bencana Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan bencana tsunami adalah daerah yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya tsunami.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana tsunami menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak tsunami

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kawasan Bencana Kebakaran Hutan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan Bencana Kebakaran hutan/lahan adalah Daerah yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya kebakaran hutan/lahan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak kawasan bencana kebakaran hutan/ lahan menunjukan semakin banyak desa terdampak kebakaran hutan/lahan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kawasan Bencana Gerakan Tanah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan bencana gerakan tanah adalah wilayah yang mempunyai kerentanan gerakan tanah dengan kriteria sedang-tinggi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana gerakan tanah menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak gerakan tanah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kawasan Bencana Angin Kencang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan bencana angin adalah daerah yang sering atau memiliki potensi tinggi mengalami bencana angin kencang

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah kawasan terdampak bencana angin kencang menunjukkan semakin banyak desa yang terdampak angin kencang

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kawasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Korban Akibat Bencana Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana banjir adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana banjir

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak korban banjir menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana banjir

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Korban Akibat Bencana Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana gunung meletus adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana gunung meletus

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana gunung meletus

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Korban Akibat Bencana Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana longsor adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana longsor

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana tanah longsor

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Korban Akibat Bencana Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana gempa bumi adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana gempa bumi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana gempa bumi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Korban Akibat Bencana Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana tsunami adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana tsunami

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana tsunami

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Korban Akibat Bencana Kebakaran Hutan/Lahan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban kejadian bencana kebakaran hutan/lahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana kebakaran hutan/lahan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana hutan/lahan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Korban Akibat Bencana Angin

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana angin adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana angin

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak korban menunjukkan semakin banyak dibutuhkan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana serta penanganan pasca bencana angin kencang

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengungsi akibat bencana banjir adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana banjir

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pengungsi akibat bencana banjir maka semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah yang mengungsi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengungsi akibat bencana gunung meletus adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana gunung meletus/erupsi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah yang mengungsi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengungsi akibat bencana longsor adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana gerakan tanah/longsor

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengungsi akibat bencana gempa bumi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana gempabumi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengungsi akibat bencana tsunami adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana tsunami

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak bencana di suatu wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Kebakaran Hutan/lahan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengungsi akibat kejadian kebakaran/lahan adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana kebakaran hutan/lahan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin banyak jumlah pengungsi menunjukkan semakin banyak korban terdampak kebakaran hutan/lahan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Banjir

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kerugian akibat bencana banjir adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana banjir

Unit Penyelenggara

BPBD

Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana banjir menunjukkan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana banjir.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan JOR x PHO

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Gunung Meletus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kerugian akibat bencana gunung meletus adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana gunung meletus/erupsi gunungapi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana gunung meletus/erupsi gunungapi menunjukkan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana gunung meletus/erupsi gunung api.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan JOR x PHO

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek



Ukuran Jumlah
Satuan Rupiah
Apakah Indikator Dapat Ya
Diakses Umum



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Gerakan tanah/Longsor

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kerugian akibat bencana gerakan tanah/longsor adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana gerakan tanah/longsor

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana gerakan tanah/longsor menunjukkan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana gerakan tanah/longsor

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan JOR x PHO

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek



Ukuran Jumlah
Satuan Rupiah
Apakah Indikator Dapat Ya
Diakses Umum



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Gempa Bumi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kerugian akibat bencana gempa bumi adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana gempabumi

Unit Penyelenggara

BPBD

Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana, semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana gempabumi menunjukkan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana gempa bumi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

JOR x PHO

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Tsunami

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kerugian akibat bencana tsunami adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana tsunami

Unit Penyelenggara

BPBD

Kelompok Indikator

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana tsunami menunjukkan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana tsunami.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan JOR x PHO

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Kebakaran Hutan/lahan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kerugian akibat kejadian kebakaran hutan/lahan adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kebakaran hutan/lahan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat bencana. Semakin banyak jumlah kerugian akibat bencana kebakaran hutan/lahan menunjukkan semakin tinggi biaya untuk memperbaiki kembali seperti semula akibat dampak bencana kebakaran hutan/lahan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan JOR x PHO

Keterangan:

JOR = Jumlah Obyek yang Rusak

PHO = Perkiraan Harga Obyek

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Jumlah Kerugian Akibat Bencana Kekeringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kerugian akibat bencana kekeringan adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat tidak langsung dari bencana kekeringan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah biaya yang dipakai untuk penanganan kekeringan. Semakin tinggi kerugian menunjuk semakin banyak daerah yang mengalami kekeringan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Prasarana dan sarana tanggap bencana adalah peralatan dan logistik yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah peralatan dan logistik yang siap untuk penanganan tanggap darurat bencana. Semakin banyak peralatan dan logistik tanggap bencana menunjukkan semakin cepat dalam penanganan darurat bencana yang terjadi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Kekeringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa/Kelurahan rawan kekeringan adalah kondisi suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan jumlah desa yang mengalami kekurangan air di musim kemarau. Semakin tinggi jumlah desa rawan kekeringan menunjukkan semakin tinggi kebutuhan air yang harus disediakan untuk penanggulangan kekeringan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Desa/Kelurahan yang Rawan Kekeringan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa/kelurahan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Menunjukkan persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana. Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi masyarakat yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

J2 = Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin tinggi persentase maka semakin banyak warga negara yang memperoleh pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan

J2 = Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

BPBD
Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Interpretasi

Semakin tinggi persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi maka semakin banyak jumlah warga terdampak bencana yang mendapat penanganan bencana

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi

J2 = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Persentase jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah Anak usia 5- 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Pendidikan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 5-6 tahun memiliki akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan PAUD. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang kuat dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau dan mudah diakses bagi anak-anak usia dini.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Pendidikan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia 5- 6 tahun



yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini

J2 = Jumlah penduduk kelompok usia 5- 6 tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Persentase anak usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) adalah Anak usia 7- 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 7-12 tahun memiliki akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar (SD/MI). Hal ini mencerminkan adanya upaya yang kuat dalam menyediakan fasilitas pendidikan dasar yang terjangkau dan mudah diakses bagi anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Pendidikan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia 7- 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar



J2 = Jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Persentase anak usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) adalah Anak usia 13- 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 13-15 tahun memiliki akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan menengah pertama. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang kuat dalam menyediakan fasilitas pendidikan menengah pertama yang terjangkau dan mudah diakses bagi anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Pendidikan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia 13- 15 tahun



yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar

J2 = Jumlah penduduk kelompok usia 13- 15 tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah anak usia 7 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan.

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Pendidikan

Interpretasi

Adanya persentase yang signifikan dari warga negara dalam kelompok usia ini yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan pentingnya program pendidikan kesetaraan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Pendidikan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia 7 - 18 tahun



| | |
|-------------------------------------|---|
| Ukuran | yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan |
| Satuan | J2 = Jumlah anak usia 7 - 18 tahun |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Percentase % |
| | ya |



Jumlah Siswa PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Siswa PAUD adalah anak usia dini yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah siswa PAUD yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kesadaran dan akses yang baik terhadap pendidikan anak usia dini di suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$J_1 + J_2 + J_3 + J_4 + J_5 + J_6$$

Keterangan:

J_1 = Jumlah Siswa PAUD

J_2 = Jumlah Siswa TK

J_3 = Jumlah Siswa KB

J_4 = Jumlah Siswa TPA

J_5 = Jumlah Siswa SPS (Satuan PAUD Sejenis)

J_6 = Jumlah Siswa RA/BA/TA

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Siswa TK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Siswa TK adalah anak usia pra-sekolah yang terdaftar dan bersekolah di tingkat Taman Kanak-kanak (TK).

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Pendidikan

Interpretasi

Jumlah siswa TK yang tinggi dapat mencerminkan tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan pra-sekolah di suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Siswa KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Siswa KB (Kelompok Bermain) adalah anak usia dini yang bersekolah atau terdaftar di satuan pendidikan tingkat KB (Kelompok Bermain).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah siswa KB yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi anak-anak dalam program pendidikan pra-sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok bermain.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Siswa TPA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Siswa TPA adalah anak-anak yang menjadi peserta atau pengguna layanan dari tempat penitipan anak (TPA)

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Pendidikan

Interpretasi

Jumlah siswa TPA yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi dan aksesibilitas layanan pendidikan dan perawatan anak usia dini di tempat penitipan anak (TPA) dalam suatu wilayah atau daerah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Siswa SPS (Satuan PAUD Sejenis)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Siswa SPS adalah siswa yang belajar di satuan pendidikan tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dengan karakteristik serupa.

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Pendidikan

Interpretasi

Jumlah Siswa SPS yang tinggi menunjukkan tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam memberikan pendidikan awal bagi anak-anak sebelum mereka memasuki pendidikan formal di tingkat lebih tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



APK PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
APK PAUD yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK PAUD mendekati 100 persen menunjukkan bahwa ada banyak anak bersekolah di jenjang pendidikan PAUD yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah murid yang mengikuti PAUD



J2 = jumlah anak umur 3-6 tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Sekolah PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sekolah PAUD adalah Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Interpretasi

Semakin banyak sekolah PAUD, semakin besar peluang bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan pra-sekolah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$J_1 + J_2 + J_3 + J_4 + J_5 + J_6$

Keterangan:

J_1 = Jumlah TK Negeri

J_2 = Jumlah TK Swasta

J_3 = Jumlah KB + Jumlah TPA

J_4 = Jumlah SPS (Satuan PAUD Sejenis)

J_5 = Jumlah RA/BA/TA

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah TK Negeri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TK Negeri adalah Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal yang dikelola oleh pemerintah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Dengan adanya cukup banyak TK Negeri, anak-anak memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan awal yang berkualitas tanpa harus membayar biaya yang terlalu tinggi.

Peningkatan jumlah TK Negeri juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat pra-sekolah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah TK Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TK Swasta adalah Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal yang dikelola oleh Perorangan atau Yayasan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah TK Swasta yang memadai dapat memberikan variasi pilihan bagi orang tua dalam memberikan pendidikan awal yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Perlu diingat bahwa peningkatan jumlah TK swasta bukan selalu mengindikasikan bahwa sekolah swasta lebih baik daripada sekolah negeri. Kualitas pendidikan dapat bervariasi di antara institusi pendidikan, baik swasta maupun negeri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan pengasuhan dan pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah KB yang cukup banyak menunjukkan perhatian dan komitmen dalam memberikan pendidikan awal bagi anak-anak, serta memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah TPA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Semakin banyak jumlah TPA, semakin besar kesempatan bagi orang tua atau wali untuk bekerja atau menjalankan aktivitas lainnya tanpa harus khawatir tentang pengasuhan anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah SPS (Satuan PAUD Sejenis)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah SPS yang cukup banyak membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan awal bagi anak-anak di berbagai wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah PAUD Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PAUD Terakreditasi A adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh akreditasi dengan peringkat A.

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Kelompok Indikator

Jumlah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Terakreditasi A mencerminkan tingkat keberhasilan lembaga PAUD dalam memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6$

Keterangan:

$J1$ = Jumlah TK Negeri Terakreditasi A

$J2$ = TK Swasta Terakreditasi A

$J3$ = Jumlah KB Terakreditasi A

$J4$ = Jumlah TPA Terakreditasi A

$J5$ = Jumlah SPS (Satuan PAUD Sejenis) Terakreditasi A

$J6$ = Jumlah RA/BA/TA Terakreditasi A

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah TK Negeri Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TK Negeri Terakreditasi A adalah Lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) yang dikelola oleh pemerintah dan telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah TK Negeri terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen dari pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah TK Swasta Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TK Swasta Terakreditasi A adalah Lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikelola secara swasta dan telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah TK Negeri terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen dari pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah KB Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

KB Terakreditasi A adalah Kelompok bermain yang telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Aspek Pendidikan

Jumlah TK Swasta terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di sektor swasta. Hal ini mencerminkan komitmen dari pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan swasta, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah TPA Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TPA Terakreditasi A adalah TPA yang telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah TPA Terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan perawatan dan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di tempat penitipan anak. Hal ini mencerminkan komitmen dari lembaga TPA dan pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas layanan yang disediakan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah SPS (Satuan PAUD Sejenis) Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | SPS (Satuan PAUD Sejenis) Terakreditasi A adalah Lembaga pendidikan sejenis PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang telah memperoleh akreditasi dengan peringkat A. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan Jumlah SPS Terakreditasi A yang tinggi merupakan indikator positif dalam penyediaan layanan pendidikan awal yang berkualitas tinggi bagi anak-anak usia dini di lembaga pendidikan sejenis dengan PAUD formal. Hal ini mencerminkan komitmen dari lembaga SPS dan pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan awal yang disediakan oleh SPS. |

■ DATA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan Periodesasi | Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahunan |
|--------------------------------------|---|

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase PAUD Terakreditasi A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase PAUD Terakreditasi A adalah Perbandingan Jumlah PAUD terakreditasi A dengan Jumlah sekolah PAUD

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Semakin tinggi persentase tersebut, semakin banyak lembaga PAUD yang memiliki kualitas pendidikan yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah PAUD Terakreditasi A

J2 = Jumlah Sekolah PAUD

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik PAUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik PAUD adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada sekolah PAUD.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah Guru/Tenaga Pendidik PAUD yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Lebih banyak guru dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih baik kepada setiap anak, mendukung perkembangan mereka secara keseluruhan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$J_1 + J_2 + J_3 + J_4 + J_5 + J_6$

Keterangan:

J_1 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri

J_2 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta



J3 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik

KB

J4 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik
TPA

J5 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik
SPS

J6 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik
RA/BA/TA

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK Negeri.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah Guru/Tenaga Pendidik TK Negeri yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran. Lebih banyak guru dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih baik kepada setiap anak, mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK Swasta.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah Guru/Tenaga Pendidik TK Swasta yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran. Lebih banyak guru dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih baik kepada setiap anak, mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik KB adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada KB.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah Guru/Tenaga Pendidik KB yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan di KB. Guru-guru yang cukup dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TPA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TPA adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TPA.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah Guru/Tenaga Pendidik TPA yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas perawatan dan pengasuhan anak-anak di TPA. Guru-guru yang cukup dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan emosional anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik SPS (Satuan PAUD Sejenis)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik SPS (Satuan PAUD Sejenis) adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada SPS.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah Guru/Tenaga Pendidik SPS yang memadai berpotensi meningkatkan kualitas pengajaran dan pengasuhan anak-anak usia dini di lembaga atau satuan PAUD. Guru-guru yang cukup dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, kognitif, dan emosional anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4),

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga PAUD akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlahan Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 TK Negeri, TK Swasta, KB, TPA, SPS (Satuan PAUD Sejenis), RA/BA/TA

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TK Swasta berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat TK Swasta yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga TK Swasta akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TK Negeri berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat TK Negeri yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga TK Negeri akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik KB berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik KB berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat KB yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga KB akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik TPA berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik TPA berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat TPA yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga TPA akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik SPS berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guru/ Tenaga Pendidik SPS berkualifikasi S1/D4 adalah Pendidik atau tenaga pengajar di tingkat SPS yang memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Dengan adanya lebih banyak guru berkualifikasi S1/D4, diharapkan kualitas pengajaran di lembaga SPS akan meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Guru/ Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Guru/ Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 adalah Perbandingan antara Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 dengan Jumlah Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Persentase yang tinggi dari Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki pendidikan formal yang tinggi dan mendalam tentang pendidikan anak usia dini. Ini berarti potensi adanya pemahaman yang lebih baik tentang metode pengajaran yang efektif dan perkembangan anak usia dini.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Guru/Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4

J2 = Jumlah Guru/Tenaga Pendidik PAUD

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



APK SD/MI/Paket A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

APK SD/MI/Paket A adalah Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan SD/MI/Paket A terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
APK SD/MI/Paket A yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK SD/MI/Paket A mendekati 100 persen menunjukkan bahwa ada banyak anak bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = jumlah siswa SD/MI/Paket A



J2 = jumlah penduduk usia 7-12
tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



APK SMP/MTs/Paket B

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

APK SMP/MTs/Paket B adalah Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
APK SMP/MTs/Paket B yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK SMP/MTs/Paket B mendekati 100 persen menunjukkan bahwa ada banyak anak bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:



J1 = jumlah siswa SMP/MTs/Paket B
J2 = jumlah penduduk usia 13-15 tahun

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B adalah Angka partisipasi murni sekolah menengah atas adalah perbandingan antara murid sekolah menengah atas (SMP), Madrasah Sanawiyah (MTs), dan paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

APM SMP/MTs/Paket B menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM SMP/MTs/Paket B mendekati 100%, berarti terdapat banyak anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Dasar di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan $\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$

Keterangan:

J1 = Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B

J2 = jumlah penduduk usia 13-15 tahun

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Persentase Guru/ Tenaga Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Guru/ Tenaga Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4 adalah Perbandingan jumlah Guru/ Tenaga Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4 dengan jumlah Guru/Tenaga Pendidik SMP/MTs.

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Pendidikan

Interpretasi

Dengan adanya persentase yang tinggi dari guru berkualifikasi S1/D4, maka dapat diharapkan peningkatan kualitas pengajaran di SMP/MTs karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pelajaran dan metode pengajaran yang lebih baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Guru/ Tenaga Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4

J2 = Jumlah Guru/Tenaga Pendidik SMP/MTs

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Guru Terhadap Siswa SD/MI

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Guru Terhadap Siswa SD/MI adalah Perbandingan jumlah siswa SD/MI dengan jumlah guru SD/MI. Rasio Guru Terhadap Siswa SD/MI mengukur jumlah siswa SD/MI yang dibimbing dan diajarkan per 1 guru.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Rasio guru terhadap siswa yang lebih rendah (guru lebih banyak dibandingkan jumlah siswa) cenderung memberikan kesempatan bagi interaksi yang lebih pribadi antara guru dan siswa. Hal ini dapat meningkatkan perhatian dan dukungan individual bagi setiap siswa, memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan dan pengajaran yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2}$$

Keterangan:

J1 = Jumlah siswa SD/MI



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

J2 = jumlah guru SD/M

Rasio
orang
Ya



Rasio Guru Terhadap Siswa SMP/MTs

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Guru Terhadap Siswa SMP/MTs adalah Jumlah siswa yang dibimbing dan diajar per 1 orang guru pada tingkat SMP/MTs.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Aspek Pendidikan

Rasio guru terhadap siswa yang lebih rendah (guru lebih banyak dibandingkan jumlah siswa) cenderung memberikan kesempatan bagi interaksi yang lebih pribadi antara guru dan siswa. Hal ini dapat meningkatkan perhatian dan dukungan individual bagi setiap siswa, memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan dan pengajaran yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

J_1

J_2

Keterangan:

J_1 = Jumlah siswa SMP/MTS

J_2 = jumlah guru SMP/MTS

Ukuran

Rasio

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SD Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas adalah Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Mebeler dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Ukuran yang umum adalah 9m x 8m. Ruang kelas memiliki syarat kelayakan dan standar tertentu, misalnya ukuran, pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan persyaratan lainnya yang telah dibakukan oleh pihak berwenang terkait.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Ruang kelas dalam kondisi baik menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Siswa akan lebih nyaman dan lebih fokus dalam belajar di ruang kelas yang kondisinya aman, bersih, dan nyaman. Hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Ringan adalah Ruang kelas SD dengan bangunan yang tingkat kerusakannya kurang dari 30%

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan dapat memberikan indikasi mengenai kondisi infrastruktur pendidikan. Jika jumlahnya rendah, artinya sebagian kecil ruang kelas mengalami kerusakan yang relatif minor, seperti retakan kecil pada dinding atau lantai, cat yang terkelupas, atau masalah kecil lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang kelas masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan dengan nyaman oleh siswa dan guru.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Sedang adalah Ruang kelas SD dengan bangunan yang tingkat kerusakannya lebih besar dari 30% sampai dengan 45%.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang mencerminkan skala atau jumlah ruang kelas yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan yang lebih luas dibandingkan dengan kerusakan ringan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Berat adalah Ruang kelas SD dengan bangunan yang tingkat kerusakannya lebih besar dari 45% sampai dengan 65%.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat mencerminkan skala atau jumlah ruang kelas yang membutuhkan perbaikan yang luas dan komprehensif. Ruang kelas dalam kondisi rusak berat umumnya mengalami kerusakan struktural yang signifikan, retakan besar pada dinding, lantai yang hampir roboh, atap yang rusak parah, atau masalah serius lainnya yang mengganggu penggunaan ruang kelas secara normal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Total

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SD Kondisi Rusak Total adalah Ruang kelas SD yang sudah tidak bisa digunakan kegiatan belajar mengajar dikarenakan rusak.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Tingkat perawatan dan pemeliharaan yang rendah: Jika banyak ruang kelas dalam kondisi rusak total, hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat perawatan dan pemeliharaan sekolah tidak memadai. Kurangnya anggaran, sumber daya, atau kesadaran tentang pentingnya perawatan dapat menyebabkan penurunan kondisi ruang kelas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SMP Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Ruang Kelas SMP Kondisi Baik adalah Ruang kelas SMP dengan bangunan yang tidak ada kerusakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Pendidikan
Ruang kelas dalam kondisi baik menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Siswa akan lebih nyaman dan lebih fokus dalam belajar di ruang kelas yang kondisinya aman, bersih, dan nyaman. Hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

unit

Ya



Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Ringan adalah Ruang kelas SMP dengan bangunan yang tingkat kerusakannya kurang dari 30%.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan dapat memberikan indikasi mengenai kondisi infrastruktur pendidikan. Jika jumlahnya rendah, artinya sebagian kecil ruang kelas mengalami kerusakan yang relatif minor, seperti retakan kecil pada dinding atau lantai, cat yang terkelupas, atau masalah kecil lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang kelas masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan dengan nyaman oleh siswa dan guru.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan

Periodesasi

SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Sedang adalah Ruang kelas SMP dengan bangunan yang tingkat kerusakannya lebih besar dari 30% sampai dengan 45%.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang mencerminkan skala atau jumlah ruang kelas yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan yang lebih luas dibandingkan dengan kerusakan ringan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Berat adalah Ruang kelas SMP dengan bangunan yang tingkat kerusakannya lebih besar dari 45% sampai dengan 65%.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat mencerminkan skala atau jumlah ruang kelas yang membutuhkan perbaikan yang luas dan komprehensif. Ruang kelas dalam kondisi rusak berat umumnya mengalami kerusakan struktural yang signifikan, retakan besar pada dinding, lantai yang hampir roboh, atap yang rusak parah, atau masalah serius lainnya yang mengganggu penggunaan ruang kelas secara normal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Total

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Total adalah Ruang Kelas SMP Kondisi Rusak Total.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Tingkat perawatan dan pemeliharaan yang rendah: Jika banyak ruang kelas dalam kondisi rusak total, hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat perawatan dan pemeliharaan sekolah tidak memadai. Kurangnya anggaran, sumber daya, atau kesadaran tentang pentingnya perawatan dapat menyebabkan penurunan kondisi ruang kelas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Angka kelulusan SD/MI

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka kelulusan SD/MI adalah Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SD/MI sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Jika Presentase angka kelulusan SD/MI semakin tinggi, hal ini mungkin menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Guru dan tenaga pendidik mungkin telah mengimplementasikan strategi pengajaran yang lebih efektif, kurikulum yang relevan, dan upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Siswa Lulus



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

J2 = Jumlah Seluruh Siswa

Persentase
persen

Ya



Angka kelulusan SMP/MTs

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka kelulusan SMP/MTs adalah Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan SMP/MTs sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Interpretasi

Jika Presentase angka kelulusan SMP/MTs semakin tinggi, hal ini mungkin menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Guru dan tenaga pendidik mungkin telah mengimplementasikan strategi pengajaran yang lebih efektif, kurikulum yang relevan, dan upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Siswa Lulus

J2 = Jumlah Seluruh Siswa

Ukuran

Persentase

Satuan

persen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka anak putus sekolah SD/MI

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka anak putus sekolah SD/MI adalah Jumlah anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI.

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Pendidikan

Interpretasi

Tingginya angka anak putus sekolah bisa menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memberikan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi anak-anak di tingkat pendidikan dasar. Faktor-faktor seperti kemiskinan, jarak tempuh sekolah yang jauh, dan ketidakmampuan untuk memenuhi biaya pendidikan dapat menjadi kendala bagi anak-anak untuk tetap bersekolah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak yang putus sekolah



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

J2 = Jumlah anak di usia sekolah

Persentase
persen

Ya



Angka anak putus sekolah SMP/MTs

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka anak putus sekolah SMP/MTs adalah Jumlah anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs.

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Pendidikan

Interpretasi

Tingginya tingkat putus sekolah juga bisa mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan yang ditawarkan di sekolah-sekolah. Kurangnya sumber daya, kurikulum yang tidak relevan, metode pengajaran yang tidak efektif, dan lingkungan belajar yang tidak kondusif dapat menyebabkan anak-anak kehilangan minat dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak yang putus sekolah



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

J2 = Jumlah anak di usia sekolah

Persentase
persen

Ya



Angka anak mengulang SD/MI

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka anak mengulang SD/MI adalah Jumlah siswa yang harus mengulang satu atau lebih tahun ajaran di tingkat pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Angka ini mengukur seberapa banyak siswa yang tidak dapat lulus ke jenjang pendidikan berikutnya sesuai dengan tingkat kelas mereka.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Tingginya angka anak mengulang bisa menunjukkan bahwa ada masalah dalam pemahaman dan pencapaian akademis siswa terhadap materi pelajaran di tingkat SD/MI. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam belajar dan memahami pelajaran, yang menyebabkan mereka harus mengulang kelas untuk memahami lebih baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan $\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak yang mengulang

J2 = Jumlah anak di usia sekolah

Ukuran Persentase

Satuan persen

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Angka anak mengulang SMP/MTs

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka anak mengulang SMP/MTs adalah Angka anak mengulang SMP/MTs adalah persentase atau rasio siswa yang mengulang kelas di tingkat pendidikan menengah pertama, yang biasa disebut SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau MTs (Madrasah Tsanawiyah). Angka ini menggambarkan jumlah siswa yang tidak berhasil memenuhi syarat untuk naik ke kelas berikutnya pada tahun ajaran tertentu dan perlu mengulang kelas yang sama.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Tingginya angka anak mengulang bisa menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam pemahaman dan pencapaian akademis siswa terhadap materi pelajaran di tingkat SMP/MTs. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, yang menyebabkan mereka harus mengulang kelas untuk memahami lebih baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak yang mengulang

J2 = Jumlah anak di usia sekolah

Ukuran

Persentase

Satuan

persen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal. Kegiatan Belajar mengajar masuk dalam pengawasan dan bimbingan oleh dinas pendidikan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Semakin banyak jumlah PKBM, semakin banyak kesempatan belajar yang tersedia bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
unit
Ya



Jumlah PKBM terakreditasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PKBM terakreditasi adalah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang telah melewati proses akreditasi oleh otoritas pendidikan terkait.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Semakin banyak PKBM yang telah berhasil melewati proses akreditasi, semakin banyak lembaga pendidikan nonformal yang diakui memiliki standar dan kualitas yang memadai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Kesetaraan di

Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Persentase PKBM terakreditasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase PKBM terakreditasi adalah Perbandingan antara jumlah PKBM terakreditasi dengan jumlah total PKBM.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Persentase PKBM terakreditasi mengindikasikan sejauh mana lembaga-lembaga pendidikan nonformal di wilayah tersebut memiliki kualitas dan standar yang sesuai dengan kriteria akreditasi. Semakin tinggi persentase PKBM terakreditasi, semakin banyak lembaga pendidikan nonformal yang diakui memiliki kualitas yang memadai.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah tenaga pengajar PKBM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga pengajar PKBM adalah Individu yang menjadi pengajar atau instruktur dalam Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Pendidikan

Interpretasi

Dengan memiliki cukup banyak tenaga pengajar, PKBM dapat memberikan kesempatan belajar bagi lebih banyak orang di masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan akses pendidikan nonformal bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Kesetaraan di

Kabupaten

Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah murid PKBM Paket A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Murid PKBM Paket A adalah Peserta didik yang mengikuti program pendidikan nonformal tingkat Paket A di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Program Paket A adalah salah satu program pendidikan yang disediakan untuk mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Semakin banyak murid yang mendaftar di PKBM Paket A, semakin besar kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan dasar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

Periodikasi

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah murid PKBM Paket B

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Murid PKBM Paket B adalah Peserta didik yang mengikuti program pendidikan nonformal tingkat Paket B di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Program Paket B adalah salah satu program pendidikan yang ditujukan untuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Semakin banyak murid yang mendaftar di PKBM Paket B, semakin besar kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan menengah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
orang
Ya



Jumlah murid PKBM Paket C

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Murid PKBM Paket C adalah Peserta didik yang mengikuti program pendidikan nonformal tingkat Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Program Paket C adalah salah satu program pendidikan yang ditujukan untuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan menengah, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun belum menyelesaikan pendidikan atas, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan
Semakin banyak murid yang mendaftar di PKBM Paket C, semakin besar kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan atas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Penyelenggaraan
Kesetaraan
di
Purbalingga
Tahunan

Pendidikan
Kabupaten

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

orang

Ya



Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah Satuan pendidikan di luar sekolah atau pendidikan nonformal yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat lebih mengembangkan diri dan profesi hingga mengasah keterampilan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah LKP yang tinggi dapat menunjukkan ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan di suatu daerah. Ini dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi individu untuk mengembangkan keterampilan atau mendapatkan pengetahuan tambahan, terlepas dari latar belakang pendidikan atau pekerjaan mereka sebelumnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Periodesasi

Kesetaraan di

Kabupaten

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah tenaga pengajar LKP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga pengajar LKP adalah Individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan kepada peserta kursus atau program pelatihan di LKP tersebut.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Pendidikan

Jumlah tenaga pengajar LKP yang mencukupi dapat menunjukkan adanya ketersediaan layanan pendidikan dan pelatihan di daerah tersebut. Semakin banyak tenaga pengajar yang tersedia, semakin besar kemungkinan adanya berbagai program pelatihan atau kursus yang dapat diakses oleh masyarakat setempat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Periodesasi

Kesetaraan di

Kabupaten

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah murid LKP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Murid LKP adalah Individu yang mendaftar dan mengikuti program pendidikan atau pelatihan di LKP.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Aspek Pendidikan

Jumlah murid LKP mencerminkan tingkat permintaan dan minat masyarakat terhadap program pendidikan atau pelatihan yang ditawarkan oleh LKP.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penyelenggaraan
Kesetaraan di
Purbalingga

Pendidikan
Kabupaten

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sanggar Kesenian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sarana Seni dan Budaya adalah Tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu kelompok, komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Semakin banyak sanggar yang berdiri dengan pengampu berkompeten, akan memfasilitasi kompetensi generasi muda untuk berkembang dan berkarakter.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
sanggar
Ya



Jumlah Panggung Kesenian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panggung Kesenian adalah Panggung dengan event yang memfasilitasi hasil kreasi seni dari pekerja seni kepada penikmat seni serta melestarikan kesenian tersebut.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Interpretasi

Jumlah panggung dan frekuensi event kesenian tradisional serta modern akan memberi wacana yang lengkap kepada generasi milenial dengan karakter nasional yang integrated.

Peningkatan jumlah panggung kesenian menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan industri seni dan budaya dalam suatu wilayah. Hal ini dapat menunjukkan beberapa hal positif antara lain Tingginya minat dan apresiasi terhadap seni, Keragaman seni dan budaya, tingginya kreativitas dan inovasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Museum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Museum adalah Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Semakin banyak jumlah museum dalam suatu daerah, semakin banyak pula kesempatan bagi masyarakat dan pengunjung untuk mengakses dan mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi seni, sejarah, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Kemudahan akses museum oleh masyarakat akan sangat membantu eksistensi museum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pusat Kebudayaan/Taman Budaya adalah Wadah atau sarana yang mengembangkan/mempromosikan kebudayaan tertentu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Kebudayaan lokal akan dikenal dan dimiliki semua kalangan jika diendors dengan event dan promosi budaya.

Peningkatan jumlah Pusat Kebudayaan atau Taman Budaya menunjukkan komitmen dan dorongan dari suatu wilayah untuk melestarikan dan mempromosikan budaya dan seni dalam masyarakat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya adalah Event yang diselenggarakan dalam Festival Seni dan Budaya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Frekuensi event yang cukup mampu memfasilitasi kreasi antara pegiat seni dengan penikmat seni serta mengeksistensikan budaya seni.
Peningkatan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan dorongan yang kuat untuk mempromosikan, merayakan, dan menghargai seni dan budaya dalam masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

event

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah ditetapkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) adalah Berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut (UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Banyaknya WBTB yang tergali dari daerah yang mendapatkan pengakuan/ sertifikat semakin memperkokoh kebudayaan (tak benda) yang akan menggairahkan hidup dan kehidupan bermartabat. Peningkatan jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang sudah ditetapkan menunjukkan komitmen dari suatu negara atau wilayah untuk melestarikan dan menjaga keanekaragaman budaya serta warisan tradisional yang tidak berwujud.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

unit

Ya



Jumlah Pamong Budaya (nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, cagar budaya, perfilman)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pamong Budaya adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan tugas di bidang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Pamong Budaya Fungsional dengan kompetensi dan kuantitas yang memadai akan menunjang optimalnya keberhasilan pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya sesuai tupoksinya.

Peningkatan jumlah Pamong Budaya (pelestari nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, cagar budaya, perfilman) menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari suatu negara atau wilayah untuk melestarikan dan menghargai aspek-aspek budaya dan sejarah yang beragam.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

orang

Ya



Jumlah SDM Kesenian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

SDM (Sumber Daya Manusia) Kesenian adalah Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan stratifikasi yang mumpuni di bidang kesenian.

Unit Penyelenggara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Indikator

Aspek Kebudayaan

Interpretasi

SDM kesenian yang mumpuni merupakan modal utama untuk melestarikan dan mengkreasi seni dengan dasar seni tradisional semakin membanggakan generasi muda.

Jumlah SDM Kesenian yang lebih besar menandakan adanya peningkatan minat dan partisipasi dalam dunia seni dan kesenian. Ini dapat mendorong pertumbuhan industri seni yang beragam, termasuk bidang teater, tari, musik, seni rupa, perfilman, dan lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Objek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan/dikembangkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah Dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Yang termasuk dalam Objek PPKD adalah Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Semakin banyak PPKD yang direvitalisasi, maka semakin menghidupkan kecintaan generasi muda pada kebudayaan masa lampau

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Obyek Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) yang Dilestarikan atau Dikembangkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang Dilestarikan atau Dikembangkan adalah Perbandingan jumlah PPKD yang dilestarikan/dikembangkan dengan jumlah total PPKD.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Semakin tinggi presentase, maka semakin banyak generasi yang akan memahami dan mengintegrasikan kebudayaan dalam hidup dan penghidupan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus
Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J₁ = Jumlah Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan/dikembangkan

J₂ = Jumlah Total Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)

Ukuran

Percentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum



Jumlah Pegiat Seni Rupa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Pegiat Seni Rupa adalah Jumlah kelompok yang mendalami seni dan budaya dalam hal seni rupa yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Kebudayaan Semakin banyak pegiat seni rupa, semakin banyak peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan kualitas seni rupa.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pegiat Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pegiat Seni Tari/Gerak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Pegiat Seni Tari/Gerak adalah Jumlah kelompok yang mendalami seni dan budaya dalam hal seni tari yang ada di Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Banyaknya pegiat seni sebanding dengan karya seni tari rupa dan kekaryaan dari pegiat seni.

Dengan semakin banyak pegiat seni tari/gerak, dapat terjadi pertumbuhan dalam produksi dan penampilan seni tari dan gerak. Ini berarti lebih banyak pertunjukan tari dan gerak yang dapat dinikmati oleh masyarakat, meningkatkan apresiasi dan kesadaran akan seni ini.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pegiat Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pegiat Pagelaran / PameranSeni Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pegiat Pagelaran / PameranSeni Budaya adalah Kegiatan untuk memperkenalkan atau menunjukkan hasil karya seni musik, tari, teater/drama dan lainnya kepada masyarakat luas. Yang masuk dalam Seni Pagelaran/Pameran Seni Budaya diantaranya

1. Pagelaran Seni Budaya

2. Pameran Seni Budaya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Frekuensi event yang cukup mampu memfasilitasi kreasi antara pegiat seni dengan penikmat seni serta mengeksistensikan budaya seni dengan adanya pagelaran/pameran seni .

Dengan semakin banyak Pegiat Pagelaran/Pameran Seni Budaya, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara-acara seni budaya dan mengalami berbagai bentuk seni dan budaya. Ini dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman tentang seni budaya di kalangan masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pegiat Seni dan Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kelompok |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cagar Budaya adalah Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Kebudayaan

Semakin banyak temuan cagar budaya yang diekspos ke masyarakat, semakin besar kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal, menghargai, dan bangga akan kebudayaan setempat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah bangunan Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bangunan Cagar Budaya adalah Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Semakin banyak ditemukan struktur bangunan yang unik dari lingkungan setempat, akan memperkuat kebanggaan akan bangsa sendiri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Struktur Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Struktur Cagar Budaya adalah Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Banyaknya struktur cagar budaya yang dilindungi akan memperkuat jati diri masyarakat setempat.

Dengan semakin banyak struktur cagar budaya, artefak bersejarah, bangunan, situs arkeologi, dan tempat bersejarah lainnya dapat dipelihara dan dijaga agar tetap terjaga dan dapat diakses oleh masyarakat dan generasi mendatang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Situs Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Situs Cagar Budaya adalah Lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Banyaknya situs cagar budaya mengejawantahkan peradaban kehidupan masa lalu.

Dengan semakin banyak situs cagar budaya, artefak bersejarah, situs arkeologi, bangunan bersejarah, dan tempat bersejarah lainnya dapat dipelihara dan dijaga agar tetap terjaga dan dapat diakses oleh masyarakat dan generasi mendatang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penetapan Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penetapan Cagar Budaya adalah Inventarisasi cagar budaya dan ditetapkan dengan SK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Banyaknya penetapan cagar budaya dari pemerintah merupakan bukti kepedulian akan peradaban masa lampau.

Dengan semakin banyak penetapan cagar budaya, artefak bersejarah, bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan tempat bersejarah lainnya mendapatkan perlindungan hukum dan perhatian lebih untuk tetap terjaga dan dijaga. Ini membantu melindungi warisan budaya dari kerusakan, perusakan, atau kepunahan yang dapat mengancam nilai sejarah dan budaya dari suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pelestarian Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pelestarian Cagar Budaya adalah Usaha/ kegiatan dalam rangka melestarikan cagar budaya supaya tidak punah dari peradaban.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Banyaknya pelestarian cagar budaya dari pemerintah bukti kepedulian akan peradaban masa lampau.

Peningkatan jumlah pelestarian cagar budaya menunjukkan adanya upaya yang lebih besar dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya dan sejarah suatu wilayah atau negara.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pendaatan Cagar budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pendataan Cagar budaya adalah Kegiatan penelitian, pencatatan dan pengarsipan dilakukan untuk menginventarisir cagar budaya

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Keakuratan pendataan cagar budaya merupakan bentuk keseriusan pemerintah akan cagar budaya.

Data yang terkumpul melalui pendataan cagar budaya dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan yang berharga bagi masyarakat. Informasi tentang sejarah, budaya, dan peradaban dapat disampaikan melalui pendidikan, pameran, dan program edukasi lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah SDM Arkeolog

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Arkeolog adalah Ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan sebelum dikenal tulisan (prasejarah), maupun sesudah dikenal tulisan (sejarah), serta mempelajari budaya masa kini yang dikenal dengan riset budaya bendawi modern (modern material culture).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Aspek Kebudayaan

Tersedianya arkeolog yang memadai sangat membantu pengungkapan kebardenan masa lampau.

Dengan semakin banyak arkeolog, penelitian dan penggalian di situs-situs arkeologi dapat meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Juru Pelihara Cagar Budaya adalah Salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselemanat cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak atau musnah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Terpenuhinya tenaga /juru pelihara yang memadai dengan keterampilannya akan mampu melayani dan membantu lestarianya cagar budaya.

Dengan semakin banyak juru pelihara cagar budaya, situs-situs bersejarah dan artefak dapat diperhatikan dengan lebih baik dan dirawat agar tetap terjaga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga
Periodesasi
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Unit
Ya



Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan adalah Perbandingan antara cagar budaya yang dilestarikan dengan cagar budaya yang ada.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan
Besarnya persentase cagar budaya yang dilestarikan menengarai kepedulian pemerintah akan cagar budaya. Semakin tinggi persentase, semakin besar perhatian dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan cagar budaya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J₁ = Cagar budaya yang dilestarikan

J₂ = Cagar budaya yang ada

Persentase

%

Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum



Jumlah Museum Milik Pemerintah Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Museum Milik Pemerintah Daerah adalah Lembaga milik pemerintah daerah yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Jumlah museum milik pemerintah daerah mencerminkan peran pemerintah dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya di wilayah tersebut.

Peningkatan jumlah museum milik pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam melestarikan, mempromosikan, dan menghargai warisan budaya dan sejarah suatu wilayah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Permuseuman di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
Unit
Ya



Jumlah Museum Milik Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Museum Milik Swasta adalah Lembaga milik swasta atau perseorangan yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aspek Kebudayaan

Jumlah museum milik swasta yang cukup banyak dapat memperluas aksesibilitas terhadap kegiatan budaya dan seni. Dengan adanya museum yang dikelola oleh pihak swasta, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan kesempatan untuk mengunjungi museum-museum ini, menggali pengetahuan, dan menghargai kekayaan budaya yang tersedia.

Peningkatan jumlah museum milik swasta menunjukkan adanya minat dan partisipasi dari sektor swasta dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan sejarah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Permuseuman di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pengunjung Museum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Pengunjung Museum adalah Perorangan dan/ organisasi yang memanfaatkan layanan museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aspek Kebudayaan Jika jumlah pengunjung museum meningkat, maka dapat mencerminkan minat yang tinggi dari masyarakat terhadap koleksi, pameran, atau program yang ditawarkan oleh museum. Jumlah yang signifikan dari pengunjung menunjukkan popularitas museum dan daya tarik yang dimilikinya dalam menarik perhatian masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Permuseuman di Kabupaten
Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS KESEHATAN



Angka Kematian Ibu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

AKI (Angka Kematian Ibu) adalah Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Unit Penyelengara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin rendah AKI, semakin baik sistem pelayanan kesehatan maternal dalam mencegah dan mengatasi kondisi yang dapat menyebabkan kematian ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100.000$$



Keterangan:

J1 = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu

J2 = Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Proporsi

per 100.000 kelahiran hidup

| | |
|--------------------------------|----|
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Kasus Kematian Ibu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kasus kematian ibu adalah Jumlah kematian ibu dalam periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kematian ibu yang sedikit menunjukkan meningkatnya pelayanan kesehatan ibu

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Kematian Bayi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

AKB (Angka Kematian Bayi) adalah Jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin rendah AKB, semakin baik sistem pelayanan kesehatan bayi berusia dibawah 1 tahun dalam mencegah dan mengatasi kondisi yang dapat menyebabkan kematian bayi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
Kelahiran Hidup di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 1000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah kematian bayi berusia <

1 tahun pada satu tahun tertentu

J2 = Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Proporsi

per 1.000 kelahiran hidup

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Kasus Kematian Bayi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kasus kematian bayi adalah Jumlah kematian bayi dalam periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun yang sedikit menunjukan meningkatnya pelayanan kesehatan bayi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Kematian Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

AKABA (Angka Kematian Balita) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-59 bulan per 1.000 kelahiran hidup pada periode tahun tertentu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin rendah AKABA, semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita (anak usia 0-59 bulan). Penurunan AKABA mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam pencegahan dan penanganan penyakit pada balita, serta akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 1000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah kematian anak berusia 0-59 bulan pada periode tahun tertentu

J2 = Jumlah anak berusia 0-4 tahun pada pertengahan tahun yang sama

Proporsi per 1.000 kelahiran hidup

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Kasus Kematian Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kasus kematian balita adalah Jumlah kematian balita dalam periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kematian balita yang sedikit menunjukkan meningkatnya pelayanan kesehatan balita

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah balita usia 0- 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Kematian Neonatal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

AKN (Angka Kematian Neonatal) adalah Jumlah kematian bayi usia 0-28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada periode tahun tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin rendah AKN, semakin baik tingkat kesehatan neonatal dan kualitas perawatan yang diberikan. Penurunan AKN mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam mencegah kematian bayi pada periode neonatal, termasuk penerapan praktik medis yang baik, perawatan yang terkoordinasi, deteksi dini komplikasi neonatal, dan intervensi tepat waktu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 1000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Kematian Bayi di bawah usia 28 hari pada periode tertentu

J2 = Jumlah Kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Ukuran

Proporsi

Satuan

per 1.000 kelahiran hidup

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus Kematian Neonatal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kasus kematian neonatal adalah Jumlah kematian bayi usia 0-28 hari dalam periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin turun jumlah kematian neonatal menunjukan meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Indeks Keluarga Sehat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Keluarga Sehat adalah Suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keluarga berdasarkan 12 indikator PIS PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga). PIS PK merupakan suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 - 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5. Nilai IKS dapat diketahui berjenjang mulai dari tingkat keluarga, tingkat wilayah yang paling kecil (RT) hingga tingkat nasional

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten

Periodisasi

Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni

1. Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8,
2. Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 - 0,8 dan
3. Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5.

Nilai IKS dapat diketahui berjenjang mulai dari tingkat keluarga, tingkat wilayah yang paling kecil (RT) hingga tingkat nasional

Ukuran

Indeks

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Kesakitan Penduduk (Morbiditas)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka Kesakitan Penduduk (Morbiditas) adalah Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan

Interpretasi

Aspek Kesehatan

Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPK}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

JPK = Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas

JP = jumlah penduduk

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Kesakitan Penduduk Laki-Laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Angka Kesakitan Penduduk Laki-Laki adalah Persentase penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Semakin banyak penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKL}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

JKL = Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas penduduk laki-Laki

JP = jumlah penduduk
Persentase

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

%

Ya



Angka Kesakitan Penduduk Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka Kesakitan Penduduk Perempuan adalah Persentase penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan

Interpretasi

Aspek Kesehatan

Semakin banyak penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKP}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

JKP = Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas penduduk perempuan

JP = jumlah penduduk

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Pelayanan Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil adalah Perbandingan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah sasaran ibu hamil di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu yang sama

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan selama masa kehamilan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JIH}{JSIH} \times 100\%$$

Keterangan:

JIH = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun
JSIH = Jumlah sasaran ibu hamil di



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Kab. Purbalingga dalam kurun waktu

yang sama

Persentase

%

Ya



Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Persalinan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pelayanan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan adalah Perbandingan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses ibu bersalin terhadap pelayanan persalinan yang tepat dan berkualitas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JIB}{JSIB} \times 100\%$$

Keterangan:

JIB = Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan



kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun
JSIB = Jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Persentase Pelayanan Bayi Baru Lahir Mendapat Pelayanan Bayi Baru Lahir

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pelayanan bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir adalah Perbandingan Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses terhadap pelayanan bayi baru lahir yang tepat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun



J2 = Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun yang sama

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
| | |



Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah Perbandingan antara Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar, Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dengan Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah Kab. Purbalingga pada kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase ini mencerminkan sejauh mana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita memenuhi standar yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang

Periodesasi

Kesehatan (SPM) di Kabupaten

Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1+J2+J3}{J4} \times 100\%$$

Keterangan:

J1= Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

J2= Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

J3= Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar

J4= Jumlah Balita usia 12-59

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun ajaran dengan Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase ini mencerminkan sejauh mana anak usia pendidikan dasar memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun ajaran

J2 = Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah orang usia 15–59 tahun dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sistem kesehatan mampu memberikan layanan skrining kesehatan yang memadai dan sesuai standar kepada populasi usia 15-59 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang baik dalam menerapkan program pencegahan penyakit dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah orang usia 15–59 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

J2 = Jumlah orang usia 15–59 tahun dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Persentase yang tinggi dapat menunjukkan bahwa sistem kesehatan mampu memberikan layanan skrining kesehatan yang memadai dan sesuai standar pada populasi lanjut usia. Ini mencerminkan upaya dalam menerapkan program pencegahan, memantau penyakit kronis, dan mempromosikan kesehatan yang baik di antara populasi tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang
Kesehatan (SPM) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1= Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di Kab. Purbalingga dalam kurun waktu satu tahun

J2= Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah tersebut berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan mampu memberikan pemantauan dan pengelolaan kondisi hipertensi yang sesuai standar kepada penderita hipertensi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

J2 = Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah tersebut berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Ukuran

Percentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah tersebut berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan mampu memberikan pemantauan dan pengelolaan kondisi diabetes yang sesuai standar kepada penderita diabetes.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J₁ = Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
J₂ = Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di wilayah tersebut

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah ODGJ berat di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai standar mencakup pengobatan dan terapi yang tepat untuk ODGJ berat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ODGJ berat di Kab. Purbalingga yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

J2 = Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Persentase

%

Ya



Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Kesehatan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan pengobatan TBC yang sesuai standar telah diberikan kepada orang terduga TBC.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun

J2 = Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
| | |



Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah Perbandingan Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dengan Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat upaya yang baik dalam melakukan deteksi dini HIV pada individu yang berisiko terinfeksi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun



J2 = Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-1

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kunjungan ibu hamil K-1 adalah Kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan usia 1-12 minggu. Tujuan kunjungan ibu hamil K-1 adalah untuk memulai pemantauan kesehatan ibu hamil dan memastikan bahwa kehamilan berjalan dengan baik.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan akses yang baik terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil pada trimester pertama kehamilan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K1 di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu

J2 = jumlah seluruh ibu hamil pada wilayah dan tahun yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kunjungan ibu hamil K-4 adalah Kunjungan antenatal yang dilakukan paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi kontak sebagai berikut:

Minimal 1 kali pada trimester I (K1), usia kehamilan 1-12 minggu.

Minimal 1 kali pada trimester II (K2), usia kehamilan 13-24 minggu.

Minimal 2 kali pada trimester III, (K3-K4), usia kehamilan > 24 minggu.

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Unit Penyelenggara

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa ibu hamil menerima perawatan yang teratur dan terkoordinasi selama kehamilan

Kelompok Indikator

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu

J2 = Jumlah seluruh ibu hamil pada wilayah dan tahun yang sama

Ukuran

Percentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar wanita memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan maternal dan dapat memperoleh perawatan yang kompeten dan aman selama persalinan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah ibu bersalin di wilayah dan dalam kurun waktu yang sama



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
| | |



Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas adalah Cakupan Pelayanan masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar ibu setelah melahirkan mendapatkan pemantauan kesehatan yang memadai

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu

Periodesasi

dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh pelayanan nifas sesuai standar F1/KF Lengkap di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah seluruh ibu nifas di wilayah dan dalam kurun waktu yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan pelayanan ibu nifas mendapat Vitamin A adalah Ibu yang baru melahirkan atau nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A 200.000 SI sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A melalui ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar ibu nifas mendapatkan suplementasi Vitamin A untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu

Periodesasi

dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu nifas mendapatkan vitamin A di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah seluruh ibu nifas di wilayah dan dalam kurun waktu yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Komplikasi kebidanan adalah Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Puskesmas, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK)

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus komplikasi kebidanan berhasil terdeteksi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Hal ini mencerminkan akses yang baik terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis yang terlatih, serta jaringan rujukan yang baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = perkiraan jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

wilayah kerja dan kurun waktu yang sama

Persentase

%

Ya



Cakupan Komplikasi Neonatal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Komplikasi neonatal adalah Neonatal dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr), sindrom gangguan pernafasan, kelainan kongenital

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar bayi yang mengalami komplikasi neonatal berhasil terdeteksi secara dini dan mendapatkan penanganan medis yang tepat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah komplikasi pada neonatus pada wilayah dan kurun waktu tertentu



| | |
|-------------------------------------|--|
| | J2 = 15% dari jumlah bayi lahir hidup pada wilayah dan kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan kunjungan neonatal (KN1) adalah Cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada usia 6 jam - 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Kesehatan

Interpretasi

Cakupan yang tinggi menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perawatan kesehatan yang memadai kepada neonatus.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah neonatus yang mendapat pelayanan sesuai standar pada 6 - 48 jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah seluruh sasaran lahir hidup di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Kunjungan Neonatal Tiga Kali (KN LENGKAP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kunjungan Neonatal Lengkap adalah Pelayanan kunjungan neonatal lengkap, minimal 3 kali yaitu 1 kali pada usia 6 - 48 jam, 1 kali pada 3 - 7 hari, dan 1 kali pada 8 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan menggunakan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) di satu wilayah kerja

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Cakupan yang tinggi menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perawatan yang berkelanjutan kepada neonatus.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kunjungan neonatal sesuai dengan standar, minimal 3 kali yaitu pada usia 6-48 jam,1 kali pada 3-7 hari,dan 1 kali pada 8-28 hari di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah seluruh bayi lahir

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pelayanan kesehatan bayi adalah Pelayanan kesehatan neonatal dasar yang meliputi tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI dini dan eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, kulit dan pemberian imunisasi, pemberian vitamin K, manajemen terpadu balita muda (MTBM) dan konseling untuk ibunya tentang perawatan neonatus di rumah dengan menggunakan buku KIA

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi mencerminkan adanya pengawasan dan pemantauan kesehatan bayi secara rutin.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi (umur 29 hari-11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali umur 3-5 bulan, 1 kali



umur 6 bulan,dan 1 kali umur 9-11 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah seluruh bayi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Pelayanan Imunisasi Bayi (Universal Child Immunization/ UCI)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pelayanan imunisasi bayi adalah Suatu keadaan tercapainya pemberian imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Cakupan yang tinggi menunjukkan adanya upaya yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit melalui imunisasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di satu wilayah tertentu selama satu periode

J2 = Jumlah surviving infant pada wilayah dan periode yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Bayi Mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah Proses menyusu yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam
Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin tinggi cakupan IMD maka akan meningkatkan capaian asi eksklusif dan dapat menurunkan kasus kematian bayi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Bayi di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi baru lahir hidup
yang mendapat IMD

J2 = Jumlah seluruh bayi baru lahir
hidup

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Persentase
%

Ya



Cakupan Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bayi mendapatkan ASI Eksklusif adalah Bayi yang sampai usia 6 bulan yang hanya diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral sejak lahir.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase cakupan bayi mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Semakin tinggi cakupan bayi mendapat ASI eksklusif dapat membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi khususnya neonatal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi usia 6 bulan

mendapat ASI eksklusif

J2 = Jumlah bayi usia 6 bulan

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Trend BBLR

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Trend BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) adalah Kecenderungan bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Trend BBLR sering digunakan sebagai indikator kesehatan ibu dan bayi serta mencerminkan tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan BBLR dalam suatu populasi atau wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.5 kg

J2 = Jumlah seluruh kelahiran hidup

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bayi dengan BBLR

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah bayi dengan BBLR adalah Banyaknya bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.5 kg.

Unit Penyelengara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah bayi dengan BBLR dapat memberikan gambaran tentang tingkat prevalensi BBLR dalam suatu populasi pada periode tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg

Ukuran

Jumlah

Satuan

bayi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah balita adalah Jumlah anak yang berusia 0-59 bulan dalam kurun waktu tertentu

Unit Penyelengara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah balita dapat mencerminkan tingkat kelahiran dan pertumbuhan populasi di suatu daerah. Jika jumlah balita meningkat, hal ini dapat menunjukkan adanya peningkatan kelahiran atau migrasi penduduk ke daerah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah balita usia 0-59 bulan dalam kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

balita

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Balita Gizi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Balita gizi buruk adalah Anak usia 0-59 bulan dengan keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan Z Score berdasarkan BB/PB atau BB/TB (Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan) kurang dari sama dengan -3SD (Standar Deviasi) baku WHO.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah balita gizi buruk yang tinggi mengindikasikan bahwa banyak balita mengalami kekurangan nutrisi yang memadai untuk tumbuh dan berkembang secara sehat secara singkat dan kronis (jangka panjang)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah balita gizi buruk ($<=-3SD$ berdasarkan BB/TB atau BB/PB) usia 0-59 bulan dalam kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

balita

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Prevalensi Balita Gizi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelengara

Kelompok Indikator

Interpretasi

Prevalensi balita gizi buruk adalah Perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah total balita Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Prevalensi balita gizi buruk merupakan indikator penting dalam pemantauan status gizi dan kesehatan anak-anak. Angka prevalensi yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam asupan gizi dan perawatan kesehatan pada populasi balita tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah balita gizi buruk

J2 = Jumlah total balita

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Balita Gizi Kurang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Balita gizi kurang adalah Anak usia 0-59 bulan dengan keadaan kurang zat gizi tingkat ringan yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan Z Score berdasarkan BB/PB atau BB/TB (Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan) berada pada <-2 SD sampai dengan >-3 SD baku WHO.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah balita gizi kurang yang banyak mengindikasikan bahwa banyak balita yang mengalami kekurangan nutrisi pada waktu tertentu

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Manual (Jumlah balita gizi kurang).

Batas gizi kurang pada balita yaitu antara <-2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO. berdasarkan BB/TB atau BB/PB

Ukuran

Jumlah

Satuan

balita

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Balita Gizi Kurang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase balita gizi kurang adalah Perbandingan antara jumlah balita gizi kurang dengan jumlah total balita Dinas Kesehatan Aspek Kesehatan Prevalensi balita gizi kurang yang tinggi menunjukkan asupan nutrisi yang kurang

Unit Penyelengara
Kelompok Indikator

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Trend BBLR dan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah balita gizi kurang

J2 = Jumlah total balita

Ukuran

Persentase

Satuan

balita

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Prevalensi Stunting

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Stunting adalah Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.

Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

1. Sangat pendek : Z Score $< -3,0$
2. Pendek : Zscore $\geq - 3,0$ s/d Zscore $< -2,0$.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Prevalensi stunting merupakan indikator penting dalam pemantauan status gizi dan kesehatan anak-anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi jangka panjang. Angka prevalensi yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam asupan gizi dan perawatan kesehatan pada populasi balita tersebut dalam jangka yang panjang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah balita pendek dan sangat pendek

J2 = Jumlah balita yang diukur pada waktu tertentu

Ukuran

Percentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Penemuan Kasus Baru TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kasus TB (Tuberkulosis) adalah Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jika angka penemuan kasus baru TB tinggi, maka dapat mengindikasikan tingkat penyebaran penyakit yang luas di populasi tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa TB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan perlu adanya tindakan pengendalian dan pencegahan yang lebih intensif.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular

(Morbiditas) di Kabupaten

Purbalingga

Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Penemuan kasus baru TB

J2 = Perkiraan Jumlah penderita baru

TB

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Case Notification Rate (CNR/Angka Penemuan Kasus TB ternotifikasi) TB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Case Notification Rate (CNR/Angka penemuan kasus TB ternotifikasi) TB adalah Angka yang menunjukkan jumlah pasien TB yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk pada satu periode di suatu wilayah tertentu

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jika angka penemuan kasus TB ternotifikasi tinggi, maka menunjukkan tingginya angka kejadian TB dalam populasi tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati

J2 = Perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus HIV/AIDS

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

HIV/AIDS adalah HIV/AIDS didefinisikan sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah kasus HIV/AIDS dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana penyebaran virus HIV terjadi di suatu populasi atau wilayah. Jika jumlah kasus HIV/AIDS meningkat, ini bisa menandakan adanya peningkatan risiko dan penyebaran infeksi HIV dalam masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Pendataan Jumlah kasus HIV/AIDS
Jumlah
kasus
Ya



Jumlah Kasus HIV

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah Banyaknya kasus yang diakibatkan oleh sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kasus HIV menunjukkan jumlah individu yang telah didiagnosis menderita infeksi HIV dalam suatu populasi atau daerah pada periode waktu tertentu. Angka ini memberikan gambaran tentang prevalensi dan penyebaran HIV di suatu wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah Kasus HIV

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus AIDS

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kasus AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah Banyaknya kasus dari sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Kesehatan
Jumlah kasus AIDS mencerminkan tingkat keparahan dan dampak HIV pada individu yang terinfeksi. AIDS merupakan tahap akhir infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh telah terganggu secara signifikan. Jika jumlah kasus AIDS tinggi, ini dapat mengindikasikan bahwa infeksi HIV telah mencapai tahap yang lebih lanjut dan mengancam kesehatan individu yang terinfeksi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular

Periodesasi

(Morbiditas) di Kabupaten

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah kasus AIDS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus Pneumonia Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kasus pneumonia balita adalah Banyaknya kasus balita yang mengalami batuk dan atau kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas, usia 0-<2 bulan ≥ 60 kali/menit, usia 2-<12 bulan ≥ 50 kali/menit, usia 12-59 bulan ≥ 40 kali/menit

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan

Interpretasi

Aspek Kesehatan

Jumlah kasus pneumonia balita menunjukkan jumlah balita yang telah didiagnosis menderita infeksi pneumonia dalam suatu populasi atau daerah pada periode waktu tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah kasus pneumonia
balita.

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Kasus Pneumonia Balita

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase kasus pneumonia balita adalah Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani dalam kurun waktu tertentu per jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penderita pneumonia balita yang ditangani semakin rendah risiko kematian balita akibat pneumonia pada balita

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani dalam kurun waktu tertentu

J2 = jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Persentase
kasus
Ya



Jumlah Kasus Baru Kusta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kasus kusta adalah Kasus kusta didefinisikan sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium leprae*

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan

Interpretasi

Aspek Kesehatan

Jumlah kasus baru kusta mencerminkan tingkat penyebaran penyakit kusta di suatu populasi. Semakin tinggi jumlah kasus baru, semakin luas penyebaran penyakit kusta dalam populasi tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kasus kusta yang ditemukan
dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Acute Flaccid Paralysis (AFP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

AFP adalah Kelumpuhan yang sifatnya Flaccid (layuh) pada anak usia kurang dari 15 tahun, proses terjadi kelumpuhan secara akut (<14 hari), serta bukan disebabkan oleh ruda paksa

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Surveilans AFP adekuat yang didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan virus Polio pada spesimen tinja penderita dalam rangka mendukung program Eradikasi Polio di Indonesia

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$NPAFP = \frac{J_1}{J_2} \times 100.000$$

NPAFP = Non Polio AFP Rate (NPAFP Rate)

Keterangan:

J1 = Jumlah kasus Non Polio AFP

J2 = Jumlah penduduk usia < 15 tahun di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun

Ukuran

Rate

Satuan

per 100.000 penduduk < 15 tahun

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus AFP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kasus AFP adalah Banyaknya kasus yang diakibatkan oleh kelumpuhan yang terjadi secara mendadak atau akut (<14 hari) pada anak usia < 15 tahun, serta bukan disebabkan oleh ruda paksa

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kasus AFP yang ditemukan mencerminkan adanya surveilans AFP yang adekuat di suatu wilayah dalam rangka mendukung program Eradikasi Polio di Indonesia

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kasus AFP yang ditemukan dalam satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Incidence Rate (IR) DBD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Incidence Rate (IR) DBD (Demam Berdarah Dengue) adalah Frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit DBD dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu (umumnya 1 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit DBD tersebut

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

IR DBD mencerminkan tingkat penyebaran penyakit DBD dalam populasi. Semakin tinggi IR DBD, semakin luas penyebaran penyakit DBD dalam populasi tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular

(Morbiditas) di Kabupaten

Purbalingga

Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita DBD

J2 = Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama

Ukuran

Proporsi

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Case Fatality Rate (CFR) DBD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Case Fatality Rate (CFR) DBD adalah Persentase orang yang meninggal karena penyakit DBD terhadap orang yang mengalami penyakit tersebut

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
CFR DBD mencerminkan tingkat keparahan penyakit DBD dalam populasi yang terinfeksi. Semakin tinggi CFR DBD, semakin tinggi risiko kematian bagi individu yang terdiagnosis dengan DBD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita DBD yang meninggal dunia

J2 = Jumlah penderita DBD pada tahun yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus DBD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kasus DBD adalah Kasus DBD didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kasus DBD menunjukkan jumlah individu yang terinfeksi penyakit DBD (Dengue Hemorrhagic Fever) dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kasus penderita DBD dalam 100.000 penduduk

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Annual Parasite Incidence (API) Malaria

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Annual Parasite Incidence (API) Malaria adalah Angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko malaria dalam satu tahun

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan

Interpretasi

Aspek Kesehatan

Semakin tinggi nilai API maka semakin tinggi risiko penularan malaria

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 1000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita positif malaria

J2 = Jumlah penduduk berisiko pada
wilayah dan kurun waktu yang sama

Ukuran

Proporsi

Satuan

per 1.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Case Fatality Rate (CFR)/ Tingkat Kematian COVID-19

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Case Fatality Rate (CFR)/ tingkat kematian Covid-19 adalah Persentase orang yang meninggal karena penyakit Covid-19 terhadap orang yang mengalami penyakit tersebut

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

CFR Covid-19 mencerminkan tingkat keparahan penyakit Covid-19 dalam populasi yang terinfeksi. Semakin tinggi CFR Covid-19, semakin tinggi risiko kematian bagi individu yang terdiagnosis dengan Covid-19.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penderita Covid-19 yang meninggal dunia

J2 = Jumlah penderita Covid-19 pada tahun yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Case Recovery Rate (CRR)/ Tingkat Kematian COVID-19

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Case Recovery Rate (CRR)/ tingkat kematian Covid-19 adalah Persentase orang yang berhasil sembuh dari penyakit Covid-19 terhadap orang yang mengalami penyakit tersebut

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
CRR Covid-19 mencerminkan tingkat kesembuhan individu yang terinfeksi Covid-19 dalam populasi. Semakin tinggi CRR Covid-19, semakin tinggi tingkat kesembuhan dari infeksi Covid-19 dalam populasi tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Menular
(Morbiditas) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah pasien COVID-19 yang sembuh

J2 = Jumlah total pasien yang dikonfirmasi covid-19

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum



Jumlah Kasus Diabetes Melitus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Diabetes Melitus adalah Suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah kasus Diabetes Mellitus menunjukkan jumlah individu yang didiagnosis dengan kondisi medis Diabetes Mellitus dalam suatu populasi pada suatu periode waktu tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kondisi Penyakit Tidak Menular Di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Jumlah penderita DM ditemukan
dalam suatu wilayah
Jumlah
orang
Ya



Jumlah Penderita Hipertensi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Hipertensi adalah Peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah penderita hipertensi menunjukkan jumlah individu yang didiagnosis dengan kondisi medis hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, dalam suatu populasi pada suatu periode waktu tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kondisi Penyakit Tidak Menular Di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Jumlah penderita hipertensi
ditemukan dalam suatu wilayah
Jumlah
orang
Ya



Jumlah Kasus Kanker

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kasus kanker adalah Penyakit yang ditandai dengan adanya sel yang abnormal yang bisa berkembang tanpa terkendali dan memiliki kemampuan untuk menyerang dan berpindah antar sel dan jaringan tubuh.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kasus kanker menunjukkan angka atau jumlah individu yang didiagnosis dengan kanker dalam suatu populasi atau wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. Jumlah kasus kanker dapat digunakan sebagai indikator untuk memahami tingkat kejadian kanker dalam populasi dan memantau tren kanker dari waktu ke waktu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Tidak Menular Di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penderita kanker yang ditemukan dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penderita ODGJ

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) adalah Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah penderita ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) menunjukkan angka atau jumlah individu yang menderita gangguan jiwa dalam suatu populasi atau wilayah tertentu pada periode waktu tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Penyakit Tidak Menular Di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penderita ODGJ ditemukan
dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sarana Air Minum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sarana air minum adalah Bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampungan, bak penyulur, bak penyaring, pipa saluran air, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah sarana air minum mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap air minum yang memadai. Semakin banyak sarana air minum yang tersedia, semakin besar peluang bagi penduduk untuk mendapatkan akses yang mudah dan aman terhadap air minum yang berkualitas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah sarana air minum yang ada di wilayah dan waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

bah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Jamban Komunal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jamban komunal adalah Suatu bentuk bangunan jamban yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran manusia dalam satu tempat (septic tank) bersama.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin banyak jumlah jamban komunal, maka semakin tinggi peluang masyarakat untuk mengakses sarana sanitasi yang layak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah jamban komunal yang ada di wilayah dan waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

bah

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Keluarga Pengguna Jamban Komunal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah keluarga pengguna jamban komunal adalah Banyaknya keluarga yang menggunakan jamban komunal

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan

Interpretasi

Aspek Kesehatan

Jumlah keluarga pengguna jamban komunal menunjukkan jumlah KK di wilayah tertentu yang dapat menggunakan jamban komunal di kurun waktu yang sama

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah KK di wilayah dan kurun waktu yang sama yang menggunakan jamban komunal

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) adalah Sarana jamban dalam bentuk lubang jamban tertutup (plengsengan, cubluk, atau leher angsa yang berakhir dengan sumur resapan saja) harus memiliki jarak lebih dari 10 m dan tidak mencemari sumber air dan tanah. (cubluk)

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) menunjukkan jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) yang ada di wilayah tertentu dalam waktu yang sama.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) yang ada di wilayah dan waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Keluarga Pengguna Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) adalah Banyaknya keluarga yang menggunakan JJSP

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) menunjukkan jumlah KK di wilayah tertentu yang menggunakan Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) dalam kurun waktu yang sama.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah KK di wilayah dan kurun waktu yang sama yang menggunakan Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP)

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jamban Sehat Permanen (JSP) adalah Sarana jamban leher angsa yang dipakai secara individu dengan pembuangan akhir septic tank, baik individu maupun septic tank bersama (komunal) ditambah sumur resapan atau menyambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) menunjukkan jumlah Jamban Sehat Permanen (JSP) di wilayah tertentu dalam waktu yang sama.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Sarana Air Minum dan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Jamban Sehat Semi Permanen (JJSP) yang ada di wilayah dan waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

buan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Keluarga Pengguna Jamban Sehat Permanen (JSP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Permanen (JSP) adalah Banyaknya keluarga yang menggunakan Jamban Sehat Permanen (JSP)

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Permanen (JSP) menunjukkan jumlah KK di wilayah tertentu yang menggunakan Jamban Sehat Permanen (JSP) dalam kurun waktu yang sama.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah keluarga pengguna Jamban Sehat Permanen (JSP)

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Terdapat 5 pilar STBM yaitu:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan/ Stop BABS
2. Cuci Tangan Pakai Sabun/ CTPS
3. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/ PAM-RT
4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
5. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Kesehatan

Semakin banyak desa yang melaksanakan STBM, semakin luas dampak yang dapat dicapai dalam meningkatkan akses dan praktik sanitasi yang baik, serta memperbaiki kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM yang ada di wilayah dan waktu yang sama |
| Ukuran Satuan | Jumlah desa |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase desa yang melaksanakan STBM adalah Perbandingan antara jumlah desa yang melaksanakan STBM dengan Jumlah total desa/kelurahan

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase desa yang melaksanakan STBM dapat memberikan indikasi tentang progres dan tingkat keberhasilan program sanitasi di suatu daerah. Semakin tinggi persentase desa yang melaksanakan STBM, semakin besar upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sanitasi di tingkat desa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah desa yang melaksanakan STBM

J2 = Jumlah total desa/kelurahan

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Desa STOP BABS/ODF

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) / ODF (Open Defecation Free) adalah Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah desa stop BABS/ODF menunjukkan jumlah desa yang masyarakatnya tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Stop BABS di wilayah dan waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum



Persentase Desa Stop BABS/ODF

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase desa stop BABS/ODF adalah Perbandingan antara jumlah desa stop BABS/ODF dengan Jumlah total desa/kelurahan

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase desa stop BABS/ODF maka semakin tinggi akses masyarakat terhadap sanitasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah desa stop BABS/ODF

J2 = Jumlah total desa/kelurahan

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Desa Sehat Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa sehat mandiri adalah Desa yang secara mandiri mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakatnya, serta antisipatif dan responsif terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan dampak pada gangguan kesehatan masyarakat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah Desa Siaga aktif menunjukkan bahwa jumlah desa yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) /ODF (Open Defecation Free) dan Desa Sehat Mandiri di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah desa sehat mandiri yang ada dalam suatu wilayah dan waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Desa Sehat Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase desa sehat mandiri adalah Perbandingan antara jumlah desa sehat mandiri dengan Jumlah total desa/kelurahan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin tinggi persentase desa sehat mandiri maka menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan desa untuk mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah desa sehat mandiri

J2 = Jumlah total desa/kelurahan

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah puskesmas menunjukkan seberapa banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersedia dalam suatu wilayah. Semakin banyak puskesmas yang tersedia, maka semakin luas cakupan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah Puskesmas

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Puskesmas Rawat Inap

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah puskesmas rawat inap dapat mencerminkan upaya untuk memperkuat dan memperluas layanan perawatan medis di tingkat primer. Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dapat membantu mengurangi beban rumah sakit yang mungkin terlalu padat dengan pasien, serta meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan perawatan medis bagi masyarakat di wilayah yang terjangkau oleh puskesmas tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan Jumlah Puskesmas Rawat Inap |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah puskesmas non rawat inap dapat mencerminkan tingkat ketersediaan layanan kesehatan dasar di suatu wilayah. Semakin banyak puskesmas non rawat inap yang tersedia, maka semakin luas cakupan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat di tingkat primer.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap.

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Puskesmas Mampu Bersalin

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas Mampu Bersalin adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mampu menyediakan perawatan prenatal (sebelum melahirkan), perawatan natal (selama melahirkan), dan perawatan postnatal (setelah melahirkan).

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah puskesmas mampu bersalin dapat mencerminkan tingkat ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan perawatan khusus terkait persalinan. Semakin banyak puskesmas mampu bersalin yang tersedia, semakin luas cakupan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada ibu hamil dan calon ibu di tingkat primer.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah Puskesmas Mampu Bersalin.

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Puskesmas PONED

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Essential/ Emergency Dasar) adalah Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader di masyarakat, Bidan di Desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS/RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin banyak jumlah Puskesmas PONED semakin tercover layanan kesehatan dasar ibu dan anak

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Pendataan Jumlah Puskesmas Ponед
Jumlah
unit
Ya



Jumlah Puskesmas Terakreditasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas Terakreditasi adalah Puskesmas yang memiliki pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah memenuhi standar akreditasi.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi grade akreditasi puskesmas semakin tinggi mutu pelayanan puskesmas

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah Puskesmas Terakreditasi

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Puskesmas Pembantu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas Pembantu adalah Jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Adanya puskesmas pembantu di wilayah puskesmas memudahkan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Jumlah Puskesmas Pembantu

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah RS (Total)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rumah Sakit (Total) adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin banyak rumah sakit masyarakat semakin banyak pilihan untuk pelayanan kesehatan rujukan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah RS Umum Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RS Umum Daerah adalah Institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Beda kelas RSUD menjamin jenjang rujukan yang lebih terprogram

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rumah sakit Umum Daerah dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah RS Swasta Tipe C

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RS Swasta Tipe C adalah Rumah sakit milik swasta yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit empat spesialis dasar dan empat penunjang medik spesialis.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin banyak rumah sakit swasta, masyarakat mempunyai banyak pilihan pelayanan kesehatan rujukan selain Rumah sakit umum daerah / pemerintah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rumah Sakit Swasta Tipe C dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah RS Swasta Tipe D

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RS Swasta Tipe D adalah Rumah sakit milik swasta yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit dua spesialis dasar.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Dengan adanya rumah sakit swasta tipe D bisa memfasilitasi pelaku usaha dibidang rumah sakit untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan bertahap sesuai kemampuan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rumah Sakit Swasta Tipe D
dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah RS Ponek

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rumah Sakit Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Essential/Emergency Komprehensif) adalah Rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Dengan adanya rumah sakit Ponek bisa sebagai tempat rujukan kegawatdaruratan ibu dan anak sehingga mengurangi angka kematian ibu dan anak

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah RS Terakreditasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RS Terakreditasi adalah Rumah sakit yang memiliki pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah memenuhi standar akreditasi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Semakin tinggi grade akreditasi rumah sakit semakin tinggi mutu pelayanan suatu rumah sakit

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Posyandu KB-Kesehatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Posyandu KB-Kesehatan adalah Posyandu dengan sasaran KB-Kesehatan : Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu hamil dan balita serta masyarakat umum. Kegiatannya meliputi : pelayanan Keluarga Berencana (KB), pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), imunisasi gizi dan pencegahan diare serta kegiatan lain sebagai upaya pengembangan posyandu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan

Dalam kegiatan posyandu tersebut dilaksanakan pelayanan KB bagi sasaran posyandu (PUS). Jumlah Posyandu KB-Kesehatan yang memadai dapat membantu dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah seluruh posyandu KB Kesehatan yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Posyandu Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah posyandu mandiri yang ada dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat telah berhasil dalam membangun dan memelihara posyandu sebagai lembaga pelayanan kesehatan mandiri di tingkat komunitas. Jumlah posyandu mandiri yang lebih banyak menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta memperkuat sistem kesehatan di wilayah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah seluruh posyandu Mandiri yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Posyandu Purnama

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja posyandu.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Dengan adanya Posyandu Purnama, meskipun dengan peserta yang terbatas, diharapkan dapat tercapai peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, konseling, dan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan, pertumbuhan anak, imunisasi, dan nutrisi. Ini juga dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Posyandu dan secara bertahap meningkatkan jumlah peserta di masa mendatang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah seluruh posyandu Purnama yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Posyandu Madya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan

Interpretasi

Aspek Kesehatan

Semakin sedikit posyandu madya menunjukkan kondisi posyandu di Kabupaten Purbalingga sudah banyak di atas strata madya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah seluruh posyandu Madya yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Posyandu Pratama

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari lima orang.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin sedikit posyandu pratama menunjukkan kondisi posyandu di Kabupaten Purbalingga sudah banyak di atas strata pratama.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah seluruh posyandu Pratama yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) adalah Suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis puskesmas.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin banyak PKD maka semakin memudahkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah seluruh Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) PTM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah Suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM secara rutin dan berkesinambungan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah posbindu menunjukkan seberapa banyak UKBM yang tersedia dalam suatu wilayah. Semakin banyak posbindu yang tersedia, maka semakin luas cakupan deteksi dini yang dapat diberikan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Pos Pembinaan terpadu (Posbindu) PTM

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah puskesmas menunjukkan seberapa banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersedia dalam suatu wilayah. Semakin banyak puskesmas yang tersedia, maka semakin luas cakupan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Puskesmas baik rawat jalan maupun rawat inap dalam suatu wilayah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk adalah Perbandingan antara jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin rendah rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk, maka semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak puskesmas yang tersedia untuk melayani kebutuhan kesehatan penduduk di daerah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah puskesmas

J2 = Jumlah penduduk

Ukuran

Rasio

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Total Kunjungan Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah total kunjungan puskesmas adalah Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di suatu puskesmas pada jangka waktu tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah total kunjungan puskesmas menunjukkan seberapa banyak penduduk yang mencari pelayanan kesehatan di puskesmas dalam periode waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan dan permintaan layanan kesehatan di suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kunjungan Puskesmas di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dan swasta dalam satu tahun tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kunjungan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kunjungan rawat jalan puskesmas adalah Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu. Kunjungan rawat jalan puskesmas termasuk kunjungan ke jaringan puskesmas, dalam gedung maupun luar gedung (puskesmas keliling, puskesmas pembantu, bidan desa, pemeriksaan anak sekolah, dsb).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah kunjungan rawat jalan puskesmas menunjukkan seberapa banyak pasien yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan di puskesmas dalam suatu periode waktu tertentu. Data ini memberikan informasi tentang tingkat penggunaan dan permintaan layanan kesehatan di tingkat primer.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Jumlah Kunjungan Puskesmas di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dan swasta dalam satu tahun tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kunjungan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kunjungan Rawat Inap Puskesmas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kunjungan rawat inap puskesmas adalah Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kunjungan rawat inap puskesmas menunjukkan seberapa banyak pasien yang membutuhkan perawatan rawat inap di puskesmas dalam suatu periode waktu tertentu. Data ini memberikan informasi tentang tingkat penggunaan dan permintaan layanan rawat inap di tingkat primer.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kunjungan Puskesmas di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dan swasta dalam satu tahun tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kunjungan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Total Kunjungan Rumah Sakit

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah total kunjungan rumah sakit adalah Jumlah total kunjungan rumah sakit termasuk RS Swasta

Unit Penyelengara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah total kunjungan rumah sakit menunjukkan seberapa banyak penduduk yang mencari pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam periode waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan dan permintaan layanan kesehatan di suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kunjungan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kunjungan baik rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit milik pemerintah dan swasta dalam satu tahun tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kunjungan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kunjungan rawat jalan rumah sakit adalah Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kunjungan rawat jalan rumah sakit menunjukkan seberapa banyak pasien yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan di rumah sakit dalam suatu periode waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat penggunaan pelayanan rawat jalan di rumah sakit.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kunjungan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kunjungan rawat jalan di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta dalam satu tahun tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kunjungan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kunjungan Rawat Inap Rumah Sakit

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kunjungan rawat inap rumah sakit adalah Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kunjungan rawat inap rumah sakit menunjukkan seberapa banyak pasien yang membutuhkan perawatan rawat inap di rumah sakit dalam suatu periode waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat penggunaan dan permintaan layanan rawat inap di rumah sakit.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kunjungan Puskesmas di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kunjungan rawat inap di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta dalam satu tahun tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

kunjungan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Net Death Rate (NDR)/ Angka Kematian >= 48 Jam Setelah Dirawat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Net Death Rate (NDR)/ Angka kematian >= 48 jam setelah dirawat adalah Angka kematian pasien dalam waktu 48 jam atau lebih setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Nilai Net Death Rate sebesar 12,5 artinya angka kematian pasien dalam waktu 48 jam atau lebih setelah dirawat yakni 12 - 13 orang untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Penurunan NDR dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam manajemen pasien, perawatan yang lebih baik, atau penggunaan intervensi medis yang efektif.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 1000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah pasien meninggal >= 48 jam setelah dirawat

J2 = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

Proporsi

per 1.000 pasien keluar

Ukuran

Ya

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum



Gross Death Rate (GDR)/ Angka Kematian Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Gross Death Rate (GDR)/ Angka kematian umum adalah Angka kematian umum untuk setiap 1.000 pasien keluar

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Nilai Gross Death Rate sebesar 34,5 artinya angka kematian pasien yakni 34 - 35 orang per 1.000 pasien keluar. Penurunan GDR dapat menandakan adanya perbaikan dalam kondisi kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan dalam populasi tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 1000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah pasien meninggal seluruhnya

J2 = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

Ukuran

Proporsi

Satuan

per 1.000 pasien keluar

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Bed Occupation Rate (BOR)/ Persentase Pemakaian Tempat Tidur

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Bed Occupation Rate (BOR)/ Persentase pemakaian tempat tidur adalah Persentase pemakaian tempat tidur (khusus untuk RS) pada satu satuan waktu tertentu |
| Unit Penyelenggara | Dinas Kesehatan |
| Kelompok Indikator | Aspek Kesehatan |
| Interpretasi | BOR memberikan gambaran tentang sejauh mana kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit digunakan. Nilai Bed Occupancy Rate sebesar 69% artinya pemakaian tempat tidur dalam satu tahun sebesar 69% |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | $\frac{J1}{J2} \times 100\%$ |
| | Keterangan: J1 = Jumlah hari perawatan J2 = (Jumlah tempat tidur * Jumlah hari dalam setahun) |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Length Of Stay (LOS)/ Angka Rata-Rata Lamanya Pasien Dirawat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Length Of Stay (LOS)/ Angka rata-rata lamanya pasien dirawat adalah Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Nilai Average Length of Stay sebesar 3 artinya lama rawat seorang pasien rata-rata 3 hari

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah lama dirawat dibagi dengan Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

Ukuran

Rata-rata

Satuan

hari

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Turn Over Interval (TOI)/ Angka Rata-Rata Tempat Tidur Tidak Terisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Turn Over Interval (TOI)/ Angka rata-rata tempat tidur tidak terisi adalah Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Nilai Turn Over Interval sebesar 1,4 artinya tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya rata-rata 1 -2 hari

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1 - J2}{J3}$$

Keterangan:

J1 = (Jumlah tempat tidur * Jumlah hari dalam setahun)

J2 = Jumlah hari perawatan

J3 = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Rata-rata
hari

Ya



Bed Turn Over (BTO)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bed Turn Over (BTO)/ Tingkat penggunaan tempat tidur adalah Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Nilai Bed Turn Over sebesar 81,8 artinya pemakaian tempat tidur sebanyak 81 - 82 kali dalam satu tahun

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2}$$

Keterangan:

J1 = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

J2 = Jumlah tempat tidur

Ukuran

Frekuensi

Satuan

kali

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah tempat tidur rumah sakit adalah Jumlah tempat tidur di ruang rawat inap dan tempat tidur di ruang pasca persalinan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah tempat tidur rumah sakit dapat mencerminkan ketersediaan perawatan medis di suatu daerah. Jika jumlah tempat tidur terbatas, pasien mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan dapat mempengaruhi aksesibilitas dan waktu tunggu untuk pelayanan kesehatan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kinerja Sarana Pelayanan Kesehatan

Periodesasi

di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan RS Daerah dan RS Swasta

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Dokter Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dokter Umum adalah Tenaga kesehatan profesional yang berlatar belakang pendidikan kedokteran dan memberikan pelayanan kesehatan, misal membuat diagnosis medis dan penanganannya

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah dokter umum mencerminkan ketersediaan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah. Jika jumlah dokter umum cukup, maka masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan perawatan kesehatan dasar dan mendasar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Dokter di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Dokter Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Dokter Umum adalah Perbandingan antara tenaga dokter umum dengan jumlah warga penduduk per 100.000

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jika rasio dokter umum tinggi, artinya ada lebih banyak dokter umum yang tersedia untuk melayani masyarakat, sehingga meningkatkan aksesibilitas perawatan dan potensial untuk mendiagnosis dan mengobati kondisi kesehatan umum.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Dokter di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100.000$$

Keterangan:

J_1 = Jumlah dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah

J_2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama

Ukuran

Rasio

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Dokter Spesialis adalah Jumlah dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas ,rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah dokter spesialis mencerminkan ketersediaan tenaga medis yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu seperti bedah, kardiologi, onkologi, dan sebagainya. Jika jumlah dokter spesialis cukup, maka masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan perawatan yang lebih spesifik dan terfokus sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Dokter di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas,rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Dokter Spesialis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Dokter Spesialis adalah Perbandingan antara tenaga dokter spesialis dengan jumlah warga penduduk per 100.000

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jika rasio dokter spesialis tinggi, artinya ada lebih banyak dokter spesialis yang tersedia untuk melayani masyarakat, sehingga meningkatkan aksesibilitas perawatan spesialis.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Dokter di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah

J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama

Ukuran

Rasio

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Dokter Gigi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Dokter Gigi adalah Jumlah dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah dokter gigi mencerminkan tingkat ketersediaan tenaga medis dalam bidang kedokteran gigi. Data ini memberikan gambaran tentang potensi pelayanan kesehatan gigi yang dapat diberikan kepada populasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Dokter di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Dokter Gigi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Dokter Gigi adalah Perbandingan antara tenaga dokter gigi dengan jumlah warga penduduk per 100.000

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jika rasio dokter gigi tinggi, artinya ada lebih banyak dokter gigi yang tersedia untuk melayani masyarakat, sehingga meningkatkan aksesibilitas perawatan gigi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Dokter di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah

J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama

Ukuran

Rasio

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perawat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perawat adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah perawat mencerminkan ketersediaan tenaga medis dalam bidang perawatan kesehatan. Data ini memberikan gambaran tentang potensi pelayanan perawat yang dapat diberikan kepada populasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Tenaga Paramedis di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Perawat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Perawat adalah Jumlah perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 100.000 penduduk

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio perawat, semakin besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap perawatan kesehatan yang diperlukan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah

J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama

Ukuran

Rasio

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bidan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bidan adalah Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jumlah bidan mencerminkan ketersediaan tenaga medis dalam bidang kebidanan. Data ini memberikan gambaran tentang potensi pelayanan bidan yang dapat diberikan kepada populasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Rasio Tenaga Paramedis di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Jumlah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Jumlah
orang

Ya



Rasio Bidan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Bidan adalah Jumlah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 100.000 penduduk

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio bidan, semakin besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap perawatan kesehatan ibu dan bayi yang diperlukan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah

J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama

Ukuran

Rasio

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tenaga Farmasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Tenaga Farmasi adalah Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan

Interpretasi

Aspek Kesehatan

Jumlah tenaga farmasi mencerminkan ketersediaan tenaga farmasi dalam memberikan pelayanan farmasi kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah tenaga farmasi yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Tenaga Farmasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Tenaga Farmasi adalah Jumlah tenaga farmasi yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 100.000 penduduk

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio tenaga farmasi, semakin besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan farmasi yang diperlukan, seperti konseling obat, pengelolaan stok obat, dan informasi tentang penggunaan obat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Tenaga Paramedis di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah tenaga farmasi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama

Ukuran

Rasio

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tenaga Gizi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga Gizi adalah Setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah tenaga gizi mencerminkan ketersediaan tenaga medis dalam bidang gizi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan gizi kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah tenaga farmasi yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Tenaga Gizi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Tenaga Gizi adalah Jumlah tenaga gizi yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 100.000 penduduk

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio tenaga gizi, semakin besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan gizi yang diperlukan, seperti penilaian gizi, konseling gizi, atau penyusunan program diet yang sesuai.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Tenaga Paramedis di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100.000$$

Keterangan:

J1 = Jumlah tenaga gizi yang memberikan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah

J2 = Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama

Ukuran

Rasio

Satuan

per 100.000 penduduk

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Penerima program jaminan kesehatan dari pemerintah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Kesehatan
Aspek Kesehatan
Jika ada banyak penduduk yang menjadi penerima JKN, maka ada kecenderungan bahwa akses ke pelayanan kesehatan menjadi lebih merata.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Persentase jumlah penduduk yang tercakup oleh program Jaminan Kesehatan Nasional

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar populasi daerah tersebut telah dijamin akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau. Ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mencapai kesetaraan dalam akses kesehatan bagi seluruh warga negara.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan

Periodesasi

Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah penduduk penerima JKN

J2 = Jumlah penduduk pada wilayah dan waktu yang sama

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Penerima Jaminan Kesehatan Di Luar JKN

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penerima Jaminan Kesehatan di luar JKN adalah Penerima jaminan kesehatan swasta (asuransi swasta) atau penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Kesehatan
Kesehatan

Interpretasi

Jumlah penerima jaminan kesehatan di luar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencerminkan upaya untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan dan variasi dalam kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh populasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk - Jumlah
penduduk penerima JKN

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Persentase Penerima Jaminan Kesehatan Di Luar JKN

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase penerima Jaminan Kesehatan di luar JKN adalah Persentase jumlah penduduk yang menerima jaminan kesehatan di luar JKN (menggunakan asuransi swasta atau belum mempunyai jaminan)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Kesehatan

Aspek Kesehatan

Persentase ini memberikan gambaran tentang sejauh mana populasi tercakup dalam program jaminan kesehatan lainnya yang ada di daerah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

100% - persentase peserta JKN

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (PBI APBN)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (PBI APBN) adalah Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh pemerintah melalui APBN

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar (PBI APBN) menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN PBI APBN di satu wilayah pada kurun waktu

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (PBI APBD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (PBI APBD) adalah Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar (PBI APBD) menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN PBI APBD di satu wilayah pada kurun waktu

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Penerima Upah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Penerima Upah) adalah Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Penerima Upah) menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN PPU di satu wilayah pada kurun waktu

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Bukan Penerima Upah)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Bukan Penerima Upah) adalah Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Pekerja Bukan Penerima Upah) menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN PBPU di satu wilayah pada kurun waktu

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Bukan Pekerja)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Bukan Pekerja) adalah Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar (Bukan Pekerja) menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada bukan pekerja

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN Bukan Pekerja di satu wilayah pada kurun waktu

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kelahiran

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Kelahiran adalah Banyaknya bayi lahir baik dalam kondisi hidup atau mati dalam waktu tertentu

Unit Penyelenggara

Dinas Kesehatan

Kelompok Indikator

Aspek Kesehatan

Interpretasi

Jumlah kelahiran yang tinggi dapat mengindikasikan adanya pertumbuhan populasi yang cepat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Jaminan Pemeliharaan

Periodesasi

Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Bayi Hidup + Bayi Mati tiap puskesmas

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Panjang jalan kabupaten

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang jalan kabupaten adalah Panjang jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten,dan jalan strategis kabupaten

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Panjang jalan kabupaten memberikan gambaran tentang potensi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dengan adanya jaringan jalan yang lebih luas, wilayah tersebut memiliki akses yang lebih baik ke pasar, layanan publik, pusat bisnis, dan tempat-tempat penting lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi potensi investasi, perdagangan, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur lebih lanjut di kabupaten tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Berdasarkan SK Bupati Purbalingga No. 621/329 Tahun 2016 tentang Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang jalan kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jalan kondisi baik adalah Jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik.

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Panjang jalan dengan kondisi baik menggambarkan adanya infrastruktur transportasi yang terpelihara dengan baik dan dapat memberikan akses yang nyaman, aman, dan efisien bagi pengguna jalan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase panjang jalan kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase panjang jalan kondisi baik adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi baik dengan panjang jalan kabupaten

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika persentase panjang jalan kondisi baik tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau jaringan tersebut dalam kondisi yang baik. Kondisi baik dapat mencakup aspek-aspek seperti permukaan jalan yang rata, bebas dari kerusakan serius, sinyal lalu lintas yang berfungsi dengan baik, marka jalan yang jelas, dan infrastruktur pendukung lainnya dalam keadaan optimal

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus
Penghitungan

$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

Ukuran

Percentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Ya



Panjang jalan kondisi sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jalan kondisi sedang adalah Jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 8 untuk kondisi sedang.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang jalan kondisi sedang relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem tersebut mengalami kondisi yang tergolong sedang. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia jalan yang lebih tua, kurangnya pemeliharaan yang tepat waktu, beban lalu lintas yang tinggi, atau faktor lingkungan lainnya

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase panjang jalan kondisi sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase panjang jalan kondisi sedang adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi sedang dengan panjang jalan kabupaten DPUPR

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika persentase panjang jalan kondisi sedang tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan memiliki kondisi yang tergolong sedang. Kondisi sedang dapat mengindikasikan jalan yang memiliki kerusakan atau keausan pada beberapa bagian, namun masih dapat digunakan dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang memadai

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

Penghitungan

Persentase

Ukuran

%

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Panjang jalan kondisi rusak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jalan kondisi rusak adalah Jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan (kurang dari 20% dari luas jalan yang ditinjau).

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang jalan kondisi rusak relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem tersebut mengalami kerusakan yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perawatan yang tepat, usia jalan yang tua, beban lalu lintas yang berlebihan, atau kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase panjang jalan kondisi rusak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase panjang jalan kondisi rusak adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi rusak dengan panjang jalan kabupaten

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Tingginya persentase ini dapat mengindikasikan kurangnya perawatan yang memadai, usia jalan yang tua, kurangnya alokasi anggaran yang memadai, atau faktor lain yang menyebabkan jalan tidak dapat dipertahankan dalam kondisi yang baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus
Penghitungan

$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi Rusak}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Ya
Diakses Umum



Panjang jalan kondisi rusak berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jalan kondisi rusak berat adalah Jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya dan terkelupas yang cukup besar (20-60% dari luas jalan yang ditinjau) disertai dengan kerusakan lapis pondasi dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur dan sebagainya

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang jalan kondisi rusak berat relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem tersebut mengalami kerusakan yang parah. Kondisi rusak berat dapat meliputi kerusakan struktural, lubang besar, keretakan yang luas, atau kelainan lainnya yang signifikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase panjang jalan kondisi rusak berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase panjang jalan kondisi rusak berat adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi rusak berat dengan panjang jalan kabupaten

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika persentase panjang jalan kondisi rusak berat tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem tersebut mengalami kerusakan yang parah dan memerlukan perbaikan mendesak

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi Berat}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum



Indeks Jalan Mantap (Persentase panjang jalan kondisi baik dan sedang)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Jalan Mantap (Persentase panjang jalan kondisi baik dan sedang) adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi baik dan sedang dengan panjang jalan kabupaten

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika sebuah daerah memiliki indeks jalan mantap yang tinggi, itu menunjukkan bahwa jalan-jalan di daerah tersebut umumnya dalam kondisi baik dan memadai. Permukaan jalan yang halus, bebas lubang, dan minim retakan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Struktur jalan yang kokoh dan terawat juga penting agar jalan dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat menampung lalu lintas yang berat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jalan di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus | $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik dan sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ |
| Penghitungan | |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah jembatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jembatan adalah Suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan pembuangan, jalan kereta api, waduk, dan lain-lain

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jumlah jembatan dapat memberikan gambaran tentang infrastruktur jalan dan transportasi suatu wilayah. Jumlah jembatan yang ada dapat mencerminkan tingkat konektivitas dan aksesibilitas dalam suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jembatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

bua

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah jembatan dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah jembatan dalam kondisi baik adalah Banyaknya jembatan (unit) pada jalan kabupaten yang merupakan prasarana penghubung antar dua jalan yang terpisah dan diinformasikan kondisi fisik yang baik

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika jumlah jembatan dalam kondisi baik relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jembatan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut memenuhi standar kualitas dan memadai untuk digunakan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jembatan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Persentase jembatan dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase jembatan dalam kondisi baik adalah Perbandingan jumlah jembatan kondisi baik dibagi dengan jumlah total jembatan kabupaten

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika persentase jembatan dalam kondisi baik tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jembatan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut memenuhi standar kualitas yang diharapkan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Jembatan di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{jumlah Jembatan Kabupaten}} \times 100\%$$

Penghitungan

Percentase

Ukuran

%

Satuan

Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Ya



Panjang Jalan Aspal (Asphalt Congreed (AC), Asphalt Treated Base (ATB), Hot Rolled Sheet (HRS))

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aspal (Asphalt Congreed (AC), Asphalt Treated Base (ATB), Hot Rolled Sheet (HRS)) adalah Material perekat berwarna hitam atau coklat tua dengan unsur utama bitumen yang diperoleh dari residu hasil pengilangan minyak bumi berfungsi sebagai pengikat agregat dalam pembuatan jalan. Aspal dipilih untuk konstruksi jalan karena mempunyai sifat pekat (consistency), tahan terhadap pelapukan yang disebabkan oleh cuaca, derajat pengerasan dan ketahanan terhadap air

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang jalan aspal (Asphalt Congreed (AC), Asphalt Treated Base (ATB), Hot Rolled Sheet (HRS)) relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut telah dilapisi dengan permukaan aspal. Penggunaan aspal pada jalan dapat memberikan kehalusan permukaan, peningkatan daya tahan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Jalan Perkerasan Rigid/Beton

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rigid/Beton adalah Perkerasan yang menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang jalan perkerasan rigid atau beton relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut menggunakan perkerasan beton

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Jalan Lapis Penetrasi/ Latasir/ Makadam

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penetrasi/Latasir/Makadam adalah Lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok, agregat pengunci dan agregat penutup (khusus untuk lapis permukaan) yang bergradasi seragam yang dihampar secara terpisah dan diberi ikatan awal dengan aspal cair/aspal emulsi dan diikat oleh Asbuton B 50/30

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang jalan lapis penetrasi, latasir, atau makadam relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut menggunakan jenis lapisan permukaan tersebut

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Panjang Jalan Telford/ Kerikil/ Urpil

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Telford/Kerikil/Urpil adalah Penumpukan material tanah dengan dilapisi dengan batu-batuan ukuran kecil. Penggunaan metode ini cocok digunakan pada jalur dengan volume kendaraan yang rendah. Penggunaan Kalsium klorida biasa digunakan terutama pada volume lalu lintas yang tinggi. Hal seperti ini dapat bertahan selama 1 sampai 2 tahun

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang jalan telford, kerikil, atau urpil relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut menggunakan jenis lapisan permukaan tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Jalan Tanah/ Belum Tembus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tanah/Belum tembus adalah Semua endapan yang lepas dan lunak, baik yang diangkut maupun tidak diangkut dari tempat asalnya, yang terjadi secara alamiah di atas lapisan batuan yang padat.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang jalan tanah atau belum tembus relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan dalam wilayah atau sistem jalan tersebut masih berada dalam kondisi tanah alami

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

km

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Drainase Sistem Terbuka

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Drainase Sistem Terbuka adalah Drainase yang memiliki bagian atas terbuka ini berfungsi untuk mengalirkan air yang tidak mengandung limbah berbahaya seperti air hujan. Drainase saluran terbuka sangat cocok jika diterapkan pada daerah yang memiliki luasan cukup

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang drainase sistem terbuka relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa wilayah atau sistem drainase tersebut memiliki jaringan saluran air yang cukup luas

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Baik adalah Total jarak atau panjang fisik saluran drainase yang berfungsi dengan baik dan tidak mengalami masalah signifikan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang drainase sistem terbuka dalam kondisi baik, ini menunjukkan bahwa saluran tersebut tidak rusak, tersumbat, atau terhambat dengan material berbahaya yang dapat mengganggu aliran air.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Sedang adalah Total jarak atau panjang fisik saluran drainase yang mengalami beberapa masalah atau kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi dengan sebagian besar kapasitasnya

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Semakin panjang drainase sistem terbuka kondisi sedang maka perlu area yang memerlukan perbaikan atau pemeliharaan untuk mengoptimalkan aliran air dan mencegah masalah yang lebih serius.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Drainase Sistem Terbuka Kondisi Buruk adalah Total jarak atau panjang fisik saluran drainase yang mengalami masalah, kerusakan, atau hambatan yang signifikan yang mempengaruhi kinerja sistem drainase tersebut

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Panjang drainase dalam kondisi buruk dapat menjadi faktor risiko potensial terhadap banjir, erosi, atau kerusakan properti lainnya. Evaluasi risiko yang tepat dapat membantu dalam mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Drainase Sistem Tertutup

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Drainase Sistem Tertutup adalah Drainase yang memiliki bagian atas tertutup yang umumnya dibangun untuk mengalirkan air limbah yang dapat mengganggu kesehatan/lingkungan. Drainase ini kerap ditemukan di wilayah perkotaan/permukiman.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang drainase sistem tertutup relatif rendah, ini mungkin menunjukkan bahwa wilayah atau sistem drainase tersebut masih mengandalkan drainase terbuka atau belum sepenuhnya memiliki infrastruktur drainase tertutup yang memadai.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Baik adalah Ukuran yang digunakan untuk mengukur total panjang saluran drainase atau pipa yang digunakan dalam sistem drainase tertutup. Sistem drainase tertutup adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengalirkan air hujan dari permukaan tanah atau area terbuka lainnya ke saluran drainase yang tersembunyi di bawah tanah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Dengan memiliki panjang drainase sistem tertutup dalam kondisi baik, air permukaan dapat dikelola dengan efektif, mencegah genangan air berlebih, dan melindungi daerah dari dampak negatif seperti banjir atau kerusakan akibat aliran air yang buruk.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Drainase Perkotaan di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Sedang adalah Jarak total saluran drainase yang masih berfungsi dengan baik, tetapi mungkin mengalami beberapa masalah atau kekurangan dalam operasionalnya.

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Panjang drainase sistem tertutup dalam kondisi sedang menunjukkan perlunya perhatian dan tindakan untuk menjaga dan memperbaiki sistem tersebut. Dengan pemeliharaan yang tepat, sistem drainase dapat ditingkatkan dan dibawa kembali ke kondisi baik, memastikan aliran air yang lebih lancar dan mengurangi risiko genangan air dan masalah terkait lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Drainase Sistem Tertutup Kondisi Buruk adalah Jarak total saluran drainase yang mengalami masalah serius atau rusak secara signifikan. Dalam kondisi buruk, sistem drainase tertutup tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak beroperasi sama sekali.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Panjang drainase sistem tertutup dalam kondisi buruk menunjukkan adanya masalah serius yang mempengaruhi kemampuan sistem untuk mengalirkan air permukaan dengan baik. Tindakan yang diperlukan, seperti perbaikan dan pemeliharaan yang ekstensif, harus dilakukan untuk memperbaiki sistem dan mencegah dampak negatif yang lebih lanjut pada lingkungan sekitarnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Drainase Perkotaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jaringan Irigasi Non Teknis adalah Jaringan irigasi yang memperoleh pengairan jaringan irigasinya masih sederhana dan saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang jaringan irigasi non teknis dapat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap teknologi canggih atau infrastruktur irigasi yang lebih kompleks. Faktor-faktor seperti keterbatasan dana, keterpenciran wilayah, atau kurangnya sumber daya teknis dapat mendorong penggunaan solusi irigasi sederhana yang dapat diakses dan dikelola oleh masyarakat lokal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Baik adalah Jarak total saluran irigasi yang tidak menggunakan teknologi modern atau konstruksi yang rumit, tetapi tetap berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air irigasi dengan efektif.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika terdapat peningkatan panjang saluran irigasi non teknis dalam kondisi baik, hal ini bisa menunjukkan peningkatan dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi non teknis. Mungkin ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat setempat untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, membersihkan saluran dari endapan atau penyumbatan, dan menjaga agar saluran tetap dalam kondisi yang baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Sedang adalah Jarak total saluran irigasi yang masih berfungsi, tetapi mengalami beberapa masalah atau kekurangan dalam operasionalnya. Dalam kondisi sedang, saluran irigasi non-teknis mungkin menghadapi beberapa kendala atau kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan pengiriman air irigasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi non teknis dalam kondisi sedang menandakan bahwa lebih banyak saluran irigasi telah diperbaiki atau dibangun baru.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Rusak Ringan adalah Jarak total saluran irigasi yang mengalami kerusakan minor atau masalah kecil yang mempengaruhi kinerja saluran, tetapi masih memungkinkan untuk mengalirkan air irigasi secara terbatas

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang saluran irigasi yang rusak ringan terus meningkat, ini dapat menunjukkan penurunan umum dalam kualitas infrastruktur irigasi. Ini mungkin disebabkan oleh faktor seperti penuaan infrastruktur, kurangnya investasi dalam perawatan, atau perubahan iklim yang menyebabkan kerusakan lebih sering terjadi. Penurunan kualitas infrastruktur dapat menghambat efisiensi dan produktivitas sistem irigasi secara keseluruhan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Non Teknis Kondisi Rusak Berat adalah Jarak total saluran irigasi yang mengalami kerusakan serius atau masalah yang signifikan yang secara drastis mempengaruhi kinerja saluran dan mencegah atau sangat membatasi aliran air irigasi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi yang rusak berat bisa menunjukkan bahwa ada penurunan dalam investasi dan perawatan infrastruktur irigasi. Kurangnya alokasi dana dan sumber daya untuk memperbaiki dan memelihara saluran irigasi dapat mengakibatkan peningkatan jumlah saluran yang mengalami kerusakan berat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Jaringan Irigasi Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jaringan Irigasi Teknis adalah Irigasi dimana pengairannya bisa diatur dan diukur. Sistem pengairan ini dilengkapi dengan pintu untuk mengatur keluar masuk air

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang jaringan irigasi teknis meningkat, ini bisa mencerminkan adanya investasi dan perhatian yang lebih besar terhadap infrastruktur irigasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Primer

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Saluran Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi primer dapat menunjukkan adanya perluasan wilayah yang diirigasi. Ini bisa mengindikasikan upaya untuk memperluas jangkauan irigasi ke area baru yang sebelumnya tidak teraliri air. Perluasan ini dapat didorong oleh pertumbuhan pertanian, pengembangan lahan, atau kebutuhan air yang meningkat di daerah tersebut

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Baik adalah Jarak total saluran utama yang digunakan untuk mengalirkan air irigasi dari sumber air utama ke area pertanian yang membutuhkan irigasi dan berada dalam kondisi fisik yang optimal dan berfungsi dengan baik.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika panjang saluran irigasi primer dalam kondisi baik meningkat, hal ini bisa menunjukkan adanya peningkatan investasi dan upaya dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur irigasi. Mungkin telah dilakukan alokasi dana dan sumber daya yang lebih besar untuk memperbaiki dan memelihara saluran irigasi primer agar tetap dalam kondisi baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Sedang adalah Jarak total saluran utama yang mengalami beberapa masalah atau kendala yang mempengaruhi kinerja saluran, namun masih memungkinkan untuk mengalirkan air irigasi dengan tingkat efisiensi yang dapat diterima.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi primer yang sedang dalam kondisi baik dapat menunjukkan adanya investasi yang lebih besar dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Pemerintah atau pihak terkait mungkin telah mengalokasikan sumber daya dan dana yang cukup untuk memperluas atau memperbaiki saluran irigasi primer yang ada.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Rusak Ringan adalah Jarak total saluran utama yang mengalami kerusakan minor atau masalah kecil yang mempengaruhi kinerja saluran, tetapi masih memungkinkan untuk mengalirkan air irigasi secara efektif.

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi primer yang kondisinya ringan juga dapat menunjukkan adanya fokus yang lebih besar pada pencegahan kerusakan lebih lanjut. Dengan mengidentifikasi kerusakan ringan pada saluran irigasi, tindakan pencegahan seperti perbaikan rutin dan perawatan yang ditingkatkan dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih serius di masa depan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panjang Saluran Irigasi Primer Kondisi Rusak Berat adalah Jarak total saluran irigasi utama yang mengalami kerusakan serius atau masalah signifikan yang menghambat atau bahkan menghalangi aliran air irigasi secara efektif.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi primer yang kondisinya rusak berat merupakan indikasi dari masalah perawatan dan pemeliharaan yang kurang, dampak bencana alam, ketidakseimbangan investasi infrastruktur, atau meningkatnya kebutuhan perbaikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Panjang Saluran Irigasi Sekunder

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Saluran Irigasi Sekunder adalah Jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya DPUPR

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dapat menunjukkan adanya perluasan cakupan irigasi. Saluran irigasi sekunder biasanya bertanggung jawab untuk mendistribusikan air irigasi dari saluran primer ke lahan pertanian yang lebih kecil

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Baik adalah Saluran irigasi yang berfungsi dengan baik dan mampu mengalirkan air irigasi secara efisien ke lahan pertanian yang dibutuhkan.

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dengan kondisi baik mencerminkan peningkatan efisiensi penggunaan air, peningkatan produktivitas pertanian, keberlanjutan sistem irigasi, dan investasi dalam perawatan dan pemeliharaan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Panjang

Satuan

meter

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Sedang adalah Saluran irigasi sekunder yang masih dapat memberikan air irigasi dengan tingkat efektivitas yang dapat diterima, meskipun dengan beberapa kendala atau kelemahan yang mempengaruhi pengiriman air dan efisiensi sistem.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dengan kondisi sedang dapat menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam perawatan dan pemeliharaan saluran tersebut. Mungkin telah dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan minor, memperbaiki keretakan atau kebocoran, dan memastikan saluran berfungsi dengan baik. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga kondisi saluran irigasi agar tetap layak dan efisien

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Pendataan |
| Ukuran | Panjang |
| Satuan | meter |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Ringan adalah Saluran irigasi yang mengalami kerusakan atau masalah minor yang mempengaruhi kinerja saluran, tetapi masih memungkinkan aliran air irigasi dengan tingkat efisiensi yang dapat diterima.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dengan kondisi ringan yang meningkat dapat menunjukkan upaya untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur irigasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Pendataan
Panjang
meter

Ya



Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Saluran Irigasi Sekunder Kondisi Rusak Berat adalah Saluran irigasi yang memiliki kerusakan serius atau masalah yang signifikan yang mempengaruhi kinerjanya secara menyeluruh dan menghambat atau bahkan menghalangi aliran air irigasi dengan efektif.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan panjang saluran irigasi sekunder dengan kondisi rusak berat mencerminkan masalah perawatan dan pemeliharaan yang kurang, usia pakai saluran irigasi, ketidakseimbangan alokasi dana, atau peningkatan kesadaran akan kondisi saluran irigasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Pendataan
Panjang
meter
Ya



Jumlah Bangunan Irigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bangunan Irigasi adalah Bangunan yang berfungsi untuk membagi air irigasi dari satu saluran kedalam dua atau lebih saluran. Contohnya pada saluran dari bendung dibawa oleh saluran primer, kemudian terdapat bangunan bagi yang membagi saluran tersebut menjadi saluran sekunder kanan dan saluran sekunder kiri. Kondisi bangunan Irigasi hanya membagi saluran kedalam satu saluran sekunder, sedangkan saluran pada lengan yang lain tetap merupakan sebagai saluran primer

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan jumlah bangunan irigasi mencerminkan upaya untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan ketersediaan air irigasi. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas pertanian, keberlanjutan penggunaan air, dan kemandirian petani.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Pendataan
Jumlah
unit
Ya



Jumlah Bendung

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bendung adalah Bangunan yang dibangun melintang sungai sehingga dapat membelokkan air menuju jaringan irigasi. Adanya bendung akan membentuk genangan pada hulu bangunan, selain itu bendung juga dapat berfungsi sebagai penghalang banjir DPUPR

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan jumlah bendung dapat menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya air. Bendung berfungsi untuk mengatur aliran air sungai, mengendalikan banjir, menyimpan air untuk penggunaan irigasi atau kebutuhan domestik, dan memastikan ketersediaan air yang lebih stabil. Dengan peningkatan jumlah bendung, pengelolaan sumber daya air dapat menjadi lebih efisien dan terarah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Pendataan
Jumlah
unit
Ya



Luas Sawah Beririgasi Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Sawah Beririgasi Teknis adalah Luas sawah yang memiliki saluran masuk dan keluar terpisah agar penyediaan dan pembagian air irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika luas sawah beririgasi teknis meningkat, ini bisa menunjukkan adanya peningkatan dalam efisiensi penggunaan air. Irigasi teknis umumnya lebih efisien dalam mengalokasikan dan mengirimkan air ke sawah dengan cara yang optimal. Hal ini dapat mengurangi kebocoran atau pemborosan air, sehingga petani dapat menggunakan sumber daya air dengan lebih efektif dan meminimalkan kebutuhan air tambahan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas Sawah Beririgasi Non Teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Sawah Beririgasi Non Teknis adalah Luas sawah yang memperoleh pengairan jaringan irigasinya masih sederhana dan saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jumlah luas sawah beririgasi non teknis yang meningkat dapat mencerminkan peningkatan jumlah petani dengan sumber daya terbatas yang mengandalkan metode irigasi yang sederhana. Hal ini bisa terjadi di daerah pedesaan di mana petani mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi modern atau infrastruktur irigasi yang lebih canggih.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas Daerah Irigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Daerah Irigasi adalah Luas daerah irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air air irigasi yang dialirkan dapat diatur dan diukur

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan luas daerah irigasi juga dapat menunjukkan adanya pengembangan infrastruktur irigasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Ini bisa termasuk pembangunan atau perluasan saluran irigasi, pembuatan waduk atau bendungan, atau peningkatan sumber daya air untuk memperluas cakupan daerah yang dapat di irigasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi adalah Luas lahan sawah fungsional yang merupakan bagian dari luas potensial yang telah dilayani dengan jaringan jaringan irigasi tersier sehingga jaringan irigasi yang sudah ada berfungsi untuk mengairi lahan sawah yang masuk dalam wilayah pelayanan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi meningkat maka mengindikasikan peningkatan dalam upaya pengembangan dan perluasan jaringan irigasi untuk mencakup lebih banyak lahan pertanian atau kebutuhan air yang lebih besar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konsep dan Definisi | Cakupan Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi adalah Perbandingan luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi dengan luas daerah irigasi DPUPR |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan |
| Interpretasi | Peningkatan persentase cakupan daerah irigasi yang terlayani oleh jaringan irigasi menunjukkan adanya peningkatan akses petani terhadap air irigasi. Ini bisa disebabkan oleh perluasan atau pengembangan jaringan irigasi, peningkatan investasi dalam infrastruktur irigasi, atau upaya perbaikan dan rehabilitasi saluran irigasi yang ada |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Jaringan Irigasi/Pengairan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodikasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

$$\text{Metode/Rumus Penghitungan} \quad \frac{\text{LDIT}}{\text{LDI}} \times 100\%$$

Keterangan:

LDIT = Luas Daerah Irigasi yang terlayani jaringan irigasi

LDI = Luas Daerah Irigasi

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya
Umum



Persentase Luas Oncoran Air Irrigasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Luas Oncoran Air Irrigasi adalah Perbandingan cakupan air dengan luas area irigasi kewenangan Kabupaten

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan persentase luas oncoran air irigasi bisa menunjukkan adanya peningkatan dalam pembangunan atau perbaikan infrastruktur irigasi. Ini bisa termasuk perluasan jaringan saluran irigasi, peningkatan kapasitas waduk atau bendungan, atau peningkatan sumber daya air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan irigasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jaringan Irigasi/Pengairan di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Cakupan Air}}{\text{Luas Area Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Sertifikasi Hasil Uji (SHU)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sertifikasi Hasil Uji (SHU) adalah Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk memastikan bahwa tenaga kerja di industri konstruksi memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan aman.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Jumlah SHU yang tinggi dapat menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan tenaga kerja konstruksi akan pentingnya sertifikasi dan kemauan mereka untuk mengikuti pelatihan yang sesuai

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

peserta

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Kelurahan dan Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga Kerja Konstruksi di Kelurahan dan Desa adalah Tenaga terampil konstruksi yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang konstruksi dan bekerja di tingkat desa atau kelurahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tinggi di daerah dapat mengindikasikan adanya potensi pengembangan dan pertumbuhan di wilayah tersebut. Ini bisa berarti bahwa ada kebutuhan untuk membangun lebih banyak rumah, gedung, atau infrastruktur lainnya untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi atau meningkatkan fasilitas publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

1 desa/kel = 1 orang

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa/kel

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pelaku Jasa Konstruksi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pelaku Jasa Konstruksi adalah jumlah badan usaha terdata yang bergerak dalam industri konstruksi dan menyediakan berbagai jenis layanan terkait pembangunan, perbaikan, atau pengembangan proyek konstruksi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika jumlah pelaku jasa konstruksi meningkat, hal ini dapat menunjukkan adanya pertumbuhan atau ekspansi industri konstruksi di suatu wilayah atau negara

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengelolaan Jasa Konstruksi di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

badan usaha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Jasa Konstruksi yang Terbina

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jasa Konstruksi yang Terbina adalah Asosiasi jasa konstruksi yang terdata. Asosiasi jasa konstruksi adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi perkumpulan badan usaha dan atau individu profesional yang bergerak di dunia jasa konstruksi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan jumlah jasa konstruksi yang terbina dapat menunjukkan adanya peningkatan kapasitas industri konstruksi. Ini berarti bahwa lebih banyak perusahaan atau penyedia jasa konstruksi telah memenuhi persyaratan dan standar yang diperlukan untuk beroperasi secara legal dan profesional

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

asosiasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina adalah Perbandingan jumlah pelaku jasa konstruksi yang terbina dengan kebutuhan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika persentase jasa konstruksi yang terbina meningkat, hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Pelatihan, sertifikasi, atau pembinaan yang diperlukan untuk mendapatkan status "terbina" dapat membantu memperbaiki keterampilan, keahlian, dan profesionalisme para pekerja konstruksi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus
Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi yang terbina}}{\text{Jumlah Kebutuhan}} \times 100\%$$

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator
Dapat Diakses Umum

Persentase

%

Ya



Jumlah bangunan gedung memiliki sertifikat laik fungsi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sertifikat laik fungsi adalah Sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

DPUPR

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Peningkatan jumlah bangunan dengan sertifikat laik fungsi menunjukkan adanya peningkatan dalam pemenuhan standar dan kualitas bangunan

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah bangunan gedung tidak memiliki sertifikat laik fungsi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sertifikat laik fungsi adalah Sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung DPUPR

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika jumlah bangunan gedung tanpa sertifikat laik fungsi meningkat, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah struktural atau teknis dalam bangunan tersebut. Sertifikat laik fungsi biasanya mencakup penilaian struktur bangunan, sistem utilitas, kesesuaian fungsi, dan kepatuhan terhadap standar keamanan. Jika bangunan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat tersebut, ini bisa mengindikasikan kekurangan dalam desain, konstruksi, atau pemeliharaan bangunan.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodikasi

Kondisi Bangunan Gedung di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Pendataan
Jumlah
unit
Ya



Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bangunan pemerintah dalam kondisi baik adalah Bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah yang kondisinya baik (bangunan OPD, Kecamatan, Kelurahan)

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik meningkat, ini bisa mengindikasikan adanya peningkatan dalam upaya perawatan dan pemeliharaan bangunan oleh pemerintah. Ini bisa mencakup perbaikan rutin, pembaruan infrastruktur, dan penggantian komponen yang rusak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah bangunan pemerintah keseluruhan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bangunan pemerintah adalah Bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan jumlah bangunan pemerintah keseluruhan juga bisa mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan infrastruktur publik. Pemerintah dapat membangun gedung-gedung pemerintahan baru, pusat layanan publik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sejenisnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik adalah Perbandingan jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik dengan jumlah bangunan pemerintah keseluruhan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik menunjukkan adanya perhatian dan investasi yang lebih besar dalam memastikan infrastruktur pemerintah yang memadai. Hal ini penting untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup masyarakat, serta membangun kepercayaan dan hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JBB}{JB} \times 100\%$$

Keterangan:

JBB = Jumlah Bangunan Pemerintah Dalam Kondisi Baik

JB = Jumlah Bangunan Pemerintah



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Keseluruhan

Persentase

%

Ya



Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang wilayah di suatu wilayah atau daerah tertentu. RTRW merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan dan ruang secara terencana, berkelanjutan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan DPUPR

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Jumlah RTRW mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan perencanaan tata ruang wilayahnya. Semakin banyak RTRW yang telah disusun, semakin komprehensif dan terperinci perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah Banyaknya rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten. RDTR merupakan instrumen perencanaan yang lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Jumlah RDTR yang ada mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan perencanaan tata ruang secara detail di berbagai wilayah. Semakin banyak RDTR yang telah disusun, semakin mendalam dan terperinci perencanaan tata ruang di setiap kawasan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Permohonan Kesesuaian Tata Ruang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Permohonan Kesesuaian Tata Ruang adalah Jumlah permohonan kesesuaian lokasi lahan/ruang yang diajukan oleh masyarakat/ instansi kepada instansi yang menangani penataan ruang kabupaten

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan jumlah permohonan kesesuaian tata ruang dapat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman dari pemohon terkait pentingnya memastikan kesesuaian rencana penggunaan lahan mereka dengan rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dapat mencerminkan upaya dari pemohon untuk mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rekomendasi TKPRD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi TKPRD (Tim Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah) adalah Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sesuai dengan perbup nomor 650/404 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Serta Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Purbalingga

DPUPR

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Adanya peningkatan dalam jumlah permohonan yang diajukan kepada TKPRD untuk mendapatkan rekomendasi terkait pengendalian tata ruang di suatu wilayah dapat mengindikasikan peningkatan aktivitas perencanaan dan pengendalian tata ruang yang memerlukan pertimbangan dan rekomendasi dari TKPRD.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Kondisi Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan manual

Jumlah

dokumen

Ya



Jumlah Rekomendasi TKPRD Sesuai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi TKPRD Sesuai adalah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (TKPRD) yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. TKPRD biasanya terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga terkait, ahli tata ruang, dan masyarakat terkait. Mereka bertanggung jawab untuk memantau penggunaan ruang aktual dan memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang yang ada.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan jumlah rekomendasi TKPRD yang sesuai menunjukkan adanya peningkatan dalam kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa penggunaan lahan aktual telah mematuhi persyaratan, batasan, dan pedoman yang terkait dengan tata ruang. Peningkatan ini dapat mengindikasikan adanya kesadaran yang lebih besar dan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi tata ruang.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Kondisi Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan manual

Jumlah

dokumen

Ya



Jumlah Rekomendasi TKPRD Tidak Sesuai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi TKPRD Tidak Sesuai adalah Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh Tim Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang berlaku dalam pengendalian tata ruang di suatu daerah. TKPRD merupakan tim yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi terkait pengendalian tata ruang, penataan ruang, serta pemanfaatan lahan dalam suatu wilayah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan jumlah rekomendasi TKPRD yang tidak sesuai dapat mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi tata ruang yang telah ditetapkan. Rekomendasi TKPRD diberikan ketika penggunaan ruang aktual tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah disusun. Peningkatan jumlah rekomendasi semacam itu menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terdeteksi dalam penggunaan ruang.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Kondisi Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan manual

Jumlah

dokumen

Ya



Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) adalah Jumlah informasi kesesuaian tata ruang berdasarkan rencana pola ruang yang tertuang dalam dokumen tata ruang

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jumlah ITR mencerminkan sejauh mana data dan informasi terkait tata ruang wilayah telah dikumpulkan dan tersedia. Semakin banyak informasi yang telah dihimpun, semakin lengkap dan komprehensif pengetahuan tentang tata ruang dan wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) Sesuai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) Sesuai adalah Jumlah informasi yang ada dalam tata ruang yang dihasilkan sesuai dengan peraturan, regulasi, atau ketentuan yang berlaku dalam perencanaan tata ruang

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika ITR sesuai, ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah informasi tata ruang yang cukup dan memadai tentang wilayah atau area geografis yang relevan. Informasi ini mencakup data spasial yang diperlukan untuk memahami dan menganalisis elemen-elemen tata ruang seperti pemetaan tanah, penggunaan lahan, infrastruktur, dan aspek-aspek lain yang terkait

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) Tidak Sesuai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) Tidak Sesuai adalah Jumlah informasi yang tersedia dalam konteks tata ruang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dibutuhkan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Jumlah ITR yang tidak sesuai dapat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan informasi yang relevan atau penting dalam konteks tata ruang. Informasi yang diperlukan mungkin tidak lengkap atau tidak mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan atau perencanaan yang efektif dalam pengaturan tata ruang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) ITR WIUP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR) ITR WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) adalah Banyaknya informasi dan data yang tersedia terkait tata ruang wilayah di suatu lokasi yang telah diizinkan untuk kegiatan pertambangan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Peningkatan jumlah ITR WIUP menunjukkan adanya peningkatan dalam pengawasan dan pemantauan aktivitas pertambangan di wilayah yang memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ketaatan pelaksanaan penataan ruang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ketaatan pelaksanaan penataan ruang adalah Perbandingan realisasi pemanfaatan ruang dengan rencana peruntukan (pola ruang)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika ketaatan pelaksanaan penataan ruang tinggi, ini menunjukkan bahwa para pelaku, baik pemerintah maupun pihak swasta, secara umum mematuhi peraturan dan keputusan penataan ruang yang ada. Mereka mematuhi batasan penggunaan lahan, rencana tata ruang, dan regulasi lainnya yang ditetapkan untuk memastikan pembangunan yang teratur, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan. Ketaatan yang tinggi dapat menghasilkan keberlanjutan lingkungan, penggunaan lahan yang optimal, dan mencegah konflik kepentingan yang merugikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{RPR}{RP} \times 100\%$$

Keterangan:

RPR = Realisasi pemanfaatan ruang
(jumlah permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang)

RP = Rencana peruntukan (jumlah total permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang)

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan adalah Perbandingan jumlah informasi tata ruang yang diterbitkan dengan jumlah informasi yang dimohonkan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang atau lahan digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perencanaan Tata Ruang
dan Pemanfaatan Ruang di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JIRTR}{JIM} \times 100\%$$

Keterangan:

JIRTR = Jumlah informasi tata ruang
yang diterbitkan

JIM = Jumlah informasi yang



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

dimohonkan

Persentase

%

Ya



Persentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik adalah Peningkatan persentase cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik dari tahun ke tahun

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika persentase peningkatan tersebut positif, artinya jumlah bangunan pemerintah yang berada dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan bangunan sehingga kondisi bangunan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Daya Saing Infrastruktur di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik tahun n - Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik tahun (n-1)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Indeks Jalan Mantap (Persentase panjang jalan kondisi baik dan sedang)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Jalan Mantap (Persentase panjang jalan kondisi baik dan sedang) adalah Perbandingan antara panjang jalan kondisi baik dan sedang dengan panjang jalan kabupaten dengan perhitungan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI)

Unit Penyelenggara

DPUPR

Kelompok Indikator

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Interpretasi

Jika sebuah daerah memiliki indeks jalan mantap yang tinggi, itu menunjukkan bahwa jalan-jalan di daerah tersebut umumnya dalam kondisi baik dan memadai. Permukaan jalan yang halus, bebas lubang, dan minim retakan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Struktur jalan yang kokoh dan terawat juga penting agar jalan dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat menampung lalu lintas yang berat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Daya Saing Infrastruktur di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JBS}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

JBS = Panjang Jalan Kondisi Baik
dan Sedang

JK = Panjang Jalan Kabupaten

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah adalah Indikator yang memperlihatkan kemampuan infrastruktur dasar daerah yang terdiri atas kualitas jalan, akses air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan pemilikan rumah (Rata-rata perhitungan antara indeks jalan mantap dengan rasio koneksi angkutan jalan)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

DPUPR
Aspek Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan

Interpretasi

Indeks yang tinggi mengindikasikan daerah tersebut memiliki jaringan transportasi yang baik, termasuk jalan-jalan yang baik dan sistem transportasi publik yang efisien

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Daya Saing Infrastruktur di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{IJM + RK}{2}$$

Keterangan :

IJM = Indeks Jalan Mantap

RK = Rasio Konektivitas

Ukuran

Indeks

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya

METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN PURBALINGGA

Buku Metadata Indikator Statistik Sektoral berisi sekumpulan atribut informasi dari seluruh data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Purbalingga.

Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, terdiri dari metadata indikator dari Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappelitbangda, Bakeuda, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Dindikbud, Dinkes dan DPUPR.

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Letkol Isdiman No. 17A,
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313